



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



THEIR STORY

RISET MEDIA MEMANDANG KERAGAMAN
GENDER DAN SEKSUAL NON-NORMATIF
("LGBT")

WIDIA PRIMASTIKA - LESTARI NURHAJATI - DINA LISTIORINI -
MARINA NASUTION - LUVIANA - REKA KAJAKSANA

Periset:

Widia Primastika, Lestari Nurhajati,
Luviana, Marina Nasution, Reka Kajaksana

Penulis:

Widia Primastika, Lestari Nurhajati,
Luviana, Marina Nasution, Dina Listiorini

Editor:

Dina Listiorini

Ilustrasi Cover:

Maria Cecilia Widia Tersianinta

Tata Letak isi:

Sub Div and Design

Penerbit:

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta

Diterbitkan oleh : AJI Jakarta
Cetakan Pertama : Januari 2022
Hak Cipta :

Dilarang memperbanyak tulisan dalam buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penelitian ini terlaksana atas dukungan rakyat Amerika Serikat melalui USAID. Isi dalam buku ini merupakan tanggung jawab Konde.co dan tidak mencerminkan pandangan Internews, USAID, maupun Pemerintah Amerika Serikat. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Their Story

Riset Media Memandang
Keragaman Gender Dan
Seksual Non Normatif “LGBT”

Daftar Isi

Halaman Dedikasi

Kata Pengantar Peneliti

Kata Pengantar Direktur Suara Kita

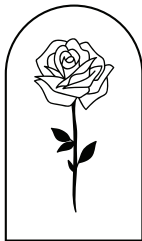
Ringkasan Eksekutif

Glosarium

1. PENDAHULUAN	14
1. Siapa Memulai Kebencian Terhadap “LGBT”?	14
1.1. Latar Belakang	14
1.2. Permasalahan	20
1.3. Tujuan Penelitian	21
1.4. Kerangka Berpikir	34
1.5. Metodologi Penelitian	
2. FRAMING MEDIA DARING	42
2.1. Pemberitaan tentang pembakaran Mira, transpuan di Cilincing yang dituduh mencuri.	44
2.2. Pemberitaan tentang prank yang dilakukan oleh Youtuber Ferdian Paleka terhadap transpuan di Bandung	54
2.3. Pemberitaan tentang ‘pesta’ di apartemen Kuningan yang diselenggarakan oleh komunitas ‘gay’	66
2.4. Kesimpulan	78
3. MENYINGKAP KEBIJAKAN DAN KEPATUHAN TELEVISI ATAS ISU “LGBT”	80
3.1. Mengapa Representasi Individu atau Komunitas dengan Keragaman Gender dan Seksual Non- normatif Penting?	85
3.2. Karakter Jurnalis Menjadi Utama	85
3.3. Pengaruh Iklan pada Isu Individu atau Komunitas/ Kelompok dengan Keragaman Gender dan Seksual Non-normatif	91 93
3.4. Celah dan Harapan Dalam Situasi Khusus	96
3.5. Kesimpulan	

	98
4. MEDIA DARING DAN ISU “LGBT”:	99
KECEPATAN, KEMANUSIAAN DAN KEBUTUHAN KLIK	
4.1. Jurnalis dan Content Creator	106
4.2. Kebijakan Redaksi Untuk Isu Keragaman Gender dan Seksual Non-Normatif	108 112
4.3. Pos Khusus dan Kebutuhan Kecepatan	
4.4. Pelatihan Khusus untuk Isu Keragaman Gender dan Seksual Non-Normatif	114
4.5. Kesimpulan	116
	112
5. MENYISIK MASA DEPAN JURNALIS “LGBT”	127
5.1. Ruang Diskusi yang “Dibatasi” di Media	129
5.2. Tantangan dari Eksternal media	
5.3. Kesimpulan	130
6. PENUTUP	133
	134
BIOGRAFI PENULIS	
REFERENSI	

*Untuk Mira, dan perjuangan kesetaraan bagi
semua orang dengan keragaman gender dan
seksual non-normatif.*



Kata Pengantar Peneliti

Awal tahun 2016, terdapat 2 lembaga negara yang mengeluarkan aturan terkait keberadaan individu atau komunitas/kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif yang disebut 'Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender ("LGBT")' di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 12 Februari 2016 mengeluarkan aturan yang intinya melarang stasiun TV dan radio menyiarkan tayangan yang mengkampanyekan lesbian, gay, biseksual dan transgender. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada tahun yang sama juga mengajukan pemblokiran terhadap aplikasi *Grindr*, *Blued* dan *BoyAhoj*. Sejak itu tonggak kebencian terhadap individu atau kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif dimulai di media. Media menyebut mereka sebagai "LGBT". Aturan yang dikeluarkan KPI pada Februari 2016 selanjutnya menjadi 'kampanye efektif' bagaimana sosialisasi kebencian dan diskriminasi terhadap LGBT dilakukan di media.

Pada masa pandemi sejak 2020 hingga 2021, tampaknya pemberitaan mengenai "LGBT" tidak surut, demikian pula isi berita yang tidak ramah dan mengandung stigma, subordinasi serta diskriminasi pada kelompok atau komunitas dengan keragaman gender dan seksual ini. Padahal hakikat media memiliki fungsi konstruksi yaitu mengkritik peraturan pemerintah dan membawa suara publik terlebih kelompok marjinal, dan fungsi lainnya, yaitu fungsi dekonstruksi atau mendorong perubahan di masyarakat. Pun lembaga negara seperti KPI juga masih menyoroti komunitas keragaman gender dan seksual non-normatif melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 pada 17 Maret 2021 yang mengatur pelaksanaan penyiaran khusus LGBT pada bulan Ramadhan, yang dinilai menebarkan kebencian terhadap "LGBT" di media.

Dari pemaparan-pemaparan tersebut, Konde.co merasa perlu untuk melihat apakah terjadi perubahan terhadap pemberitaan mengenai kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif terhadap "LGBT". Konde.co juga menindaklanjuti 4 (empat) penelitian terdahulu yang hanya melihat representasi media, tetapi belum secara khusus memotret kebijakan redaksi dalam memberitakan mengenai "LGBT", baik di media cetak, daring maupun penyiaran. Selain itu, Konde.co juga merasa perlu mengetahui pandangan para jurnalis media mengenai isu tersebut, terutama jurnalis media dengan identitas non-heteroseksual atau non-biner untuk mengetahui kebijakan yang mempengaruhi lingkungan redaksi.

Semoga penelitian ini bisa memberikan gambaran utuh tentang bagaimana kebijakan redaksi, serta siapa saja pihak-pihak yang berpengaruh dalam ruang redaksi terhadap

kebijakan mengenai individu atau komunitas/kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif yang kerap disebut sebagai “LGBT” oleh media di Indonesia. Dengan penelitian ini, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini dan ikut berpartisipasi dalam penelitian, serta kami mengucapkan terima kasih kepada USAID dan Internews yang telah mendukung semua rangkaian dan proses kegiatan dalam penelitian ini.

Salam hormat,

Widia Primastika
Koordinator Riset Konde.co

Kata Pengantar

Media dan LGBTIQ adalah dua entitas yang berbeda, namun saling membutuhkan. Media memberitakan LGBTIQ dengan framing tertentu dan tujuan tertentu. Sebagian media menarasikan LGBTIQ sebagai tidak bermoral, menyimpang dan bahkan berbahaya. Tentu disini media mengutip pemberitaan berdasarkan pendapat tokoh yang berpengaruh, semacam pejabat publik, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat yang tidak memahami apa hakikat keberagaman gender dan seksualitas. Pemberitaan media yang diangkat dalam penelitian buku ini menjadi kisah lain (dan semestinya) media memandang LGBTIQ. **RISET MEDIA MEMANDANG KERAGAMAN GENDER DAN SEKSUAL NON-NORMATIF (“LGBT”)** buah karya Konde.Co ini adalah narasi yang perlu diapresiasi, dan sekaligus di kritisi. Apresiasi karena riset yang melibatkan kelompok LGBTIQ masih sangat sedikit dan jarang, dikritisi karena hasil riset mestinya bisa membuka fakta-fakta LGBTIQ yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan.

Media punya sistem tersendiri mulai dari jurnalis, konten berita, rapat redaksi, sampai industri media dan sebagainya yang masing-masing punya atensi tersendiri. Akhirnya jamak pemberitaan tentang LGBTIQ hanya berita sensasi semata dan media hanya bergegas untuk tampil viral sebagai yang terdepan. Kasus-kasus yang diangkat dalam penelitian ini misalnya tentang: Pemberitaan Transpuan yang Dibakar Hidup-Hidup, Pemberitaan Ferdian Paleka yang melakukan prank terhadap transpuan, atau pun juga Pemberitaan pesta gay di apartemen Kuningan sedikit banyak mentahbiskan stereotype LGBTIQ yang negatif.

Upaya-upaya yang mestinya dilakukan jurnalis adalah yang berkeadilan yang dalam pemberitaan mestinya dikedepankan. Walau rambu-rambu regulasi seperti UU Pers, Kode Etik Jurnalistik , Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran telah dibuat ketat, namun pada akhirnya sering terlanggar juga. Lantas bagaimana idealnya pemberitaan LGBTIQ ? Yang utama adalah bersikap adil dalam pemberitaan, selanjutnya silahkan baca dalam penelitian ini.

Akhirnya tak perlulah menjadi LGBTIQ untuk dapat merasakan getirnya menjadi LGBTIQ di Indonesia, bacalah hasil penelitian Konde. co ini, mudah-mudahan bisa membuka mata hati pembaca.

Semoga.
Salam Keberagaman,

Yudi
Direktur Perkumpulan Suara Kita

Ringkasan Eksekutif

Sejumlah penelitian tentang bagaimana media memandang isu individu atau kelompok/komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengungkap soal bagaimana sebenarnya kebijakan redaksi media untuk isu LGBT

Penelitian yang dilakukan Konde.co dengan dukungan Internews ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan redaksi dalam memandang isu terkait individu atau kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif di media di Indonesia, "LGBT". Penelitian yang dilakukan Konde.co dalam program ini mengungkap bagaimana media menuliskan soal individu atau kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif, serta bagaimana kebijakan redaksi media terhadap isu tersebut.

Konde.co dalam program ini melakukan 3 (tiga) riset mengenai kebijakan media mengenai individu atau kelompok/komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif ("LGBT") yaitu:

1. Pertama, riset framing media terhadap 10 media *online* (Maret 2020-Februari 2021).
2. Kedua, riset analisis kritis studi media terhadap kebijakan redaksi dengan melakukan *indepth interview* terhadap kebijakan redaksi media (4 media *online* dan 2 media televisi) dalam memandang LGBT.
3. Ketiga, analisis wawancara mendalam terhadap 6 jurnalis dengan identitas keragaman gender dan seksual non-normatif untuk mengetahui dinamika atau perlakuan di *newsroom* terhadap isu individu atau kelompok/komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif serta dampak dari pemberitaan terhadap mereka

Secara umum hasil ketiga riset menunjukkan beberapa hal yaitu:

1. Riset pertama, berupa analisis *framing* pada 10 media daring dengan pembaca terbanyak versi Alexa.com 1 Juli 2021 yakni Okezone.com, Tribunnews.com, Kompas.com, Detik.com, Liputan6.com, Merdeka.com, Grid.id, Suara.com, Kumparan.com, Pikiran-rakyat.com. Peneliti kemudian memilih 3 berita (ketiganya kebetulan merupakan berita kriminal), yang dinilai

mewakili peristiwa yang terkait dengan komunitas “LGBT” karena mendapat perhatian cukup besar dari publik, yaitu: pemberitaan tentang pembakaran Mira, transpuan di Cilincing yang dituduh mencuri, pemberitaan tentang *prank* yang dilakukan oleh *Youtuber* Ferdian Paleka terhadap transpuan di Bandung, dan pemberitaan tentang ‘pesta’ di apartemen Kuningan yang diselenggarakan oleh komunitas ‘gay’. Hasil riset secara umum menyebut bahwa mayoritas media cenderung melihat peristiwa yang menimpa “LGBT” semata sebagai peristiwa kriminal dan belum melihat sebagai isu diskriminasi perlakuan terhadap minoritas “LGBT”. Media juga masih melakukan marginalisasi terhadap komunitas gender dan seksualitas ‘non-normatif’. Media menggunakan pola peminggiran yang sama terhadap komunitas “LGBT” yakni dengan pemilihan diksi yang berkonotasi negatif, hingga pemilihan narasumber yang terbatas pada otoritas resmi.

2. Riset kedua dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak di media yang memiliki kekuasaan atau wewenang terhadap kontrol kebijakan pemberitaan terutama yang berkaitan dengan pemberitaan “LGBT”. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peminggiran dan diskriminasi terhadap “LGBT” dilakukan oleh media terutama sejak 2016. Media antara lain mengeluarkan pernyataan-pernyataan dari para pejabat negara yang mengeluarkan ujaran kebencian pada individu atau kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif yang disebut sebagai “LGBT”. Kondisi ini menjadikan permusuhan terhadap komunitas “LGBT” seolah makin melembaga. Para pemangku kepentingan media masih menempatkan polisi sebagai narasumber utama pada berita kriminal yang terkait dengan komunitas “LGBT” sehingga polisi, sebagai pihak yang juga merupakan pelaku persekusi terbanyak kedua pada komunitas “LGBT”, memiliki kuasa yang besar terhadap pembentukan narasi publik terhadap komunitas gender dan seksual “non-normatif”.
3. Riset ketiga, yaitu riset terhadap jurnalis yang memiliki identitas keragaman gender dan seksual non-normatif. Peneliti menemukan bahwa meskipun para pemangku kebijakan media mengatakan bahwa mereka telah menerapkan pemahaman soal inklusivitas gender, nyatanya para jurnalis mengatakan bahwa masih ada kultur homophobia dan transphobia di ruang redaksi. Kultur ini terjadi di dalam perkawanan sosial di redaksi dan berimbas pada pemberitaan. Kondisi ini menjadikan jurnalis yang memiliki

gender dan seksual 'non-normatif' menjadi tidak nyaman. Peneliti pun menemukan bahwa jurnalis tak hanya merasakan ketidaknyamanan di internal, tapi juga di eksternal, misalnya dalam bentuk *misgendering* hingga doxing bernuansa SARA.

Hasil riset ini selanjutnya diharapkan bisa digunakan sebagai bahan advokasi kebijakan bagi media agar memiliki kebijakan redaksi yang adil dan lebih sensitif gender. Sedangkan bagi kelompok masyarakat sipil, riset ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk strategi advokasi dan kampanye. Peneliti berharap agar riset ini bisa membentuk kesadaran pemerintah untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi bagi komunitas gender dan seksual 'non-normatif'.

Glosarium

Biner

Konstruksi gender yang hanya mengakui dua bentuk gender yakni maskulin dan feminin. Konstruksi gender biner mengakibatkan seseorang berpotensi mendapatkan diskriminasi atau dianggap “menyimpang” ketika memiliki penampilan tidak sesuai dengan gender yang diberikan ketika lahir. Contohnya ketika seseorang diberi jenis kelamin laki-laki saat lahir, ia diharuskan berpenampilan dan berperilaku maskulin.

Gender dan seksual non-normatif

Identitas di luar bentuk normalisasi gender dan seksual yang dibingkai oleh gender dan seksual dominan atau yang memiliki kuasa lebih besar dalam politik dan sosial.

Heteronormativitas

Sebuah konstruksi yang diskriminatif karena menentang relasi di luar laki-laki dan perempuan. Konstruksi ini juga menempatkan laki-laki sebagai pemilik kuasa yang dominan.

Homofobia

Sebuah kebencian dan ketakutan tak berdasar kepada orang-orang yang memiliki identitas gender dan seksual selain heteroseksual.

Misgendering

Misgender adalah pemanggilan seseorang yang tidak sesuai dengan gender yang dipilih atau diidentifikasi oleh individu tersebut. Pengalaman misgendering sering terjadi pada komunitas transgender. Contoh: seseorang ketika lahir diberi gender perempuan oleh tenaga medis/orang tuanya, tapi berdasarkan pengalaman ketubuhan personal saat tumbuh-kembang, mereka merasakan diri mereka adalah seorang laki-laki. Ia kemudian bertransisi menjadi pria dan meminta orang lain memanggilnya dengan penyebutan pria. Misgendering terjadi ketika orang lain memaksa untuk memanggil orang tersebut dengan panggilan perempuan.

SOGIE SC

SOGIE SC merupakan akronim dari *Sexual Orientation, Gender Identification and Expression*, dan *Sex Characteristics*. SOGIE SC merupakan konsep pemahaman mengenai pengalaman personal ketubuhan seseorang. *Sexual Orientation*

merupakan ketertarikan seseorang secara fisik, emosional, maupun seksual pada gender tertentu. *Gender Identification* adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi atau memilih gendernya berdasarkan pengalaman personal masing-masing, tanpa ada paksaan dari siapapun. *Expression* adalah ekspresi seseorang terhadap dirinya. *Sex Characteristics* adalah karakter seksual seseorang berdasarkan kondisi biologis.

Subordinasi

Peran dan posisi yang lebih rendah berdasarkan gender dan seksual dalam kerangka heteronormativitas. Hal ini mengakibatkan orang yang memiliki gender dan seksual non-normatif memiliki peran yang “dibatasi” oleh lingkungan sosialnya.

BAB 1

SIAPA MEMULAI KEBENCIAN TERHADAP “LGBT”?

1.1. Latar Belakang Masalah

Siapa sebenarnya yang memulai kebencian terhadap kelompok orang dengan keragaman gender dan seksual non-normatif di Indonesia? Pemerintah, masyarakat atau media? Kebencian terhadap kelompok atau komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif pecah pada 2016 melalui kasus administratif sebuah kelompok studi gender dan seksualitas di Universitas Indonesia. Sejak itu komunitas yang disebut media sebagai “LGBT” tersebut berada di bawah tekanan dan ancaman (Human Rights Watch, 2016).

Media melakukan tekanan luar biasa keras (backlash) melalui pernyataan-pernyataan dari pihak pemerintah yang berlanjut ke kementerian dan komisi-komisi negara dan partai politik berbasis Islam, kelompok-kelompok organisasi massa Islam kanan seperti MUI, NU, Muhammadiyah (Davies, 2016), hingga kelompok akademisi (Davies, 2016, Human Rights Watch, 2016, Zakiah and Az Zahra, 2016). Mengenai bagaimana hal ini bisa dilihat dari beberapa penelitian yang membahas mengenai bagaimana media melakukan konstruksi terhadap “LGBT” di Indonesia selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

- a. Penelitian yang dilakukan Luviana, Pemimpin Redaksi Konde.co pada 2016 tentang bagaimana media menuliskan berita “LGBT”. Riset menyimpulkan bahwa media menuliskan soal “LGBT” dalam 4 (empat) perspektif yang berbeda-beda, yaitu perspektif agama, perspektif normatif, perspektif konstruktif dan perspektif kritis.

Penelitian ini mengemukakan masih banyak media menuliskan “LGBT” dari perspektif agama dan normatif. Melalui perspektif agama, media menuliskan kebencian-kebencian pemuka agama terhadap komunitas “LGBT”. Media juga menjadikan pemuka agama sebagai narasumber utama yang dipandang paling tahu soal “LGBT” dan mengatur kehidupan “LGBT” dengan kutipan-kutipan mereka yang selalu menyatakan bahwa “LGBT” tidak sesuai dengan ajaran agama di Indonesia. Sementara dalam perspektif normatif, media menuliskan bahwa “LGBT” tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan di Indonesia, seperti dianggap generasi belok, tidak normal yang intinya menyatakan mereka tak bisa hidup di Indonesia. Dua perspektif lainnya yaitu konstruktivis yang memberitakan keterlibatan komunitas dengan keragaman gender dan seksual terlibat dengan berbagai kegiatan sosial di masyarakat; dan perspektif kritis, di mana media mencoba membongkar norma dan agama yang selama ini mendiskriminasi “LGBT”. Namun, penulisan dari perspektif kritis ini sayangnya masih minim dan umumnya hanya dilakukan oleh media-media alternatif.

- b. Penelitian monitoring yang dilakukan oleh Zakiah dan Az Zahra (2016) dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Jakarta yang berjudul “LGBT=Nuklir? Indonesia Darurat Fobia”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa media memberikan 11 (sebelas) stigma yang dilekatkan pada komunitas “LGBT” yaitu ancaman bangsa, propaganda liberal, feminis dan HAM, perilaku menyimpang, kejahatan seksual, penyebab HIV, seks bebas, bertentangan dengan agama dan moral, penyakit jiwa, bertentangan dengan hukum dan Pancasila, menular dan menjijikkan. Sebelas stigma tersebut diringkas menjadi lima stigma termasuk di dalamnya adalah stigma media. Dampak dari pemberitaan yang negatif terhadap LGBT menurut LBHM (2017) adalah diskriminasi dan upaya mendiskriminasi yang terjadi

sepanjang 2016 baik yang dilakukan oleh negara dan berbagai elemen warga masyarakat (menurut catatan LBHM ada 11 yaitu organisasi keagamaan, politisi/anggota parlemen, institusi pendidikan atau pendidik, tokoh agama, menteri/kementerian, psikolog/dokter, pemerintah/kepala daerah, tokoh publik, polisi, komisioner Komnas Perlindungan Anak Indonesia/ KPAI dan hakim Mahkamah Konstitusi.

- c. Penelitian yang berjudul *Moral Panics on LGBT Issues: Evidence from Indonesian TV Programme* oleh Dina Listiorini dkk (2020). Penelitian ini adalah kajian teks pada dua episode tayangan gelar wicara dalam program *Indonesia Lawyer's Club (ILC)* di TV One pada 2016 dengan menggunakan metode framing Robert Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan narasumber yang dimunculkan di sebuah program TV tidak hanya mempromosikan tindakan anti-"LGBT", tetapi juga homofobia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepanikan moral "LGBT" yang dibingkai dalam dua episode acara ILC menunjukkan pertama, negara tidak pernah menolerir keberadaan "LGBT" dan menganggap kelompok dengan keragaman gender dan seksual sebagai kelompok berbahaya. Namun, penolakan yang diberikan oleh negara harus ditegakkan dengan peraturan perundang-undangan yang tepat; kedua, episode-episode ILC pada 2016 juga menunjukkan bahwa kemunculan dan menguatnya isu "LGBT" tidak lepas dari pengaruh penguatan politik Islam sayap kanan; ketiga, kedua episode tersebut juga menunjukkan bahwa negara mempromosikan ketakutan yang berlebihan terhadap komunitas "LGBT" atau homofobia.
- d. Disertasi berjudul *"Rezim Kebenaran Media dalam Kepanikan Moral (Diskursus Foucauldian "LGBT" dalam Gelar Wicara Televisi dan Berita Daring 2016-2018)." Disertasi karya Dina Listiorini (2020)* bertujuan menjelaskan terbentuknya sebuah rezim

kebenaran media dengan praktik kuasa dan kebenaran yang dilakukan secara sistematis oleh industri media yang dibentuk melalui kepanikan moral. Penelitian disertasi ini menemukan bahwa “LGBT” di media ditulis sebagai folk devils atau setan masyarakat yang tidak hanya ditolak tetapi juga dikriminalkan karena keberadaan mereka yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai sosial bangsa Indonesia. Dalam disertasinya disebutkan, pada 2016-2018 di Indonesia, rezim kebenaran media dalam menuliskan “LGBT” adalah rezim media homofobik. Selama 2016-2018 tersebut, media massa baik konvensional atau daring menghujani kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif dengan berita yang berisi stigma, marginalisasi dan upaya kriminalisasi. Dalam hal ini, media membentuk ketakutan dan dominasi dengan mengacu rezim moral yang heteronormatif dan agamis.

Keempat penelitian lebih banyak mengungkap hal-hal yang berada di balik teks media, tetapi belum mengungkap penyebab kebijakan redaksi media melakukan hal tersebut. Keempat penelitian belum melihat apakah kebijakan redaksi dibuat berdasar aturan pemerintah, aturan lembaga negara yang melarang “LGBT” masuk di media penyiaran, atau aturan lingkungan berdasarkan norma dan agama? Termasuk apakah ada dampak dari kepanikan moral “LGBT” pada 2016-2018 yang menimpa jurnalis dengan identitas non-heteroseksual atau non-biner.

Sejak terjadinya *media backlash* pada “LGBT” awal 2016, setidaknya dua lembaga negara mengeluarkan aturan terkait keberadaan mereka. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 12 Februari 2016 mengeluarkan aturan yang intinya melarang stasiun TV dan radio menyiarkan tayangan yang mengkampanyekan lesbian, gay, biseksual dan transgender. Aturan tersebut dibuat dengan alasan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan remaja yang rentan menduplikasi perilaku menyimpang lesbian,

gay, biseksual dan transgender atau “LGBT” (cnnindonesia.com, 2016). Kemenkominfo pada tahun yang sama mengajukan pemblokiran terhadap aplikasi Grindr, Blued dan BoyAhoy. Hal ini disayangkan mengingat ketiga aplikasi tersebut juga dilakukan untuk melakukan promosi pencegahan HIV/AIDS oleh berbagai organisasi (Listiorini dan Davies, 2017). Kebijakan Kemenkominfo ini diulang pada 2018 dengan pemblokiran aplikasi Blued, Grindr dan BoyAhoy (cnnindonesia.com, 2018).

Aturan yang dikeluarkan KPI pada Februari 2016 tersebut juga seolah menjadi tonggak penabuh genderang kebencian terhadap komunitas atau kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif. Pasca-keluarnya aturan tersebut, DPR RI juga menyerukan ujaran kebencian terhadap “LGBT” yang dimuat di berbagai media. Diskriminasi dan stigma yang terjadi dari aturan KPI ini berpengaruh terhadap tindakan masyarakat yang meyakini bahwa kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif ini memang patut ditolak. Salah satu tindakan yang dibuat masyarakat adalah membuat petisi *online* yang berisi penolakan terhadap wacana legalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Petisi itu berjudul ‘Kepada Yth Komnas HAM dan DPR RI Kami Menolak Legalisasi LGBT di Indonesia’ yang dibuat di situs Petisionline.net (tempo.co, 2016).

Pada masa pandemi sejak 2020 hingga 2021, tampaknya pemberitaan mengenai “LGBT” tidak surut, demikian pula isi berita yang tidak ramah dan mengandung stigma, subordinasi serta diskriminasi pada kelompok atau komunitas dengan keragaman gender dan seksual ini. Padahal hakikat media memiliki fungsi konstruksi yaitu mengkritik peraturan pemerintah dan membawa suara publik terlebih kelompok marjinal, dan fungsi lainnya, yaitu fungsi dekonstruksi atau mendorong perubahan di masyarakat.

Lembaga negara seperti KPI juga masih menyasar komunitas tersebut melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 pada 17 Maret 2021 yang mengatur pelaksanaan penyiaran penyiaran “LGBT” pada bulan Ramadhan. Dalam surat edaran tersebut antara lain memberikan himbauan pada

media penyiaran untuk tidak menampilkan program yang mengandung beberapa jenis muatan antara lain muatan yang mengandung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (“LGBT”), bincang-bincang seks, serta muatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melihat aturan ini kembali menebarkan kebencian terhadap “LGBT” di media.

Dari pemaparan-pemaparan tersebut, Konde.co merasa perlu untuk melihat apakah terjadi perubahan terhadap pemberitaan mengenai kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif selama masa pandemi. Konde.co juga menindaklanjuti empat penelitian terdahulu yang hanya melihat representasi media, tetapi belum secara khusus memotret kebijakan redaksi dalam memberitakan mengenai “LGBT”, baik di media cetak, daring maupun penyiaran. Selain itu, Konde.co juga merasa perlu mengetahui pandangan para jurnalis media mengenai isu tersebut, terutama jurnalis media dengan identitas non-heteroseksual atau non-biner.

Untuk keperluan tersebut, maka Konde.co akan melakukan:

1. Pertama, riset framing 10 media online periode Maret 2020-Februari 2021. Periode ini dipilih setelah melalui riset awal yang menyatakan cukup banyak berita mengenai “LGBT” terutama di media online. Media online dipilih karena saat ini pola konsumsi audiens terhadap media sudah berubah. Audiens lebih menyukai media online sebagai bacaan/berita. Penelitian isi berita dengan metode framing dilakukan terhadap 10 media online arus utama di Indonesia menurut ranking Alexa.com. Untuk mengerucutkan bingkai media terhadap permasalahan individu atau kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif tersebut, peneliti Konde.co memilih tiga topik terkait kriminalitas, yaitu kasus mengenai pembakaran Mira, kasus Ferdian Paleka di Bandung dan kasus “pesta gay” Kuningan;

2. Kedua, analisis kritis media terhadap kebijakan redaksi media (5 media online dan 2 media televisi) dalam memandang permasalahan mengenai “LGBT”. Pengambilan media televisi dibutuhkan mengacu pada aturan KPI yang melarang media penyiaran menampilkan muatan “LGBT”. Riset ini untuk melihat kebijakan redaksi dalam tayangan dengan muatan “LGBT” sejak diberikan peringatan oleh KPI pada 2016;
3. Ketiga, adalah riset dengan jurnalis yang beridentitas non-heteroseksual dan non-biner, untuk melihat apakah ada dampak terhadap mereka sebagai akibat dari kebijakan redaksi dan manajemen perusahaan media. Hasil penelitian akan diserahkan pada lembaga pers dan lembaga negara yang harus memperjuangkan dan mendorong perjuangan “LGBT” di media, antara lain: Dewan Pers, KPI, Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

1.2. Permasalahan

Riset dalam buku ini akan menjawab sejumlah pertanyaan seperti:

1. Bagaimana bingkai berita di media menuliskan tentang kelompok atau komunitas keragaman gender dan seksual non-normatif (“LGBT”)?
2. Apa saja dan bagaimana kebijakan redaksi untuk pemberitaan mengenai kelompok atau komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif?
3. Adakah dampak yang dirasakan oleh para jurnalis dengan identitas non-heteroseksual atau non-biner terhadap kebijakan redaksi maupun manajemen perusahaan media?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini lebih jauh bertujuan untuk mengetahui:

1. Pembingkai media mengenai kelompok atau komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif (“LGBT”). Hal ini terutama untuk mengetahui sejauh mana keberpihakan isi/konten media terhadap kelompok LGBT.
2. Mengetahui kebijakan redaksi dan manajemen redaksi dalam pemberitaan mengenai kelompok atau komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif. Hal ini untuk mengidentifikasi kebijakan redaksi media terkait isu “LGBT”.
3. Mengetahui ada atau tidaknya dampak yang dirasakan oleh para jurnalis dengan identitas non-heteroseksual atau non-biner terhadap kebijakan redaksi maupun manajemen perusahaan media?

1.4. Kerangka Berpikir

A. Seksualitas dan Media

Sebelum memaparkan bagaimana seksualitas menjadi salah satu titik perhatian di media, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai definisi seksualitas. Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam situsnya who.int memberikan sebuah definisi kerja mengenai seksualitas yang disebut sebagai aspek utama sepanjang kehidupan manusia yang meliputi seks, identitas identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman, dan reproduksi. Namun, tidak sesederhana itu karena seksualitas dimanifestasikan dalam berbagai cara dan dipengaruhi oleh berbagai faktor:

“Seksualitas adalah aspek utama sepanjang kehidupan manusia yang meliputi seks, identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman, dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi, keinginan, keyakinan, sikap, nilai, perilaku, praktik, peran, dan hubungan. Sementara seksualitas dapat mencakup semua dimensi ini, tidak semuanya selalu dialami atau diekspresikan. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, sejarah, agama, dan spiritual.”(WHO, 2006)

Dari definisi kerja WHO dapat dikatakan bahwa dalam memahami seksualitas hendaknya mempertimbangkan keberagaman konteks. Dengan meletakkan seksualitas ke dalam sebuah konteks berarti melihat juga keterkaitan, hubungan atau relasinya dengan berbagai elemen lainnya. Tidak hanya melihat keterkaitan antar relasi atau pengalaman yang dimiliki, tetapi juga memaknai dan menafsirkan pengalaman tersebut.

Seksualitas dalam kehidupan masyarakat Indonesia banyak bermain secara paradoksal di wilayah sakral dan profan karena konsep tersebut merupakan konsepsi dan konstruksi sosial dari masyarakat dengan perbedaan yang jelas (Hatib Abdul Kadir, 2007):

Secara garis besar seksualitas akan dipandang secara sakral jika ia dijauhkan dari berbagai pelanggaran, pengacauan, serta pencemaran. Seks akan menjadi sakral juga jika ia tidak dinodai, dimuliakan, serta dihormati. Demi mencapai tindakan tersebut maka seksualitas dibatasi oleh tingkah laku tubuh (baca: disiplin). Adanya ketentuan tempat dalam melakukannya, dan batas waktu, dan dibuat peraturan dalam agama menunjukkan bahwa seksualitas kemudian menjadi sesuatu yang cukup sakral untuk dijalankan. Sebaliknya, jika seksualitas dipandang secara profan maka ia adalah sesuatu yang bersifat biasa saja, tidak

dikuduskan. Dengan kata lain seksualitas profan merupakan tingkah laku yang jauh dari nilai *religius*. Aktivitas seksual yang profan dilakukan tanpa suatu ritus layaknya seksualitas yang sakral.

Pembedaan sakral dan profan pun tampak jelas dalam praktek perilaku seksual masyarakat yang melibatkan berbagai institusi seperti negara dan agama (Hatib Abdul Kadir, 2007):

...secara sederhana masyarakat memandang bahwa seksualitas yang bersifat sakral adalah sesuatu yang masuk dalam tangkup untuk melahirkan (prokreasi) untuk membentuk serta menciptakan berbagai relasi sosial di dalamnya. Antara kedua belah pihak yang melakukan hubungan seksual harus melalui lembaga institusi resmi yang membentuk perkawinan seperti agama dan negara. Wacana dominan yang menguasai seksualitas sakral adalah patriarkis, moralitas dengan sumber nilai utama agama. Sebaliknya, seksualitas yang bersifat di luar perkawinan serta tidak bertujuan untuk melahirkan, berganti-ganti pasangan, tidak ada unsur ketetapan serta kesetiaan hubungan akan dipandang sebelah mata. Sebagai contoh konkrit adalah pelacuran, homoseksualitas, perselingkuhan dan berbagai tindakan seks yang tidak bertujuan untuk melahirkan.

Dari penjelasan mengenai konstruksi sosial mengenai seksualitas tersebut, dapat dikatakan bahwa homoseksual adalah bagian dari seksualitas yang profan. Seksualitas profan menjadi “tabu” untuk dibicarakan dalam ranah publik karena bertentangan dengan aspek sakral yang banyak didukung oleh nilai-nilai moral, terutama agama. Dalam pembicaraan mengenai seksualitas profan, menjadi hal yang lumrah bila mengedepankan aspek nilai sosial yang umum yang diterima oleh masyarakat seperti moral agama.

Seksualitas adalah hal yang menarik minat media, terutama dalam konteks seksualitas profan, dan bukan seksualitas yang “sakral”. Pemberitaan tentang seksualitas di media selalu meletakkan pada kontroversi moralitas terutama bila menyangkut ketubuhan perempuan atau moralitas ketubuhan manusia. Media massa berperan penting dalam memberitakan kelompok-kelompok minoritas, yang secara historis kerap dimarjinalkan (Castañeda and Campbell, 2006).

Isu seksualitas di media massa adalah salah satu komoditi dari isi media yang bersaing dengan komoditi isi berita lain seperti kriminalitas, berita ekonomi atau berita politik. Tak jarang terjadi kombinasi di antara komoditi-komoditi berita tersebut seperti seksualitas dan politik. Contohnya adalah skandal foto Gus Dur dan Aryanti pada 2003. Foto tersebut mengehebohkan masyarakat sebab Gus Dur adalah pemuka agama terkemuka dari Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus sebagai Presiden RI saat itu. Kombinasi lain adalah seksualitas dan kriminalitas (berita perkosaan, aborsi, pembunuhan), seksualitas dan ekonomi (berita tentang lokalisasi pelacuran, atau berita mengenai “pesta seks gay”).

Hal-hal yang dianggap “menyimpang” di ranah seksualitas menurut Bancroft (2009) adalah perilaku yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Norma-norma ini menggabungkan norma atau hukum yang dilembagakan dan norma-norma atau adat istiadat yang diinternalisasi dan dibagikan. Menurut Bancroft, terdapat tiga jenis “penyimpangan” seksual yaitu penyimpangan normal, penyimpangan sub-kultur dan penyimpangan individual yang memiliki kategori berbeda (2009:280):

Firstly, normal deviance, which encompasses behavior such as masturbation, premarital intercourse and oral sex, which, whilst frowned upon and even in some parts of the world still legally proscribed, is nevertheless carried out by large numbers of people. It is in this area that we are seeing the most obvious de-stigmatization. Secondly, subcultural deviance, which covers

the more obvious sexual minorities, such as the homosexual and transgender subcultures. Thirdly, individual deviance, which includes sexual behaviors that are not clearly organized into subcultures or minority groups, exhibitionism being an example.

Realitas sosial dalam konteks seksualitas manusia menunjukkan bahwa orientasi seksual bukan hanya masalah ketertarikan terkait jenis kelamin seseorang. Lebih dari itu, sebuah orientasi seksual menunjukkan adanya dominasi tertentu atas orientasi seksual yang lain. Heteroseksual bukan sekadar masalah orientasi. Misalnya saja peminggiran pada homoseksual karena adanya dominasi heteroseksual. Yep (2003:18) mengemukakan bahwa heteronormativitas hadir di berbagai ruang dan konteks sosial yang merujuk pada institusi, struktur pemahaman dan praktik orientasi yang menyebabkan heteroseksual tidak hanya sesuatu yang masuk akal, tetapi juga istimewa.

Heteronormativitas terdiri dari norma-norma yang menyusun sebuah doktrin mengenai tubuh seseorang yang melembaga dan dibenarkan oleh masyarakat. Hal ini yang membuat heteronormativitas menjadi sesuatu yang 'normal'. Pada pembentukan kenormalan berdasarkan heteronormativitas, kekuasaan atas orientasi seksual yang 'benar' juga mulai terbentuk. Persoalan seksualitas seseorang seringkali dilekatkan dengan identitas seseorang. Oleh karena dominasi mengenai heteroseksual di masyarakat, orientasi seksual di luar itu dianggap tabu, liyan, aneh, dan dianggap menyimpang. Kekuasaan yang berlandaskan heteronormativitas ini dipraktikkan melalui penggunaan bahasa dan praktik komunikasi. Dalam proses komunikasi, terjadi pertukaran simbol-simbol komunikasi yang kemudian meminggirkan posisi kelompok keragaman gender dan seksual yang bukan menjadi bagian dari heteroseksual.

B. Media dan Bingkai Isu Realitas

Keragaman Gender dan Seksual Non-Normatif

Dalam produksi berita, media kerap memberikan bingkai tertentu. Bingkai atau *framing* di sini mengacu pada karakteristik frame dalam konteks produksi dan interpretasi berita, sehingga memberikan konsep makna yang lebih khas. Selain itu, ia akan menggabungkan keterkaitan antara bingkai dalam proses produksi berita dan bingkai di sisi penerima (van Gorp, 2007, p. 61). Dalam hal ini mengacu pada pandangan Hall (1997) yang memandang budaya sebagai basis utama untuk membentuk pengetahuan, makna, dan pemahaman tentang dunia luar (Hall, 1997). Dengan demikian menurut van Gorp, akan dikatakan bahwa repertoar bersama bingkai dalam budaya menyediakan hubungan antara produksi berita dan konsumsi berita. Framing mengacu, di satu sisi, pada cara khas di mana jurnalis membentuk konten berita dalam kerangka acuan yang sudah dikenal dan menurut beberapa struktur makna laten dan, di sisi lain, kepada audiens yang mengadopsi bingkai ini dan melihat dunia dengan cara yang sama seperti yang dilakukan para jurnalis (McQuail, 2005).

Isu mengenai kelompok atau komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif adalah salah satu isu yang dianggap menarik untuk diberitakan, karena dianggap “berbeda” dari masyarakat yang secara umum dianggap “normal”. Pada dasarnya media menyukai untuk memuat hal-hal yang “menyimpang” yang peristiwanya hampir selalu ada dan terjadi di masyarakat, menjadikannya sebagai informasi yang telah diolah dan mendefinisikannya sesuai dengan mode produksi dimana media tersebut berada (Cohen, 2002:9):

Each society possesses a set of ideas about what causes deviation—is it due, say, to sickness or to wilful perversity?—and a set of images of who constitutes the typical deviant—is he an innocent lad being led astray, or is he a psychopathic thug?—and these conceptions shape what is done about the behaviour. In

industrial societies, the body of information from which such ideas are built, is invariably received at second hand. That is, it arrives already processed by the mass media and this means that the information has been subject to alternative definitions of what constitutes 'news' and how it should be gathered and presented. The information is further structured by the various commercial and political constraints in which newspapers, radio and televisión operate.

Pernyataan Cohen tersebut menunjukkan bahwa realitas sosial menjadi realitas media yang dikonstruksi melalui proses produksi dan memiliki definisinya sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibentuk oleh media.

Salah satu pembenar yang kerap digunakan adalah kontribusi media massa dalam membentuk “realitas sosial” yang bercermin dari kenyataan sosial yang ada. Tentu saja yang disebut sebagai “realitas sosial” ini adalah “realitas media” yang dikonstruksikan dalam mode produksi media. Konstruksi realitas ini akan selalu berlandung dalam payung “profesionalitas”. Secara umum jurnalis bekerja dalam standar keprofesionalan melalui proses produksi pada institusi media, yang berpotensi menghadirkan kenyataan yang berbeda tentang realitas (Norris, Kern dan Just, 2003).

Dalam pemberitaan yang menyangkut individu atau kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif, media berperan penting dalam proses mendefinisikan serta memarjinalkan kelompok tersebut (Castañeda and Campbell, 2006: 38). Marjinalisasi yang dilakukan media massa di Indonesia terhadap individu atau kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif ini dinyatakan antara lain melalui dikotomi salah dan benar dalam perspektif agama (terutama Islam) yang digunakan sebagai pembenar. Dalam membingkai berita mengenai kriminalitas yang melibatkan komunitas yang disebut oleh media sebagai “LGBT”, media

menonjolkan moralitas dan agama yang dianggap “benar” (Castañeda dan Campbell, 2006, Luviana, 2016, Listiorini, 2020)

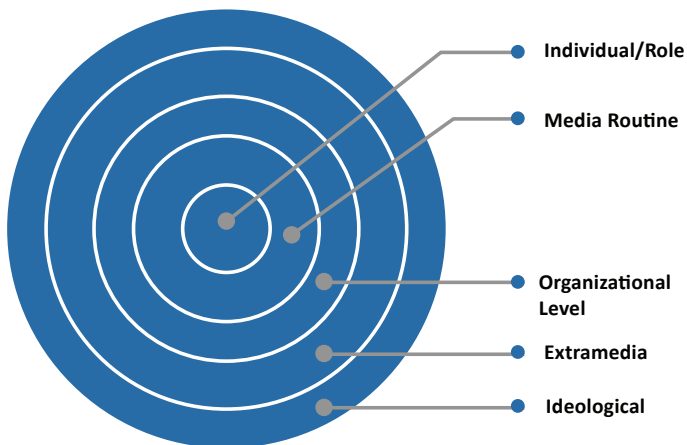
C. Hirarki Institusi Media

Menurut Pamela Shoemaker dan Stephen Reese (1996), berita adalah konstruksi sebuah realitas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor ini meliputi:

- a. *Individual Level*: Level ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Level ini melihat bagaimana aspek personal pengelola media memengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan di khalayak. Latar belakang individu seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, agama mempengaruhi apa yang ditampilkan media. Wartawan sering disebut ujung tombak pemberitaan karena dirinya yang menentukan angle pemberitaan. Nilai yang dipegang, latar belakang personal, latar belakang pendidikan, pandangan politik, serta posisi seseorang berpengaruh dalam penentuan angle pemberitaan.
- b. *Media Routine Level*: Level ini berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita serta mekanisme bagaimana berita itu dibentuk. Proses penentuan berita berlangsung sejak rapat redaksi (penentuan berita yang akan diliput), penugasan, penulisan berita, editing, hingga berita layak muat. Setiap media memiliki ukuran sendiri-sendiri dengan sebuah berita atau layak berita. Oleh karena itu, rutinitas media selalu mempertimbangkan apa yang bisa diterima konsumen, kemampuan media untuk memproduksi, dan bahan baku apa yang tersedia. Nilai berita berperan penting dalam level ini.
- c. *Organizational Level*: Level ini berhubungan dengan struktur organisasi yang memengaruhi pemberitaan. Organisasi

media tidak hanya terdiri dari pengelola media dan wartawan semata, tetapi juga terkait dengan pihak lainnya seperti bagian redaksi, sirkulasi, bagian umum, dan lainnya. Masing-masing pihak ini memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang terkadang akan memengaruhi pemberitaan. Seringkali pihak-pihak ini mengalami konflik, di satu sisi pihak redaksi ingin menampilkan berita yang profesional, di sisi lain, pihak iklan menuntut berita yang disukai pasar.

- d. *Extramedia Level*: Level ini berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Biasanya tersirat dalam kebijakan redaksi, visi-misi, kepentingan ekonomi politik, pedoman jurnalistik, dan lainnya.
- e. *Ideological Level*: Level ini berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Biasanya tersirat dalam kebijakan redaksi, visi-misi, kepentingan ekonomi politik, pedoman jurnalistik, dan lainnya.



Hierarki Media Shoemaker and
Reese dalam McQuail (1992)

Pasca reformasi 1998, media daring mulai bermunculan di Indonesia. Ini ditandai dengan kemunculan Detik.com. Tapsell, R. (2017) mengatakan adanya perubahan konsep penyampaian berita pasca kemunculan media daring. Jurnalisme yang seharusnya memuat unsur 5W + 1H, tapi media daring hanya memuat siapa, kapan, dan di mana. Akibat dari kemunculan media daring yakni perubahan budaya reportase. Media memperebutkan iklan daring dan berorientasi pada klik. Akibatnya, produksi berita berubah menjadi sekadar berita yang menarik bagi pembaca dan didaur ulang sebanyak-banyaknya.

d. Teori kritis media

Teori kritis media dalam hal ini adalah adalah teori representasi media dari Stuart Hall yang dilengkapi dengan teori kritis mengenai kekuasaan yang berkelindan dengan seksualitas seperti dari Michel Foucault. Teori representasi media mengacu pada peran penting media dalam membentuk pengetahuan manusia melalui isi media apa pun bentuknya. Setiap orang yang mengakses media akan mendapatkan setidaknya dua hal, pengetahuan yang sama sekali baru yang belum pernah diketahuinya, ataukah mendapat penguatan dari hal yang telah diketahuinya atau diyakininya. Media, dengan kekuatan produksi yang dimilikinya (jurnalis, reporter, editor, dan sebagainya) menjadi semacam agensi yang mampu memproduksi “sebuah pengetahuan”.

Representasi tentang berita homoseksual di media massa akan mengacu pada realitas masyarakat dan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat tersebut. Bila nilai-nilai masyarakat sebagian besar menganggap bahwa homoseksualitas itu adalah hal yang salah, maka media massa pun tidak akan jauh mengonstruksinya seperti demikian. Kriminalisasi kelompok homoseksualitas tidak hanya terjadi di media massa di Indonesia, tetapi telah dimulai di Amerika, pada 1940-an, ketika Newsweek dalam artikelnya yang berjudul “Queer People” menulis bahwa “...seorang homoseksual,

seorang eksibisionis, bahkan seorang yang sadistik, kerap disebut ‘queer’ yang tidak melukai orang lain, tetapi dirinya sendiri”. Lebih jauh jurnalis tersebut mengatakan bahwa homoseksual itu berbahaya bagi masyarakat (Castañeda and Campbell, 2006:43). Hal ini juga terjadi di Indonesia terutama pada 2016 ketika terjadi media backlash yang berisi ujaran kebencian dari pejabat negara, DPR dan komisi-komisi negara terhadap kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif (Davies, 2016, Suryakusuma, 2016, Listiorini, 2020b).

Teori kritis media menempatkan kekuasaan dan ideologi dalam kajiannya. Dalam konteks media, kekuasaan juga berhubungan dengan pemaknaan. Seperti dijelaskan Fiske terdapat dua bentuk kekuasaan sosial (Fiske dalam Storey, 1994:502), pertama adalah kekuasaan semiotik, yaitu kekuasaan untuk mengonstruksi makna, kesenangan dan identitas sosial; kedua adalah kekuasaan sosial yaitu kekuasaan untuk mengonstruksi sistem sosial ekonomi dan keduanya, saling berhubungan meskipun secara relatif berdiri sendiri. Kekuasaan yang lebih banyak bekerja pada budaya populer adalah kekuasaan semiotik, dengan mengartikulasikan pertentangan antara persamaan dan perbedaan, atau antara konsensus dan konflik. Kekuatan dari kekuasaan yang mengalir dari ‘atas ke bawah’ senantiasa memproduksi seperangkat makna dan identitas sosial yang berfungsi melayani status quo.

Dalam pembicaraan mengenai seksualitas terdapat dua konsep penting yang tidak dapat diabaikan yaitu pertama, kekuasaan, terutama dikaitkan pada tubuh dan menyebabkan munculnya relasi kuasa dari pihak-pihak otoritas tertentu atas pihak lain; dan kedua adalah ideologi dari kekuasaan. Hubungan antara seksualitas dan pengetahuan menurut Foucault selalu diperantarai oleh praktik-praktik kekuasaan. Sejak abad 18, menurut Foucault terdapat empat strategi yang mengembangkan mekanisme khas dari relasi kuasa pengetahuan (Haryatmoko, 2016:29):

...pertama adalah histerisasi tubuh perempuan, tubuh patologis, jenuh akan seksualitas yang harus tunduk pada

wacana kedokteran dan dihubungkan dengan tubuh sosial, artinya tunduk pada norma; kedua, pedagogisasi seks anak melalui perjuangan melawan masturbasi merupakan cermin mekanisme pengawasan anak; ketiga, sosialisasi perilaku prokreasi yang memberikan kepada pasangan tanggung jawab sosial dan kedokteran (kontrol kelahiran) yang menafikan semua bentuk seksualitas di luar fungsi prokreasi; keempat psikiatrisasi kenikmatan yang menyimpang, dengan tujuan untuk mendiagnosa penyimpangan-penyimpangan dan memungkinkan ortopedi seks yang baru.

Kekuasaan menurut Foucault dengan demikian bukanlah merupakan hubungan subjektif yang searah, tetapi menyebar di mana-mana dalam hubungan-hubungan masyarakat (Haryatmoko, 2016:15):

...kekuasaan bukan hubungan obyektif searah: kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada yang lain. Kekuasaan merupakan strategi kompleks dalam suatu masyarakat dengan perlengkapan, manuver, teknik dan mekanisme tertentu. "Secara umum harus diakui bahwa kekuasaan lebih beroperasi daripada dimiliki. Kekuasaan tidak merupakan hak istimewa yang didapat atau dipertahankan oleh kelas dominan, tetapi akibat dari keseluruhan posisi strategisnya. Akibat yang menunjukkan posisi mereka yang didominasi... Dengan demikian kekuasaan tidak bisa dilokalisasi pada tempat tertentu: menjadi milik seseorang, dalam suatu institusi tertentu atau melekat pada aparat negara.

Kekuasaan bagi Foucault lebih digambarkan dalam tatanan disiplin yang dihubungkan dalam sejumlah jaringan (Haryatmoko, 2016:15-16):

Disiplin tidak dapat diidentikkan dengan institusi atau aparat; ia adalah suatu tipe kekuasaan, suatu modalitas untuk menjalankan kekuasaan, yang terdiri dari keseluruhan sarana, teknik, prosedur, tingkat-tingkat penerapan, sasaran-sasaran; ia merupakan fisik atau anatomi kekuasaan, suatu teknologi. Dan ia dapat dijamin oleh institusi-institusi yang terspesialisasi (penjara atau rumah koreksi abad 19) atau oleh institusi-institusi dengan tujuan tertentu (sekolah, rumah sakit).

Dua kata kunci untuk memahami teknik kekuasaan menurut Foucault adalah disiplin dan norma. Disiplin dianalisis sebagai satu dari teknologi kekuasaan masyarakat modern, sebagai “kekuasaan atas norma”. Sedangkan, norma adalah aturan yang menyatakan nilai bersama yang dihasilkan melalui mekanisme acuan diri dan kelompok. Bila norma memungkinkan untuk perbandingan dan individualisasi, maka sasaran disiplin adalah tubuh (Haryatmoko, 2016:20-21).

Sementara pada teori ideologi (Payne, ed., 1996:252-253) menekankan bahwa seluruh komunikasi dan seluruh pemaknaannya memiliki dimensi sosial-politik dan tidak dapat dipahami di luar konteks sosial tersebut. Ideologi akan selalu bekerja melayani status quo pada kelas dengan kekuasaan yang mendominasi tidak hanya pada barang-barang tetapi juga ide-ide dan pemaknaan (Fiske, 2011:163).

1.5. Metodologi Penelitian

A. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma critical constructivist, yaitu paradigma yang terletak antara paradigma konstruktivis dengan paradigma kritis, yaitu apa yang disebut sebagai critical constructionism atau konstruksionis kritis (Dedy N. Hidayat, 2008:86):

Paradigma ini berbeda dengan paradigma constructionism arus utama (yang cenderung bersifat relativis) dari segi dipergunakannya kerangka teori yang normative yang memungkinkan peneliti membuat value judgement, seperti halnya dalam paradigma teori-teori kritis. Karena itu critical constructionist menggunakan goodness atau quality criteria yang paralel dengan yang dipergunakan paradigma teori-teori kritis. Antara lain catalytic authenticity yang paralel dengan empowerment dalam paradigma teori-teori kritis, yakni kriteria sejauh mana studi yang dilakukan bisa memberdayakan subjek penelitian. Kemudian, ontological authenticity yang paralel dengan enlightenment, merujuk pada kriteria apakah hasil studi mampu memberi penyadaran atau pencerahan bagi subjek penelitian.

Paradigma critical constructionism menggabungkan antara pendekatan konstruksionis dengan pemikiran kritis. Pendekatan konstruksionis sebagaimana halnya pendekatan queer, studi budaya, dan peneliti feminis meneliti stereotip, prasangka, dan ketidakadilan yang terkait dengan bangsa, ras, etnis, dan gender dan berusaha membongkar makna-makna yang tersembunyi (Crotty, 1998, pp. 44-45, 58). Sementara pendekatan kritis mengkaji kondisi material dan sistem ideologi yang mereproduksi struktur kelas dan ekonomi. Secara singkat, konstruksionis kritis menekankan bahwa tidak ada hal yang netral atau bebas nilai dalam penelitian kualitatif terhadap fenomena sosial (Denzin dan Lincoln, 2017, p. 548).

B. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, tiga jenis riset yang dilakukan mengacu pada penggunaan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai materi empirik mulai dari studi kasus dan pengalaman personal seseorang hingga teks kultural dan produksi teks yang bermakna dalam kehidupan individu (Denzin dan Lincoln, 2017, p. 43). Hal ini menurut Denzin dan Lincoln menjadikan dalam penelitian kualitatif sendiri sebagai seperangkat tindakan interpretatif, tidak ada praktik metodologi yang tunggal. Dengan demikian peneliti kualitatif juga memiliki “keistimewaan” melakukan beberapa tahapan metode yang melibatkan metode kualitatif teks seperti semiotik dan diskursus dan juga metode kuantitatif seperti statistik, tabel, grafik dan angka (h. 46), termasuk di dalamnya adalah metode *framing*.

C. Jenis Data

Data primer dalam penelitian ini adalah pertama, teks media dari 10 media *online* yang diambil dari bulan Maret 2020 hingga Februari 2021. Kesepuluh media *online* tersebut adalah Okezone.com, Tribunnews.com, Kompas.com, Detik.com, Liputan6.com, Merdeka.com, Grid.id, Suara.com, Kumparan.com, dan Pikiran-rakyat.com dengan persebaran sebagai berikut:

Data primer kedua adalah transkrip wawancara yang dilakukan terhadap lima pekerja media yaitu jurnalis yang beridentitas non-hetero dan non-biner, baik yang pernah menulis berita mengenai komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif maupun yang tidak. Selain itu, adalah transkrip wawancara terhadap pekerja media di tingkat redaksi atau manajemen redaksi.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai laporan penelitian, laporan monitoring, berita online dan berita dari media televisi terkait berita “LGBT” di luar teks media yang dipilih sebagai buku teks dan jurnal ilmiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik pengumpulan data dalam riset ini. Terkait dengan data teks, maka pengumpulan data dilakukan dengan mendata 10 berita *online* selama kurun waktu Maret 2020 hingga Februari 2021 dengan kata kunci berupa: “LGBT”, lesbian, gay, transgender, queer, waria, transpuan, transpria, transman, trans laki-laki, homo, homoseksual, sesama jenis, bencong, LSL (laki-laki sama laki-laki), homofobik, transfobik, banci, lesbi, bendera pelangi, pelangi, pesta seks sejenis, orientasi seksual, pacar sejenis, “LGBT”, operasi kelamin, panseksual, pasangan sejenis, pesta gay, hubungan intim sejenis, ladyboy.

Kemudian, peneliti secara spesifik mendalami serta mengekstraksi tiga isu utama terkait kriminalitas, yaitu kasus pembakaran transpuan bernama Mira, kasus prank terhadap transpuan yang dilakukan oleh Ferdian Paleka dan kasus persekusi gay di seputar apartemen di Jakarta Selatan yang disebut oleh media sebagai kasus “pesta gay masa pandemi”. Untuk mendapatkan berita tersebut, peneliti melakukan pencarian dengan mesin pencari *Google* dengan beberapa kata kunci seperti “Mira transgender”, “transgender dibakar”, “Mira transpuan dibakar”, “Ferdian Paleka” “Prank waria Bandung” dan “pesta gay Kuningan”.

Untuk data wawancara baik terhadap jurnalis dengan identitas keragaman gender dan seksual non-normatif, maupun pada individu yang mewakili redaksi atau manajemen media, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*). Teknik ini adalah metode koleksi data one-to one atau one to two yang melibatkan pewawancara dengan orang yang diwawancarai, mendiskusikan sebuah topik khusus secara mendalam. *In-depth interview* juga bisa dideskripsikan sebagai percakapan dengan tujuan. Peneliti bertujuan menggali wawasan atau pikiran mendalam dengan menggunakan pedoman pertanyaan semi terstruktur (Hennink dkk, 2011).

Lebih lanjut terkait dengan etik wawancara, mengingat penelitian ini adalah isu yang cukup sensitif, maka pihak peneliti mengikuti untuk memenuhi persyaratan prinsip-prinsip etik seperti (Hennink dkk, 2011, p.63):

- a. *Informed consent*, atau penjelasan persetujuan. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan lembar persetujuan kepada semua informan yang ditandatangani dan dikirimkan kembali pada pihak peneliti. Dalam hal nama informan terutama informan jurnalis dengan identitas keragaman gender dan seksualitas non-normatif, peneliti menyamarkannya dengan memberi nama informan 1, informan 2, informan 3, informan 4 dan informan 5.
- b. *Self-determination*, menentukan kehendak pribadi. Individu yang menjadi narsum memiliki hak untuk menentukan partisipasi mereka dalam penelitian. Termasuk hak untuk menolak berpartisipasi tanpa konsekuensi negatif. Kesensitifan isu “LGBT” di media ini membuat beberapa informan jurnalis enggan atau menolak untuk berpartisipasi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menolak secara terang-terangan, dan ada yang secara halus, antara lain dengan menghindar atau sulit dihubungi.
- c. *Minimization of harm*, atau meminimalkan bahaya. Peneliti tidak seharusnya menempatkan para narasumber dalam sebuah resiko atau bahaya tertentu saat mereka berpartisipasi dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti menjaga privasi dan kerahasiaan narsum saat diwawancarai dan setelahnya. Hal ini dilakukan peneliti selain dengan menyamarkan nama, juga tidak menyebutkan identitas personal dari para informan seperti suku, agama, maupun nama media di mana mereka bekerja.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis kritis yang melihat pada aspek-aspek kekuasaan, dominasi-subordinasi yang terjadi baik di tingkat teks maupun di tingkat pekerja media, baik pekerja media sebagai jurnalis, maupun yang mewakili institusi media di tingkat manajerial seperti redaktur atau pemimpin redaksi.

F. Konsep Framing Entman

Framing media atau pembingkai media pada dasarnya adalah cara lain untuk mempengaruhi suatu fenomena atau masalah. Pembingkai memungkinkan semua orang memiliki pemahaman mereka sendiri terhadap informasi, berita, dan bentuk penafsiran lainnya. Namun, di sisi lain pembingkai media juga berhasil meyakinkan khalayak atas apa yang harus dipercaya dan apa yang tidak percaya, sehingga seolah mampu menggiring orang untuk memercayai sebuah berita dari sudut pandang media tersebut. Penggunaan teori framing adalah untuk mengungkapkan adakah pesan tertentu dalam sebuah artikel. Untuk dapat memahami ke mana arah dalam artikel tertentu tersebut, peneliti juga harus memahami dan mencari tahu latar belakang medianya, untuk membantu memahami situasi sepenuhnya. Proses pembangunan opini publik melalui media framing sangatlah mungkin dilakukan.

Penelitian ini menggunakan konsep framing Robert Entman (1993). Entman melihat bahwa dimensi utama dalam melakukan framing adalah adanya seleksi (*selection*) atau pemilihan isu dan saliansi (*saliency*) atau penonjolan isu yang memberi tekanan tertentu yang menunjukkan adanya suatu masalah, interpretasi, evaluasi moral atau rekomendasi dan perlakuan tertentu terhadap sebuah isu (Entman, 1993:52). Secara sederhana menurut Entman, framing menyoroti beberapa informasi tentang item yang menjadi subjek komunikasi, sehingga mengangkatnya dalam arti-penting. (Entman, 1993, hal. 53). Eriyanto (2002:187) memperjelas masalah mengenai seleksi dan penonjolan ini sebagai berikut:

Tabel 1. Konsep Framing Entman

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam, muncul aspek-aspek yang diseleksi atau ditampilkan. Proses seleksi menyebabkan sebagian aspek dimunculkan dan selebihnya dihilangkan. Wartawan akan memilih aspek tertentu dari sebuah isu.
Penonjolan Aspek Tertentu dari Isu	Aspek ini berhubungan dengan bagaimana wartawan menuliskan fakta. Ketika sebuah aspek tertentu telah dipilih, maka wartawan dan redaksi akan menentukan bagaimana menuliskan aspek tersebut. Hal-hal yang memengaruhi nuansa penulisan adalah kata-kata yang dipilih, jenis kalimat yang digunakan, pemilihan gambar atau citra tertentu.

Penelitian *framing* ini juga dapat menjelaskan beberapa fenomena sosial yang muncul terutama dari konsep yang dimiliki oleh jurnalis di luar konsep

Tabel 2. Konsep Framing Entman

Define problems atau mendefinisikan masalah	Bagaimana masalah tersebut dilihat dan dijelaskan. Biasanya ada penjelasan dilihat dari sudut pandang moralitas umum.
Diagnose cause atau mencari dan menganalisis penyebab	Melihat penyebab masalah; siapa yang dianggap menyebabkan terjadinya masalah tersebut.
Make moral judgements atau memberi penilaian moral	Nilai moral tertentu akan ditawarkan untuk menjelaskan atau melegitimasi masalah.
Suggest remedies atau menawarkan penyelesaian masalah dan memperkirakan efek	Jenis penyelesaian yang ditawarkan untuk menutup masalah atau isu yang diberitakan. Kemungkinan bahwa isu atau masalah akan berdampak luas atau tidak terhadap masyarakat.

mengenai seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari isu. Penelitian yang dilakukan Lestari Nurhajati dan Xenia Angelica Wijayanto dalam *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 4 No. 1 2018 (*Bawaslu*) menuliskan, dalam pendekatan framing selama ini, tampak jelas bahwa media massa di Indonesia, khususnya pada jurnalis dan jajaran redaksinya, dalam mengonstruksi suatu realitas justru cenderung menyertakan pengalaman serta pengetahuannya yang sudah mengkristal menjadi *schemata interpretation*. Skemata ini dikatakan sebagai templat kognitif atau struktur data yang mengatur informasi dalam pikiran, didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang terorganisir, berkembang secara bertahap, menjadi lebih kompleks, dan terkait dengan

pengalaman pribadi dan perasaan (van Gorp, 2007). Hal ini tentu saja akan memengaruhi jurnalis atau anggota redaksi dalam menentukan kebijakan mengenai pemberitaan “LGBT”.

G. Keterbatasan penelitian

Keterbatasan pertama adalah penelitian ini dilakukan dalam situasi pandemi yang membuat beberapa pertemuan untuk wawancara tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Wawancara hanya bisa dilakukan dengan melalui zoom atau telepon yang bergantung dengan kualitas jaringan internet. Hal ini membatasi peneliti untuk melihat reaksi spontan atau memperkirakan nuansa perasaan seluruh informan selama proses wawancara. Kondisi ini juga menjadikan peneliti tidak dapat bertanya secara leluasa. Keterbatasan kedua adalah, topik penelitian yang sangat sensitif, sehingga terjadi semacam keengganan atau penolakan dari informan untuk membahas masalah pemberitaan “LGBT”. Penolakan terbesar muncul dari informan yang mewakili institusi media pada posisi redaktur hingga pemimpin redaksi. Networking jurnalis pun sepertinya tidak mampu mengatasi masalah ini. Keterbatasan ketiga adalah, maraknya diskriminasi dan persekusi yang dialami oleh komunitas ‘LGBT’ yang memunculkan perasaan tidak aman yang dialami jurnalis. Perasaan tidak aman ini mempengaruhi proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti sempat mengalami penolakan.

BAB 2

Bingkai Media Daring pada Isu “LGBT”

Penelitian bingkai media menganalisis sepuluh media daring dengan pembaca terbanyak versi Alexa.com 1 Juli 2021 yakni Okezone.com, Tribunnews.com, Kompas.com, Detik.com, Liputan6.com, Merdeka.com, Grid.id, Suara.com, Kumparan.com, Pikiran-rakyat.com. Kami melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *framing* bisa menunjukkan bahwa media massa di Indonesia cenderung menyertakan pengalaman serta pengetahuannya yang sudah mengkristal menjadi *skemata interpretation* dalam mengonstruksi suatu realitas.

Untuk mempersempit data yang dianalisis, peneliti memilih 3 berita yang dinilai mewakili peristiwa yang terkait dengan individu atau komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif (“LGBT”) karena mendapat perhatian cukup besar dari publik, yakni:

1. Pemberitaan tentang pembakaran Mira, transpuan di Cilincing yang dituduh mencuri.
2. Pemberitaan tentang prank yang dilakukan oleh Youtuber Ferdian Paleka terhadap transpuan di Bandung.
3. Pemberitaan tentang ‘pesta’ di apartemen Kuningan yang diselenggarakan oleh komunitas ‘gay’.

Berikut ringkasan jumlah pemberitaan terkait individu atau komunitas / kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif (“LGBT”) di media daring sesuai peringkat Alexa selama kurun waktu Maret 2020-Februari 2021.

Tabel 3. Jumlah pemberitaan di media daring

Media	Pemberitaan selama Maret 2020-Februari 2021	Pemberitaan transpuan yang dibakar di Cilincing	Pemberitaan Ferdian Paleka yang melakukan prank terhadap transpuan	Pemberitaan pesta di apartemen Kuningan
Okezone.com	201	-	50	14
Tribunnews.com	307	16	20	43
Kompas.com	145	4	8	13
Detik.com	284	9	60	43
Liputan6.com	114	1	13	21
Merdeka.com	71	-	2	2
Grid.id	119	2	19	3
Suara.com	173	2	1	16
Kumparan.com	316	4	27	27
Pikiran-rakyat.com	84	-	17	14
Total	1.814	38	217	196

Sumber: data diolah dari berbagai media daring

Dari tabel di atas, total jumlah berita yang tayang di 10 media selama Maret 2020-Februari 2021 yang terkait dengan individu atau komunitas/kelompok “LGBT” mencapai 1.814 berita. Penelitian dikerucutkan pada tiga peristiwa, yakni pemberitaan Mira, transpuan yang dibakar di Cilincing sebanyak 38 berita, pemberitaan Ferdian Paleka yang melakukan prank terhadap transpuan sebanyak 217 berita, dan pemberitaan pesta di apartemen Kuningan sebanyak 196 berita.

Selanjutnya, temuan terkait framing media terkhusus dalam 3 peristiwa yang telah ditentukan dapat dilihat dalam tabel beserta keterangan analisis berikut.

2.1. Pemberitaan tentang pembakaran Mira, transpuan di Cilincing yang dituduh mencuri

Tabel 4. Pemberitaan tentang pembakaran Mira, transpuan di Cilincing yang dituduh mencuri

Media	Tanggal publikasi	Judul berita	Problem identification (peristiwa dilihat sebagai apa)	Causal interpretation (siapa penyebab masalah)	Moral evaluation (penilaian atas penyebab masalah)	Treatment recommendation (rekomendasi atas penanggulang masalah)
Detik.com https://news.detik.com/berita/d-4967891/polisi-tangkap-pembakar-hidup-hidup-transgender-di-jakarta-utara?tag_from=wpm_nhl_6	7 April 2020	Polisi Tangkap Pelaku Pembakar Hidup-Hidup Transgender di Jakarta Utara	Seorang transgender berinisial M tewas setelah dibakar hidup-hidup di Cilincing, Jakarta Utara	Pelaku pembakar M yang ditangkap oleh polisi	Media menggambarkan polisi yang berhasil menangkap pelaku pembakar M. Para pelaku menuduh M mencuri dompet dan ponsel	Tidak ada rekomendasi penanggulang masalah
Grid.id https://www.grid.id/read/042097434/jadi-korban-main-hakim-sendiri-transgender-pekerja-seks-di-cilincing-tewas-dibakar-hidup-hidup-oleh-6-sopir-truk-hingga-tewas	9 April 2020	Jadi Korban Main Hakim Sendiri, Transgender Pekerja Seks di Cilincing Tewas Dibakar Hidup-hidup oleh 6 Sopir Truk hingga Tewas!	Seorang transgender bernama Mira (43) dikabarkan tewas dibakar setelah menjadi korban amukan enam sopir truk trailer, sebelum dibakar sempat dipukuli.	Mira dituduh mengambil handphone dan dompet salah seorang tersangka.	Media menggambarkan bahwa para tersangka melakukan tindakan main hakim sendiri, dengan mengutip pernyataan kepolisian.	Tidak ada sikap khusus maupun rekomendasi dari pihak media.

Kompas.com https://mega.politan.kompas.com/read/2020/04/06/20331781/dituduh-curi-domp-et-dan-hp-seorang-transgender-tewas-dibakar-di-cilincing?page=2	6 April 2020	Dituduh Curi Domp-et dan HP, Seorang Transgender Tewas Dibakar di Cilincing	Mira, seorang transgender di Cilincing tewas setelah dianiaya dan dibakar segerombolan preman yang menuduhnya mencuri	Segerombolan preman	Tindakan aniaya para tersangka terhadap Mira tidak bisa dibenarkan. Mira disiksa dan dipaksa mengaku atas perbuatan ia rasa tidak dilakukannya	Tidak ada
Kumparan.com https://kumparan.com/-kumparan-news/dit-duduh-men-curi-transgender-di-cilincing-dibakar-hidup-hidup-1tA6ubtH66	7 April 2020	Dituduh Mencuri, Transgender di Cilincing Dibakar Hidup-Hidup	Seorang transgender bernama Mira di Cilincing, Jakarta Utara meninggal dunia setelah mengalami luka bakar serius di tubuhnya karena dibakar oleh sekelompok orang yang menuduhnya mencuri	5 orang preman yang menuduh Mira mengambil dompet dan HP	Media menggambarkan para tersangka yang kesal kepada Mira lalu menyiramnya dengan bensin ke Mira dengan menjadikan Kanit Reskrim Cilincing sebagai narasumber untuk mengonfirmasi kebenaran dari peristiwa ini.	Tidak ada rekomendasi penanggulangan masalah
Liputan6.com https://m.liputan6.com/news/read/4222528/nasib-waria-di-cilincing-berawal-minta-rokok-berakhir-dibakar-3-pria	8 April 2020	Nasib Waria di Cilincing, Berawal Minta Rokok Berakhir Dibakar 3 Pria	Transgender bernama Mira dibakar oleh tiga pria. Mira dituduh mencuri barang milik KM, seorang supir yang kehilangan tas berisi dompet, SIM, dan TAB merek Samsung	Pelaku yang membakar M dan mengeroyok korban dengan memukuli wajah, kepala, serta badan korban dengan tangan kosong.,	Media menggambarkan para tersangka yang menuduh dan melakukan perbuatan main hakim sendiri kepada Mira sampai tewas.	Tidak ada rekomendasi penanggulangan masalah

Merdeka.com	Tidak ada pemberitaan tentang Mira
Okezonene.com	Tidak ada pemberitaan tentang Mira
Pikiran-rakyat.com	Tidak ada pemberitaan tentang Mira

Suara.com https://www.suara.com/news/2020/04/10/155036/waria-dibakar-tim-advokasi-mira-minta-pemerintah-lebih-peduli-nasib-lgbtqi?page=all	10 April 2020	Waria Dibakar, Tim Advokasi Mira Minta Pemerintah Lebih Peduli Nasib LGBTIQ	Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Kasus Mira mendesak pemerintah menghentikan narasi propaganda kebencian dan kriminalisasi terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, transpuan, interseks dan queer atau LGBTIQ.	Adanya kasus penganiayaan hingga pembakaran hidup-hidup seperti yang dialami transpuan bernama Mira (43) di Cilincing, Jakarta Utara	Tim Advokasi Kasus Mira juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk turut bersama menghentikan kekerasan, stigma dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT atas dasar keragaman dan kesetaraan sesama manusia	Media memberikan rekomendasi bahwa atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 170 KUHP Ayat 2 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun
Tribun-news.com https://www.tribunnews.com/metro-politan/2020/04/08/transgender-ini-dibakar-hidup-hidup-sebelumnya-ngaku-telah-mencuri-ponsel-lalu-menjualnya?page=2	8 April 2020	Transgender ini Dibakar Hidup-Hidup, Sebelumnya Ngaku Telah Mencuri Ponsel dan Menjualnya	Peristiwa pembakaran Mira terjadi karena ia telah mencuri ponsel dan menjualnya	Mira	Mira seolah wajar dibakar hidup-hidup karena disebut mengaku telah mencuri ponsel milik sopir truk. Padahal, Mira mengaku telah mencuri karena dihajar habis-habisan oleh para tersangka. Ada kemungkinan ia mengaku hanya agar penyiksaan berhenti	Tidak ada

Peneliti Konde.co tidak menemukan pemberitaan Mira, transpuan yang dibakar di Cilincing, Jakarta Utara di media *online* Okezone.com, Merdeka.com, dan Pikiran-rakyat.com. Menurut peneliti, tidak adanya slot berita untuk peristiwa yang saat itu justru memancing respons luas dari khalayak terutama kelompok advokasi isu komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif, menunjukkan bahwa ketiga media belum menganggap bahwa peristiwa pembakaran Mira adalah sebuah isu penting yang harus diangkat.

Dari sepuluh media yang dianalisis, peneliti menemukan bahwa mayoritas media cenderung melihat peristiwa (*problem identification*) tersebut semata sebagai kabar perkara kriminal di mana seorang transpuan bernama Mira tewas dibakar hidup-hidup setelah sebelumnya dipukuli karena diduga mencuri. Ini tampak dari beberapa judul dan *headline* yang digunakan media, seperti Tribunnews.com dalam berita yang tayang pada 8 April 2020 berjudul “Transgender Ini Dibakar Hidup-Hidup, Sebelumnya Ngaku Telah Mencuri Ponsel lalu Menjualnya”. Namun, tak seperti media kebanyakan, peneliti menemukan perspektif lain di media Suara.com. Redaksi Suara.com mengangkat peristiwa pembakaran Mira dengan menggunakan judul bernuansa advokasi yaitu “Waria Dibakar, Tim Advokasi Mira Minta Pemerintah Lebih Peduli Nasib LGBTIQ”. Berita ini tayang pada 10 April 2020. Dalam *headline*-nya, Suara.com langsung menyampaikan desakan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi Kasus Mira kepada pemerintah agar menghentikan narasi propaganda yang mengundang kebencian dan kriminalisasi terhadap “LGBT”.

Dalam *causal interpretation*, media memosisikan pelaku pembakaran Mira sebagai penyebab masalah dalam kasus ini. Hampir seluruh media sepakat menempatkan perbuatan para pelaku sebagai perbuatan tidak manusiawi. Namun, tidak begitu dengan Tribunnews.com yang lebih terkesan menyalahkan Mira yang mencuri dompet dan hp pelaku dan menyebabkan para pelaku terpicu untuk membakarnya hidup-hidup. Pun Kumparan.com yang meski dalam pemberitaan yang dianalisis membingkai 5 orang

preman sebagai penyebab masalah, tetapi dalam pemberitaan lain berjudul “Polisi: Pembakar Transgender Mira Tak Sengaja Nyalakan Korek Api”, media melakukan wawancara kepada polisi dengan menggunakan sudut pandang keterangan dari tersangka.

Peneliti menemukan ada perbedaan diksi yang digunakan media untuk menggambarkan pelaku dalam kasus Mira. Kompas.com dan Kumparan.com menggunakan diksi yang terkesan menjustifikasi perilaku “preman”, Detik.com menggunakan diksi “pelaku pembakar hidup-hidup transgender”, Grid.id menggunakan diksi berkenaan dengan profesi pelaku “sopir truk trailer” dan juga “tersangka”. Sementara Kumparan.com menggunakan diksi “sekelompok orang” dan “preman”. Liputan6.com menggunakan kata “pengeroyok dan pembakar seorang waria”. Seperti Grid.id, Suara.com menggunakan diksi berkenaan dengan profesi pelaku “petugas keamanan” dan “tersangka”. Tribunnews.com menggunakan diksi “tersangka”, “sopir truk”, “pihak yang menjaga keamanan”.

Selanjutnya terkait *moral evaluation* (penilaian atas penyebab masalah), mayoritas media yang diteliti menunjukkan bahwa para tersangka yang menuduh, menganiaya, dan membakar Mira sampai tewas telah melakukan tindakan main hakim sendiri dan itu tidak bisa dibenarkan. Selain itu, Suara.com juga secara eksplisit, lewat keterangan tim advokasi kasus Mira, menyampaikan ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk turut bersama menghentikan kekerasan, stigma, dan diskriminasi terhadap kelompok “LGBT” atas dasar keragaman dan kesetaraan sesama manusia.

Namun, hal berbeda ditemukan di Tribunnews.com. Jika melihat judul, headline, hingga isi paragraf per paragraf, redaksi Tribunnews.com seolah menggiring pembaca untuk memaklumi tragedi yang dialami Mira karena apa yang telah dilakukannya, yakni mencuri. Tindakannya tersebut dianggap menjadi faktor pemicu utama tindakan kekerasan yang dilakukan para tersangka. Mira, yang dikeroyok dan dipukuli hingga babak belur, disebut mengaku telah mencuri ponsel milik rekan para tersangka.

Peneliti melihat dalam hal ini Tribunnews.com tidak berhati-hati menggambarkan duduk perkara yang masih harus diverifikasi secara detail kebenarannya. Sebab, terdapat kemungkinan Mira akhirnya terpaksa mengaku telah mencuri karena tak tahan dihajar habis-habisan oleh para tersangka. Masih ada kemungkinan ia mengaku agar penyiksaan terhadapnya berhenti.

Di atas itu semua, mestinya media memahami bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat menjustifikasi tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Tindakan para tersangka yang menuduh, menganiaya dan kemudian membakar hidup-hidup Mira tanpa melaporkannya ke pihak berwenang tidak bisa dibenarkan.

Dalam hal rekomendasi atas penanggulangan masalah (*treatment recommendation*), hanya Suara.com yang memberikan rekomendasi bahwa atas perbuatannya, para tersangka bisa dijerat Pasal 170 KUHP Ayat 2 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Sementara, 5 media lainnya tidak memberikan rekomendasi apa pun dalam penanggulangan masalah yang terjadi.

Dari sepuluh media online yang memberitakan peristiwa pembakaran seorang transpuan bernama Mira di Cilincing, seleksi dan penonjolan berita tampak sebagai berikut:

Tabel 5. Seleksi dan Penonjolan Berita tentang Pembakaran Mira, Transpuan di Cilincing yang Dituduh Mencuri.

Kategori Isu	Pemilihan Judul	
Pemberitaan tentang pembakaran Mira, transpuan di Cilincing yang dituduh mencuri	Detik.com	Polisi menangkap pelaku pembakar transgender, Mira.
	Grid.id	Transgender, Mira, adalah korban main hakim sendiri.
	Kompas.com	Transgender, Mira, dituduh mencuri dan tewas dibakar
	Kumparan.com	Transgender, Mira, dituduh mencuri dan dibakar hidup-hidup
	Liputan6.com	Nasib Mira dibakar 3 pria
	Merdeka.com	Tidak ada berita
	Okezone.com	Tidak ada berita
	Pikiranrakyat.com	Tidak ada berita
	Suara.com	Tim Advokasi Mira meminta pemerintah peduli nasib LGBTIQ
	Tribunnews.com	Transgender, Mira, dibakar setelah sebelumnya mengaku mencuri ponsel
	Narasumber dan Keberpihakan	
	Detik.com	Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Wirdhanto Hadicaksono. Tidak ada satu pun representasi komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif yang diwawancarai dalam berita ini.
	Grid.id	1)Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto (mengutip dari Warta kota), 2)Rekan korban, ON (Mengutip dari Tribunjakarta).

	Kompas.com	1)Kanit Reskrim Polsek Cilincing AKP Bryan Rio Wicaksono, 2) Yuni Irawan, seorang teman Mira.
	Kumparan.com	Kanit Reskrim Cilincing, Bryan Rio Wicaksono. Tidak ada satu pun representasi komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif yang diwawancarai dalam berita ini.
	Liputan6.com	Kapolres Metro Jakarta utara, Kombes Budhi Herdi. Tidak ada satu pun representasi komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif yang diwawancarai dalam berita ini.
	Merdeka.com	Tidak ada berita
	Okezone.com	Tidak ada berita
	Pikiranrakyat.com	Tidak ada berita
	Suara.com	1)Tim Advokasi Mira, 2)Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto.
	Tribunnews.com	Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto. Tidak ada satu pun representasi komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif yang diwawancarai dalam berita ini.
	Representasi Identitas Individu/ Komunitas dengan Keragaman Gender dan Seksual Non-normatif	
	Detik.com	Transgender berinisial M.
	Grid.id	Transgender bernama Mira, transgender pekerja seks, banci senior.
	Kompas.com	Seorang bernama Mira yang disebut transgender.
	Kumparan.com	Seorang transgender bernama Mira.
	Liputan6.com	Waria bernama Mira.
	Merdeka.com	Tidak ada berita
	Okezone.com	Tidak ada berita
	Pikiranrakyat.com	Tidak ada berita
	Suara.com	Transgender perempuan alias transpuan bernama Mira.

	Pikiranrakyat.com	Tidak ada berita
	Suara.com	Transgender perempuan alias transpuan bernama Mira.
	Tribunnews.com	Transgender Mira.
	Kata-kata Terkait Individu /Komunitas dengan Keragaman Gender dan Seksual Non-normatif	
	Detik.com	Transgender berinisial M, dituduh mencuri
	Grid.id	Transgender bernama Mira, korban amukan, warga Cilincing, transgender pekerja seks, banci senior, pekerja seks asal Makassar, hidup sebatang kara tanpa pernah bertemu keluarga setelah hidup sebagai transgender.
	Kompas.com	Seorang bernama Mira yang disebut transgender, tewas karena dibakar, dituduh mencuri, para preman memaksa Mira mengakui dia telah mencuri.
	Kumparan.com	Seorang transgender bernama Mira, ia dibakar sekelompok orang yang menuduhnya mencuri, nyawanya tak tertolong, Mira dipukul 5 orang preman, api membakar Mira, pelaku menganiaya Mira.
	Liputan6.com	Waria bernama Mira, korban.
	Merdeka.com	Tidak ada berita
	Okezone.com	Tidak ada berita
	Pikiranrakyat.com	Tidak ada berita
	Suara.com	Kelompok lesbian, gay, biseksual, transpuan, interseks, dan queer atau LGBTIQ, transpuan bernama Mira, kurangnya penghormatan perlindungan dan pemenuhan terhadap kelompok LGBT di Indonesia, kekerasan terhadap kelompok LGBT, persekusi LGBT, kriminalisasi komunitas LGBTIQ, mengakui perbuatannya mencuri
	Tribunnews.com	Transgender Mira, tersangka yakin Mira lah pelaku pencurian, lekat dengan tindakan pencurian, korban.

Dari segi judul, (lihat pada tabel 5) terlihat bahwa pemberitaan media tentang tragedi yang menimpa transpuan, Mira, media memandang kasus Mira dengan berbagai perspektif. Media Kompas.com dan Kumparan.com menyoroti terkait Mira yang dituduh mencuri dan kemudian dibakar hidup-hidup. Sementara Tribunnews.com mengangkat judul yang seolah mewajarkan perbuatan para pelaku terhadap Mira karena sebelumnya ia telah mencuri. Tindakan Mira diposisikan sebagai faktor pemicu dari tindakan kekerasan yang ia terima. Juga terdapat judul berita yang menyiratkan penilaian peristiwa Mira sebagai tindakan tak manusiawi oleh pelaku, dan yang bernuansa advokasi penanganan kasus (Suara.com).

Dalam konteks pemilihan narasumber, 4 dari 7 media yang memberitakan peristiwa Mira hanya mengutip pernyataan narasumber dari kepolisian, atau dengan kata lain, narasumber kepolisian menjadi narasumber tunggal dalam berita. Padahal, menurut Ward (1991) seperti dikutip Ayu Purnama Rizky dalam esainya *“Bagaimana Media Memfasilitasi Cerita Polisi soal Anarko?”*, salah satu cara termudah untuk memverifikasi berita adalah dengan tidak mengutip pernyataan dari satu narasumber saja. Media perlu menghadirkan dua atau tiga sumber independen untuk memeriksa klaim dan mengecek sensitivitas informasi yang didapatnya.

Alih-alih menggunakan narasumber dari tim advokasi kasus Mira untuk mendapatkan perspektif dari sisi korban dan juga keadilan, narasumber polisi justru mendominasi pemberitaan di media. Padahal, dalam Laporan Bahaya Akut Persekusi LGBT yang dipublikasi oleh LBH Masyarakat (2018), aparat penegak hukum merupakan pelaku persekusi terbanyak kedua setelah organisasi masyarakat (ormas). Listiorini, D. (2020) menemukan bahwa dalam kasus pemberitaan “LGBT” pada empat media daring arus utama menunjukkan bahwa mayoritas narasumber berita yang dipilih merupakan pihak yang tidak mendukung “LGBT”. Laporan Indeks Media Inklusif oleh Remotivi (2020) menemukan bahwa media cenderung memberikan ruang lebih besar bagi “narasumber non-marginal” dibandingkan “narasumber marginal” itu sendiri, meski pemberitaannya terkait dengan isu kelompok marjinal. Tidak hanya secara umum, terkhusus klaster keragaman gender dan seksualitas, komposisi narasumber bagi “non-marjinal” mencapai hingga 81,7 persen, sementara kelompok “marjinal” hanya 17,2 persen, dan tak teridentifikasi sebesar 1,1 persen.

Bahkan di Kumparan.com, mereka turut memberikan ruang bagi pelaku (menggunakan wawancara dari kepolisian). Ryan Korbarri dari Arus Pelangi dalam wawancara kepada VOA Indonesia mengatakan bahwa pemberitaan media bisa menjadi pisau bermata dua bagi komunitas “LGBT”: media bisa membantu proses penanganan kasus yang dialami oleh komunitas “LGBT”, atau justru tidak membantu penanganan. Dalam wawancara tersebut,

Ryan mengatakan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media tidak sesuai dengan pendampingan yang dilakukan. Akibatnya, pemberitaan yang dilakukan oleh media justru menyulitkan tim penanganan kasus.

2.2. Pemberitaan tentang prank yang dilakukan oleh Youtuber Ferdian Paleka terhadap transpuan di Bandung

Tabel 6. Pemberitaan tentang prank yang dilakukan oleh Youtuber Ferdian Paleka terhadap transpuan di Bandung

Media	Tanggal publikasi	Judul berita	<i>Problem identification</i> (peristiwa dilihat sebagai apa)	<i>Causal interpretation</i> (siapa penyebab masalah)	<i>Moral evaluation</i> (penilaian atas penyebab masalah)	Treatment recommendation (rekomendasi atas penanggulang masalah)
Detik.com https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5002518/jejak-ferdian-paleka-aksi-mesum-survei-psk-dan-makanan-sampah?tag_from=wpm_nhl_19	5 Mei 2020	Jejak Ferdian Paleka: Aksi Mesum, Survei PSK, dan Makanan Sampah	Aksi kontroversial Ferdian Paleka tidak hanya saat melakukan prank membagikan makanan berisi sampah kepada sekelompok anak dan transpuan di Bandung, tapi sudah berulang kali dilakukan.	Ferdian Paleka	Media menggambarkan Ferdian Paleka sebagai youtuber yang sering membuat konten problematik	Tidak ada rekomendasi atas penanganan masalah
Grid.id https://www.grid.id/read/042181546/ferdian-palekabebas-komunitas-waria-sesalkan-keputusan-korban-yang-mencabut-laporan	5 Juni 2020	Ferdian Paleka Bebas, Komunitas Waria Sesalkan Keputusan Korban yang Mencabut Laporan	Kebebasan Ferdian Paleka dan dua rekannya telah diterima, setelah korban mencabut laporannya	Korban <i>prank</i> mencabut pelaporannya ke pihak kepolisian	Media hanya mengutip pernyataan Riri, anggota komunitas Waria di Bandung	Tidak ada sikap khusus maupun rekomendasi dari pihak media

Kompas.com https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/08/173344866/ferdian-paleka-ungkap-alasan-transpuan-buat-video-prank-sembako?page=1	8 Mei 2020	Ferdian Paleka Ungkap Alasan Sasar Transpuan Buat Video Prank Sembako Sampah	Ferdian mengungkap alasan mengapa ia membuat konten prank sembako sampah terhadap transpuan. Yakni agar tidak ada transpuan yang berkeliaran pada bulan Ramadhan. Namun, akhirnya Ferdian menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya .	Ferdian Paleka dan dua rekannya	Ferdian melakukan tindakan tak terpuji pada transpuan	Tidak ada
Kumparan.com https://kumparan.com/-kumparan-news/polisi-buru-ferdian-paleka-pembuat-video-prank-transpuan-di-bandung-1tLbKyB3tW4	4 Mei 2020	Polisi Buru Ferdian Paleka Pembuat Video Prank Transpuan di Bandung	<i>Youtuber</i> Ferdian Paleka menipu seorang transpuan dengan memberi paket makanan palsu. Video yang diunggah oleh Ferdian Paleka memantik reaksi dari netizen	Ferdian Paleka, <i>youtuber</i> yang menipu transpuan	Tindakan Ferdian Paleka merupakan bentuk diskriminasi terhadap komunitas transgender	Pelaporan Ferdian Paleka merupakan bentuk support para korban

Liputan6.com https://m.liputan6.com/showbiz/read/4245109/youtuber-ferdian-paleka-terancam-hukuman-penjara-4-tahun-terkait-prank-bantuan-untuk-transpuan	4 Mei 2020	<i>Youtuber</i> Ferdian Paleka Terancam Hukuman Penjara 4 Tahun Terkait Prank Bantuan untuk Transpuan	Video prank yang dibuat oleh Ferdian Paleka merupakan bentuk penghinaan terhadap transpuan	Ferdian Paleka	Media menggambarkan Ferdian Paleka harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merendahkan komunitas transgender melalui video <i>prank</i>	Tidak ada rekomendasi atas penanggulan masalah
Merdeka.com https://m.merdeka.com/sumut/ungkap-kekesalan-terhadap-ferdian-paleka-ni-kita-mirzani-kenapa-diperlakukan-seperti.html	8 Mei 2020	Nikita Mirzani Ungkap Kekesalan Terhadap Ferdian Paleka Kenapa Seperti Itu?	<i>Youtuber</i> Ferdian Paleka membuat publik marah setelah melakukan prank kepada komunitas transpuan. Salah satu artis yang marah atas perbuatan Ferdian Paleka yakni Nikita Mirzani	<i>Youtuber</i> Ferdian Paleka	Media menggambarkan Ferdian Paleka sebagai youtuber bermasalah	Tidak ada rekomendasi atas penanggulan masalah
Okezone.com https://news.okezone.com/read/2020/05/08/525/2211105/motif-prank-ferdian-paleka-bukan-untuk-naikkan-subscriber	8 Mei 2020	Motif <i>Prank</i> Ferdian Paleka: Bukan Untuk Naikkan <i>Subscriber</i>	<i>Youtuber</i> Ferdian Paleka menganggap bahwa transpuan tidak seharusnya bekerja pada bulan Ramadhan dan prank tersebut dianggap tidak bermaksud untuk menaikkan <i>subscriber</i>	Ferdian Paleka, <i>youtuber</i> yang melakukan prank kepada transpuan	Media menggambarkan Ferdian Paleka bukan sebagai pihak yang bersalah karena <i>prank</i> tersebut dianggap hanya untuk hiburan	Tidak ada rekomendasi atas penanggulan masalah

<p>Pikiran-rakyat.com https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01379444/a-nalisis-karakter-ferdian-paleka-pakar-mikro-ekspresi-dia-mengenal-warja-di-daerah-itu-dengan-baik</p>	<p>9 Mei 2020</p>	<p>Analisis Karakter Ferdian Paleka, Pakar Mikro Ekspresi: Dia Mengenal Warja di Daerah Itu dengan Baik</p>	<p>Pakar Mikro Ekspresi, Poppy Amalya menganalisis karakter Ferdian dalam sebuah video ketika dirinya melakukan prank sembako isi sampah</p>	<p>Menurut pakar, Paleka merasa bersalah, dan memiliki rasa keceasan</p>	<p>Menurut pakar, Paleka masih memiliki hati nurani</p>	<p>Tidak ada sikap khusus maupun rekomendasi dari pihak media</p>
<p>Suara.com https://www.suara.com/entertainment/2020/05/05/201837/heboh-ferdian-paleka-diduga-penyuka-sesama-jenis</p>	<p>5 Mei 2020</p>	<p>Heboh Ferdian Paleka Diduga Penyuka Sesama Jenis</p>	<p>Ferdian Paleka “dituduh” sebagai bagian dari komunitas “LGBT” dan diberikan stigma oleh netizen</p>	<p>Warganet menemukan nama Ferdian Paleka di sebuah aplikasi kencan online. Di situ, Ferdian Paleka berpose dengan latar belakang kolam renang</p>	<p>Di salah satu akun Instagram ramai dibicarakan dugaan bahwa Ferdian Paleka adalah “penyuka sesama jenis”.. Warganet habis-habisan merisak Ferdian, lantaran sebelumnya menghina dengan membuat prank kepada sejumlah waria</p>	<p>Tidak ada sikap khusus maupun rekomendasi dari pihak media</p>

Tribun- news.com https://www.tribun-news.com/region-al/2020/05/04/heboh-kasus-youtuber-ferdian-paleka-persatuan-waria-setidaknya-terimalah-kami-sebagai-manusia	4 Mei 2020	Heboh Kasus <i>Youtuber</i> Ferdian Paleka, Persatuan Waria: Setidaknya Terimalah Kami Sebagai Manusia	<i>Prank</i> sampah oleh Ferdian kepada transgender memantik berbagai respons kemanusiaan dari berbagai pihak, terkhusus kelompok transgender	<i>Youtuber</i> Ferdian Paleka cs	Tindakan <i>prank</i> sampah terhadap transgender tidak berperikeman usiaan	Orang- orang harus melihat dan memperlakuk an transgender sebagai manusia seutuhnya
--	---------------	--	--	---	--	---

Secara umum sepuluh media yang dianalisis, mengidentifikasi masalah (*problem identification*) yang terjadi karena tindakan *prank* Ferdian Paleka yang memberi bantuan berisi sampah ke transgender dan kemudian mengomodifikasinya menjadi konten *Youtube*. Tindakan Ferdian Paleka ini memantik reaksi publik dan membuat publik marah. Aksi *youtuber* ini lantas memancing berbagai respons kemanusiaan dari berbagai pihak, terkhusus kelompok transgender. Pun akibat tindakannya yang memancing tanggapan netizen, Ferdian Paleka menjadi bulan-bulanan warganet. Segala sesuatu tentangnya, dikorek habis oleh warganet.

Dalam *causal interpretation*, mayoritas media memosisikan Ferdian Paleka sebagai penyebab masalah. Selain itu, media Pikiran-rakyat.com, dengan menggunakan keterangan dari pakar mikro ekspresi, juga menunjukkan bahwa Ferdian Paleka merasa bersalah dan memiliki rasa kecemasan atas masalah yang ia buat.

Dari sisi *moral evaluation* (penilaian atas penyebab masalah), hampir seluruh media-media yang dianalisis cenderung menggambarkan bahwa tindakan Ferdian Paleka sebagai tindakan tak berperikemanusiaan terhadap transpuan. Kumparan.com, dengan terang menyebutkan bahwa tindakan Ferdian Paleka merupakan bentuk diskriminasi terhadap komunitas transgender. Media Pikiran-rakyat.com, melalui pernyataan pakar mikro ekspresi, menilai bahwa Ferdian Paleka sebetulnya masih memiliki hati nurani. Namun, berbeda dengan media lainnya, Okezone.com menggambarkan Ferdian bukan sebagai pihak bersalah karena *prank* tersebut dianggap untuk konten hiburan semata.

Hampir seluruh media juga tidak memberikan rekomendasi atas penanggulangan masalah (*treatment recommendation*). Hanya Tribunnews.com, melalui keterangan Ketua Persatuan Waria (Perwaris) Kota Semarang, menyebutkan bahwa orang-orang harus melihat dan memperlakukan transgender sebagai manusia seutuhnya.

Peneliti melihat ada pekerjaan yang luput dilakukan oleh media. Dari sepuluh media yang dianalisis, tidak ada media yang mendalami sejauh apa dampak kekerasan berbasis SOGIESC (*sexual orientation, gender identity, expression, sex characteristic*) bagi kelompok “LGBT”, dalam hal ini khususnya transpuan.

Kompas.com memang memberitakan alasan tindakan *prank* Ferdian yang tidak ingin ada transpuan berkeliaran pada bulan suci Ramadhan. Namun, jika melihat isi beritanya, Kompas.com tidak mengulik lebih jauh mengapa Ferdian menilai bahwa transpuan tidak boleh ada selama bulan Ramadhan, dan apakah Ferdian hanya satu dari banyak orang yang berpikiran sama. Media tidak membongkar unsur kekerasan berbasis SOGIESC itu secara mendalam dan menjelaskan dampaknya bagi kelompok marjinal seperti “LGBT”. Dalam Modul Panduan Media Meliput LGBT (2015), media melalui fungsi edukasinya seharusnya bisa menjadi corong pengetahuan bagi publik untuk mengetahui dan memahami bagaimana komunitas “LGBT” menjadi salah satu komunitas yang termarginalisasi dan terdiskriminasi di tengah masyarakat. Media perlu menerapkan perspektif pemberitaan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam memberitakan mereka.

Pun tidak ada media yang secara telaten menelusuri lebih lanjut penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan berbasis SOGIESC tersebut. Modul Panduan Media Meliput LGBT (2015) juga menyebut bahwa dalam sejumlah kasus, penegakan hukum kurang memperhatikan unsur *hate crime* (tindakan kejahatan atas dasar kebencian) oleh anti-“LGBT”. Sensitivitas serta pemahaman penegak hukum terhadap “LGBT” juga masih sangat minim. Ini akan berdampak terhadap penanganan kasus karena proses penyelidikannya bisa jadi tidak memadai. Media yang punya peran penting dalam menentukan respons penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis SOGIESC seharusnya dapat melakukan peliputan yang adil, akurat, dan inklusif sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih baik dan transparan.

Dari sepuluh media *online* yang memberitakan peristiwa *prank* terhadap transpuan di Bandung oleh youtuber Ferdian Paleka, seleksi dan penonjolan berita tampak sebagai berikut:

Tabel 7. Seleksi dan Penonjolan Berita tentang *prank* yang dilakukan oleh Youtuber Ferdian Paleka terhadap transpuan di Bandung

Kategori Isu	Pemilihan Judul	
Pemberitaan tentang <i>prank</i> yang dilakukan oleh youtuber Ferdian Paleka terhadap transpuan di Bandung	Detik.com	Jejak Ferdian Paleka: Aksi Mesum, Survei PSK, dan Makanan Sampah
	Grid.id	Ferdian Paleka Bebas, Komunitas Waria Sesalkan Keputusan Korban yang Mencabut Laporan
	Kompas.com	Ferdian Paleka Ungkap Alasan Sasar Transpuan Buat Video Prank Sembako Sampah
	Kumparan.com	Polisi Buru Ferdian Paleka Pembuat Video Prank Transpuan di Bandung
	Liputan6.com	Youtuber Ferdian Paleka Terancam Hukuman Penjara 4 Tahun Terkait Prank Bantuan untuk Transpuan
	Merdeka.com	Nikita Mirzani Ungkap Kekesalan Terhadap Ferdian Paleka Kenapa Seperti Itu?
	Okezone.com	Motif Prank Ferdian Paleka: Bukan Untuk Naikkan Subscriber
	Pikiran-rakyat.com	Analisis Karakter Ferdian Paleka, Pakar Mikro Ekspresi: Dia Mengenal Waria di Daerah Itu dengan Baik
	Suara.com	Heboh Ferdian Paleka Diduga Penyuka Sesama Jenis
	Tribunnews.com	Heboh Kasus Youtuber Ferdian Paleka, Persatuan Waria: Setidaknya Terimalah Kami Sebagai Manusia
	Narasumber dan Keberpihakan	
	Detik.com	Kasatreskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Galih Indragiri.
	Grid.id	Riri, anggota komunitas Waria Bandung
	Kompas.com	Ferdian Paleka
	Kumparan.com	Sani (korban), Abel (Srikandi Pasundan), Supriyono (Polrestabes Bandung).

Liputan6.com	Kasatreskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Galih Indragiri.
Merdeka.com	Nikita Mirzani (artis) dan Ferdian Paleka.
Okezone.com	Ferdian Paleka
Pikiran-rakyat.com	Selain wawancara dengan pakar mikro ekspresi, juga mengutip Net TV.
Suara.com	Dari Instagram Gosip diambil data dan sumber beritanya.
Tribunnews.com	1) Ketua Persatuan Waria (Perwaris) Kota Semarang, Silvy, 2) Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Galih Indragiri.
Representasi Identitas Waria	
Detik.com	-
Grid.id	Riri (anggota komunitas waria Jawa Barat)
Kompas.com	-
Kumparan.com	Sani (transpuan yang menjadi korban <i>prank</i>), Abel (Srikandi Pasundan)
Liputan6.com	-
Merdeka.com	-
Okezone.com	-
Pikiran-rakyat.com	-
Suara.com	-
Tribunnews.com	Silvy (Ketua Persatuan Waria Kota Semarang)
Kata-kata Terkait Individu /Komunitas dengan Keragaman Gender dan Seksual Non-normatif	
Detik.com	waria
Grid.id	waria, kaum minoritas, komunitas waria Jawa Barat
Kompas.com	waria, transpuan
Kumparan.com	transgender, transpuan, Srikandi Pasundan, waria
Liputan6.com	transpuan
Merdeka.com	waria, transpuan, bencong, banci
Okezone.com	waria, transpuan
Pikiran-rakyat.com	waria, transpuan, banci
Suara.com	penyuka sesama jenis, gay, waria, segolongan sama, ada belok-beloknya
Tribunnews.com	waria, Persatuan Waria (Pewaris), kemanusiaan.

Dalam pemberitaan tentang *prank* yang dilakukan oleh Ferdian Paleka, judul dari pemberitaan pada 10 media daring lebih banyak menyoroti sosok Ferdian Paleka sebagai content creator (*youtuber*). Hal ini terlihat dari judul yang ditulis oleh media seperti Detik.com, Kompas.com, Merdeka.com, Okezone.com, Pikiran-rakyat.com, dan Suara.com (lihat kolom pada tabel 7)

Dalam pemberitaan terkait *prank* Ferdian Paleka, terlihat bahwa penggunaan diksi bermakna negatif menyangkut identitas transgender perempuan sudah mulai jarang muncul di media. Dari 10 media daring yang dianalisis oleh peneliti, ada 3 media daring yang masih menggunakan diksi negatif yakni Merdeka.com, Pikiran-rakyat.com, dan Suara.com. Dalam pemberitaan tersebut, Merdeka.com dan Pikiran-rakyat.com menggunakan kata bencong dan banci untuk menggambarkan komunitas transgender, sedangkan Suara.com menggunakan diksi penyuka sesama jenis, segolongan sama, ada belok-beloknya untuk menggambarkan gay. Meskipun dalam pemberitaannya Merdeka.com seolah-olah memberikan ruang pada individu yang membela hak dari komunitas “LGBT”, tapi media hanya sekadar menjadi ‘tadah liur’ dari narasumber yang masih memilih diksi negatif, apalagi pemilihan narasumber dari pemberitaan tersebut tak relevan dengan kasus *prank* yang dilakukan oleh Ferdian Paleka. Sedangkan dalam pemberitaan Suara.com, penggunaan diksi tersebut memiliki makna negatif karena meminggirkan komunitas “LGBT”, menganggap komunitas “LGBT” berbeda dengan gender normatif dan dianggap “menyimpang”.

Dari sisi pemilihan narasumber, dari 10 media daring yang diteliti oleh Konde.co, hanya 3 media yang memberikan ruang bersuara pada komunitas transgender, sedangkan 7 media lainnya menggunakan narasumber lain seperti Ferdian Paleka, polisi, Nikita Mirzani dan Pakar Mikro ekspresi. Dalam pemberitaannya, media memberikan ruang pada Ferdian Paleka untuk menjelaskan alasan ia melakukan *prank* yang menggunakan alasan norma agama yakni karena bulan Ramadan. Berikut kutipan dari pemberitaan media terkait alasan Ferdian Paleka melakukan *prank* kepada kelompok transpuan di Bandung.

Adapun tujuannya kepada para waria, karena menurut dia, tidak seharusnya di bulan ramadhan, para waria tetap bekerja. “Kalau menurut saya di bulan ramadhan ini waria gak boleh, makanya saya ngelakuin itu,” katanya. (Okezone.com)

Ferdian Paleka dan dua rekannya menggunakan bulan Ramadhan sebagai alasan yang mendorongnya melakukan tindakan tak terpuji tersebut pada transpuan. “Karena menurut saya di Bulan Ramadhan ini waria gak boleh, jadi saya ngelakuinnya kayak gitu. Biar enggak ada waria pas bulan suci,” kata Ferdian Paleka seperti dikutip dari video KompasTV. (Kompas.com)

Luviana, dkk (2013) dalam risetnya mengatakan bahwa penggunaan bingkai agama dan normatif banyak dilakukan oleh media ketika melakukan pemberitaan “LGBT”. Penggunaan norma agama ini jugalah yang menyebabkan adanya diskriminasi bagi komunitas “LGBT” di media, seperti yang pernah dilakukan oleh KPI melalui surat edaran KPI Pusat nomor 2 tahun 2021 yang melarang penyiaran adegan yang mengandung unsur “LGBT” dengan dalih untuk meningkatkan kekhusyukan menjalankan ibadah puasa [1].

Pada pemberitaan Pikiran-rakyat.com, pemilihan narasumber pakar mikro ekspresi untuk menganalisis ekspresi wajah Ferdian Paleka pun tak relevan. Selain itu, analisis yang dilakukan oleh pakar mikro ekspresi pun cenderung memberikan ruang pembelaan kepada Ferdian Paleka. Hal ini terlihat dari pernyataan Poppy Amalya (pakar mikro ekspresi). Berikut kutipan pemberitaan dari *pikiran-rakyat.com*:

Pada saat pemberian sembako isi sampah kepada beberapa transpuan, Poppy menyebut bahwa terdapat kecemasan dalam diri Ferdian.

“Jadi mengeluarkan kalimat bahwa mereka kelaparan dan di situ dia mengeluarkan lidah, seperti menggambarkan kecemasan,” ucap Poppy dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube miliknya, Poppy Amalya Official pada Jumat, 8 mei 2020 kemarin.

Menurut Poppy, sebenarnya Ferdian masih memiliki hati nurani ketika dia melakukan aksi tersebut.

“Sebenarnya ia memiliki hati nurani yang lagi mengetuk-ngetuk perasaannya karena ia melakukan tindakan seperti itu dengan cara bawah sadarnya keluar gerakan tubuh,” ujar Poppy.

Alih-alih memberikan ruang bagi komunitas transpuan yang menjadi korban dari aksi prank Ferdian Paleka, Pikiran-rakyat.com pun justru ruang pembelaan pada Ferdian Paleka dengan dalih pandemi.

Poppy menambahkan, dalam pemikiran Ferdian dan teman-temannya pada saat itu adalah ketakutan mereka akan penyebaran virus corona karena masih banyak orang-orang yang berkeliaran saat pemerintah mengimbau masyarakat untuk diam di rumah.

“Jadi di dalam pemikiran mereka yang melakukan tindakan ini adalah orang-orang yang mestinya tidak di jalan, mestinya ada stay at home, mestinya mereka tidak kemana-mana, karena itu dampak daripada corona ini. Makin banyak nanti gara-gara mereka ini,” terang Poppy.

2.3. Pemberitaan tentang ‘pesta’ di apartemen Kuningan yang diselenggarakan oleh komunitas ‘gay’

Tabel 8. Pemberitaan tentang ‘pesta’ di apartemen Kuningan yang diselenggarakan oleh komunitas ‘gay’

Media	Tanggal publikasi	Judul berita	<i>Problem identification</i> (peristiwa dilihat sebagai apa)	<i>Causal interpretation</i> (siapa penyebab masalah)	<i>Moral evaluation</i> (penilaian atas penyebab masalah)	Treatment recommendation (rekomendasi atas penanggulang masalah)	Narasumber
Detik.com https://news-detik.com/berita/d-5156813/polisi-peserta-tak-boleh-pakai-pakaian-saat-pesta-gay-di-jaksel?tag_from=wpm_nhl_6	2 September 2020	Polisi: Peserta Tak Boleh Pakai Pakaian Saat Pesta Gay di Jaksel	Polisi menganggap pesta ke-merdekaan merupakan modus yang digunakan oleh komunitas gay untuk menggelar pesta seks	Penyelenggara dan peserta pesta di Apartemen Kuningan	Media mengambarkannya sebagai perbuatan yang salah dan menjelaskan aturan dalam pesta di Kuningan	Tidak ada rekomendasi atas penanggulangan masalah	Kabid Humas Polda Metro Jaya
Grid.id https://www.grid.id/read/042320890/fakta-baru-mengejutkan-pesta-gay-di-jakarta-terungkap-ada-banyak-alat-seks-ditemukan-termasuk-lakban	4 September 2020	Fakta Baru Mengejutkan Pesta Gay di Jakarta Terungkap! Ada Banyak Alat Seks Ditemukan, Termasuk Lakban	Ditemukannya fakta baru terkait pesta gay, yaitu adanya alat seks dan lakban	Media melaporkan adanya "pesta" gay melibatkan 56 orang pria	Media tidak menjelaskan lebih lanjut tentang fakta alat seks dan lakban. Judul dan <i>headline</i> hanya bagian dari <i>click bait</i>	Tidak ada sikap khusus maupun rekomendasi dari pihak media	Narasumber hanya dari pihak Ditreskrim Polda Metro Jaya
Kompas.com https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/02/17211041/seorang-tersangka-penyelenggara-pesta-seks-sesama-jenis-di-apartemen?page=all	2 September 2020	Seorang Tersangka Penyelenggara Pesta Seks Sesama Jenis di Apartemen Terkena HIV	Polisi menetapkan 9 orang penyelenggara acara sebagai tersangka. Dan, menekankan bahwa satu di antaranya positif mengidap HIV. Ia diberikan ruang tahanan khusus	Penyelenggara dan peserta acara	Acara tersebut dilabeli dengan narasi "pesta seks"	Tidak ada	Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Kumparan.com https://kumparan.com/news/pesta-gay-di-apartemen-di-kuningan-dimulai-dari-undangan-di-medsos-1u7zCutsHRN	3 September 2020	Pesta Gay di Apartemen di Kuningan Dimulai dari Undangan di Medsos	Polisi melakukan rekonstruksi dari penggerebekan yang mereka lakukan di apartemen Kuningan	Peserta pesta di Apartemen Kuningan	Media menggambarkan para penanggung jawab pesta memiliki peran seperti merencanakan pesta seks hingga proses pelaksanaan pesta	Tidak ada rekomendasi atas penanggulangan masalah	Wardikrim Polda Metro Jaya
Liputan6.com https://liputan6.com/news/read/4346207/9-orang-tersangka-dan-fakta-pesta-gay-yang-digerebek-polisi	2 September 2020	9 Orang Tersangka dan Fakta Pesta Gay yang Digerebek Polisi	Polisi menganggap pesta gay di Kuningan sebagai tindakan cabul	Penyelenggara pesta dan para peserta di Apartemen Kuningan	Media menggambarkan peserta dan penyelenggara pesta gay sebagai perbuatan yang salah dan menjelaskan prosedur mengundang peserta pesta	Tidak ada rekomendasi atas penanggulangan masalah	Kabid Humas Polda Metro Jaya
Merdeka.com https://merdeka.com/jabar/11-fakta-pesta-gay-di-apartemen-kuningan-jaksel-gun-akan-kostum-masker-merah-putih.html	3 September 2020	9 Orang Tersangka dan Fakta Pesta Gay yang Digerebek Polisi	Polisi menganggap pesta gay di Kuningan sebagai tindakan cabul	Penyelenggara pesta dan para peserta di Apartemen Kuningan	Media menggambarkan peserta dan penyelenggara pesta gay sebagai perbuatan yang salah dan menjelaskan prosedur mengundang peserta pesta	Tidak ada rekomendasi atas penanggulangan masalah	Kabid Humas Polda Metro Jaya

Oke-zone.com https://mega.politan.oke-zone.com/read/2020/09/02/338/2271411/pesta-gay-9-pria-ditahan-polda-metro-jaya	2 September 2020	Pesta Gay, 9 Pria Ditahan Polda Metro Jaya	Polisi melakukan penangkapan terhadap komunitas gay yang sedang melakukan pesta di Kuningan	Peserta pesta di Apartemen Kuningan	Penggerebekan yang dilakukan polisi di apartemen kuningan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta gay yang digelar secara privat	Tidak ada rekomendasi atas penanggulangan masalah	Direskrimum Polda Metro Jaya
Pikiran-rakyat.com https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01714608/polisi-bubarkan-pesta-gay-masker-merah-putih-di-kuningan-ini-arti-kode-dress-code-nya-new-normal	2 September 2020	Polisi Bubarkan Pesta Gay Masker Merah Putih di Kuningan, Ini Arti Kode Dress Code-nya 'New Normal'	Pesta kaum gay di kalangan Kuningan, Jakarta menjadi pesta seks merah putih sebagai kode peserta. Informasi di lapangan, selain mereka harus membayar juga wajib mengenakan dress code masker merah dan putih sebagai kode tertentu	Polisi menjelaskan, dress code masker merah berarti "TOP" atau laki-laki peserta yang ingin melakukan hubungan seksual menggunakan kelaminnya. Sementara masker warna putih berperan sebagai "BOTTOM" atau laki-laki peserta yang menggunakan dubur atau anus untuk berhubungan seks	Ada puluhan pria diamankan dan digiring dari lokasi komunitas homoseksual Hot Space ini ke kantor polisi. Dikatakan polisi, komunitas gay Hot Space berdiri sejak Februari 2018. Mereka saling berkomunikasi melalui grup Whatsapp dan Instagram	Tidak ada sikap khusus maupun rekomendasi dari pihak media	Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus

<p>Suara.com https://www.suara.com/news/2020/09/03/071250/cerita-ter-sangka-pesta-gay-jaksel-jalani-rapid-test-Hasilnya-Positif-HIV?page=all</p>	<p>3 September 2020</p>	<p>Cerita Tersangka Pesta Gay Jaksel Jalani Rapid Test, Hasilnya Positif HIV</p>	<p>Salah satu tersangka penyelenggara pesta seks sesama jenis (homo) atau gay di sebuah apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan positif mengidap Human Immunodeficiency Virus atau HIV</p>	<p>1 dari 9 orang penyelenggara pesta tersebut menurut pihak polisi mengidap HIV</p>	<p>Tidak dijelaskan lebih detail bagaimana proses mengetahui salah seorang penyelenggara pesta itu positif HIV. Yang diceritakan oleh media adalah tentang tes Covid-19</p>	<p>Media menuliskan bahwa atas perbuatannya, kesembilan tersangka dikenakan Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 33 Jo Pasal 7 Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman kurungan minimal satu tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara</p>	<p>Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus</p>
<p>Tribun-news.com https://www.tribun-news.com/metro-politan/2020/09/02/1-dari-9-ter-sangka-kaus-pesta-seks-gay-di-jakarta-positif-hiv-ancaman-hukuman-hingga-10-tahun?page=3</p>	<p>3 September 2020</p>	<p>1 dari 9 Tersangka Kasus Pesta Seks Gay di Jakarta Positif HIV, Ancaman Hukuman Hingga 10 Tahun</p>	<p>Dari 9 tersangka penyelenggara acara, ada satu orang yang positif mengidap HIV</p>	<p>Penyelenggara acara</p>	<p>Tersangka penyelenggara berbuat tindak asusila sehingga besar kemungkinannya ada di antara mereka yang positif mengidap HIV</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus</p>

Dari sepuluh media *online* yang diteliti, kesepuluh media memberitakan peristiwa “pesta” di sebuah apartemen di kawasan Kuningan yang diselenggarakan oleh komunitas gay. Hal ini menunjukkan ke sepuluh media *online* menganggap peristiwa tersebut “penting” dan “layak” diberitakan. Berita diturunkan secara serentak, mayoritas pada tanggal 2 September (detik.com, kompas.com, liputan6.com, pikiran-rakyat.com, okezone.com, tribunnews.com), diikuti pada 3 September (kumparan.com, merdeka.com, suara.com) dan 4 September (grid.id). Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen bingkai media dalam isu persekusi gay oleh polisi di sebuah apartemen kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Secara umum, ke-sepuluh media daring mendefinisikan masalah persekusi gay ini dengan peristiwa polisi melakukan penggerebekan dan penahanan terhadap 56 individu gay di sebuah apartemen kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Representasi kerja polisi dalam peristiwa tersebut menjadi dominan dalam semua pemberitaan, yang dinarasikan media melalui kata-kata antara lain penggerebekan, penahanan (menahan), penyidikan, rekonstruksi dan menetapkan tersangka. Pilihan kata-kata tersebut menunjukkan sebagai akibat diadakannya kegiatan di masa pandemi yang disebut sebagai “pesta gay” atau “pesta seks gay” adalah hal yang terlarang. Ilegal dan perlu diberhentikan oleh pihak yang berwajib (dalam hal ini adalah polisi). Penjelasan media mengenai alasan polisi melakukan penggerebekan berdasar laporan warga apartemen (menurut pihak polisi) dan tidak melakukan pengecekan ke warga setempat, menunjukkan bahwa media memberikan porsi kuasa yang besar bagi kepolisian secara diskursif.

Pada elemen penyebab masalah (*causal interpretation*), semua media online dalam penelitian ini menyepakati bahwa diselenggarakannya acara privat oleh komunitas gay yang diikuti lebih dari 50 peserta adalah penyebab masalah (baik peserta maupun penyelenggara pesta). Semua media daring menyebut istilah “pesta gay” dan “pesta seks gay” secara bergantian, dan media juga memunculkan dengan istilah lain yaitu “pesta sejenis” (Kumparan.com) atau “pesta seks sesama jenis” (kompas.com dan merdeka.com). Masalah mengenai para peserta di acara privat tersebut diperluas

oleh media dengan menyebut identitas peserta yang tidak hanya gay, namun juga positif HIV (kompas.com, suara.com, tribunnews.com).

Posisi peserta ODHIV (orang dengan HIV) menjadi diskriminatif karena media menginformasikan bahwa pihak polisi menahannya di tempat terpisah (kompas.com dan suara.com). Pernyataan ini menunjukkan tindakan polisi yang diskriminatif terhadap odhiv. Sementara media tidak melakukan afirmasi apa pun mengenai hal ini dengan pihak lain di luar kepolisian. Dalam hal ini media mengamini dan membenarkan tindakan diskriminatif yang dilakukan polisi terhadap komunitas gay. Penyertaan keterangan lain oleh polisi mengenai cara-cara kesenangan pada komunitas gay dengan menyebut “top”, “bottom” atau “vers” atau mengatakan bahwa peserta pesta “dilarang berbusana saat pesta” semakin menguatkan “perbedaan” yang dimiliki oleh komunitas tersebut tetapi dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar. Sehingga menjadi beralasan apabila menurut polisi hal itu dianggap “ilegal” dan merupakan “tindakan cabul sesama jenis/cabul sejenis” atau “pornografi”. Akibatnya, menurut media, kegiatan pesta di ranah privat tersebut layak digerebek dan polisi merasa berhak melakukan penahanan.

Sementara pada bingkai yang mengaitkan dengan penilaian atas moralitas pada masalah yang terjadi, kesepuluh media daring menyatakan bahwa pertama, perbuatan melakukan pesta di tengah pandemi adalah hal yang salah. Hal ini menjadi diskriminatif mengingat ada banyak pesta diselenggarakan di masa pandemi sepanjang 2020 namun tidak diberhentikan pihak kepolisian (seperti pernikahan selebritis heteroseksual). Kepolisian pun mengacu pada laporan dari masyarakat yang membuat mereka merasa harus menindaklanjuti kegiatan yang dianggap “meresahkan” warga.

Semua media daring menganggap bahwa peristiwa persekusi komunitas gay yang terjadi pada 29 Agustus 2020 adalah peristiwa kriminal biasa, sebagaimana peristiwa persekusi terhadap gay yang terjadi sejak 2017. Media tidak pernah menganggap bahwa persekusi di ranah privat sebenarnya melanggar hak asasi manusia. Media menganggap kebenaran

tunggal berasal dari pernyataan polisi dan tidak melakukan konfirmasi ke pihak lain, seperti kuasa hukum dari komunitas gay atau pernyataan yang mewakili komunitas gay dari organisasi seperti Suara Kita¹, Yayasan Gaya Nusantara², Arus Pelangi³ atau GWL-Ina⁴. Narasumber utama yang dikutip pernyataannya oleh media hanya berasal dari satu sumber, yaitu dari pihak kepolisian (lihat pada tabel 9). Hal ini menjadikan suara dari komunitas gay dipinggirkan oleh media.

Terkait dengan penyelesaian masalah atau pemberian rekomendasi, semua media daring juga sama sekali tidak mendiskusikan atau memberikan rekomendasi penyelesaian masalah apapun terkait peristiwa persekusi gay ini. Media hanya memberitakan dari pendapat pihak kepolisian bahwa para peserta dan penyelenggara pesta akan diberikan hukuman karena mereka dianggap melakukan tindakan pornografi (detik.com), memudahkan perbuatan cabul dan melanggar UU Pornografi (tribunnews.com)

Dari analisis di atas, terlihat jelas bahwa mayoritas media cenderung mengutip pernyataan narasumber dari kepolisian dan menjadikannya sebagai narasumber utama dan tunggal dalam berita. Seperti dapat dilihat pada tabel 9, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menjadi narasumber utama terbanyak (detik.com, grid.id, kompas.com, liputan6.com, merdeka.com, pikiranrakyat.com, suara.com, tribunnews.com). Sementara kumparan.com mengutip Wadirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvijn Simanjuntak dan okezone.com mengetengahkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat sebagai narasumber. Namun intinya ke sepuluh media daring dalam

¹Suara Kita menyatakan diri sebagai organisasi perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan bagi LGBT sebagai warga negara melalui pendidikan kritis, media informasi, kebudayaan dan perubahan kebijakan (website www.suarakita.org)

²(Yayasan) GAYa NUSANTARA adalah pelopor organisasi gay di Indonesia yang terbuka dan bangga akan jati dirinya serta tidak mempermasalahkan keragaman seks, gender dan seksualitas serta latar belakang lainnya (website gayanusantara.or.id)

³Arus Pelangi adalah organisasi berbasis federasi yang bersifat non profit dan non pemerintah yang berjuang untuk membela hak-hak kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Trans, dan Interseks di Indonesia (website Arus Pelangi, www.aruspelangi.or.id)

⁴GWL-Ina adalah jaringan yang beranggotakan organisasi-organisasi berbasis komunitas (OBK) yang bekerja untuk isu-isu HIV, kesehatan dan hak-hak kemanusiaan bagi komunitas GWL (Gay, Waria dan Laki-laki seks laki-laki) di Indonesia (website gwl-ina.or.id)

riset ini hanya menampilkan narasumber dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya dalam kasus berita persekusi gay dan tidak memberikan ruang suara pada komunitas gay. Entah melalui organisasi komunitas yang melakukan advokasi terhadap individu atau keragaman gender dan seksual non-normatif ataupun melalui kuasa hukum mereka. Informasi yang didapatkan oleh peneliti Konde.co, para gay yang menjadi tersangka ini sesungguhnya telah memiliki kuasa hukum dari lembaga non-pemerintah yaitu Yayasan Suara Kita.

Dari sepuluh media online yang mengunggah permasalahan persekusi komunitas gay yang dibahasakan oleh semua media sebagai “pesta gay” atau “pesta sesama jenis” di sebuah apartemen di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, seleksi dan penonjolan berita tampak sebagai berikut:

Tabel 9: Seleksi dan Penonjolan Berita Kasus Persekusi Gay di Apartemen Kuningan

Kategori Isu	Pemilihan Judul	
"Pesta" di sebuah apartemen di Kuningan yang diadakan oleh komunitas gay	Detik.com	Peserta tidak berbusana saat pesta gay di Jakarta Selatan
	Grid.id	Pesta gay dan ditemukan alat bantu seks
	Kompas.com	Seorang tersangka pesta seks sesama jenis di apartemen terkena HIV
	Kumparan.com	Pesta gay di apartemen Kuningan berasal dari undangan media sosial
	Liputan6.com	9 tersangka pesta gay yang digerebek polisi
	Merdeka.com	Fakta pesta gay di apartemen Kuningan yang menggunakan kostum masker merah putih
	Okezone.com	Pesta seks gay dan 9 laki-laki ditahan Polda Metro Jaya
	Pikiranrakyat.com	Polisi membubarkan pesta gay masker merah putih di Kuningan
	Suara.com	Tersangka pesta gay Jaksel yang positif HIV
	Tribunnews.com	Seorang tersangka pesta seks gay positif HIV dan diancam hukuman hingga 10 tahun

	Okezone.com	Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat, yang mengatakan sudah menahan 9 orang. Tidak berpihak pada komunitas gay. Tidak ada representasi dari komunitas gay, baik dari organisasi komunitas gay atau kuasa hukum pengacara yang mewakili mereka.
	Pikiranrakyat.com	Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menginformasikan penetapan 9 tersangka dan tidak berpihak pada komunitas gay. Tidak ada representasi dari komunitas gay, baik dari organisasi komunitas gay atau kuasa hukum pengacara yang mewakili mereka.
	Suara.com	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus yang mengatakan satu penyelenggara terkena HIV. Tidak ada representasi dari komunitas gay, baik dari organisasi komunitas gay atau kuasa hukum pengacara yang mewakili mereka.
	Tribunnews.com	Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa ada tersangka yang positif HIV. Tidak ada representasi dari komunitas gay, baik dari organisasi komunitas gay atau kuasa hukum pengacara yang mewakili mereka.
Representasi Identitas Gay di Kasus Persekusi Gay		
	Detik.com	Tersangka, saksi, top, bottom, vers,
	Grid.id	Sebagian besar peserta berkeluarga (istri dan anak), pengidap HIV,
	Kompas.com	Tersangka, pesta seks, otak penyelenggara, senang-senang
	Kumparan.com	Tersangka, pesta seks
	Liputan6.com	Tersangka, saksi, cabul sesama jenis, tindakan cabul, pornografi, kegiatan seks sesama jenis
	Merdeka.com	Tindakan cabul sesama jenis, mencari kesenangan
	Okezone.com	Tahanan
	Pikiranrakyat.com	Top, bottom, d*bur, an'l
	Suara.com	Tersangka, pesta seks, positif mengidap HIV
	Tribunnews.com	Puluhan lelaki tanpa busana melakukan pesta seks

Kata-kata pilihan dalam pemberitaan persekusi komunitas gay	
Detik.com	Apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan, Komunitas lelaki pecinta sesama jenis, pesta gay, pesta seks,
Grid.id	Apartemen kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, penyuka sesama jenis,
Kompas.com	Pesta seks sesama jenis (mengutip narsum polisi), apartemen kawasan Kuningan Jakarta Selatan, alat kontrasepsi, permainan seksual, ancaman penjara, perbuatan cabul
Kumparan.com	Apartemen kawasan Kuningan Jakarta Selatan, pesta seks, pesta seks sejenis, pesta gay, alat-alat seksual, diamankan
Liputan6.com	Pesta seks sesama jenis, pesta gay, cabul, cabul sesama jenis, pornografi, apartemen kawasan Jakarta Selatan
Merdeka.com	Apartemen kawasan Jakarta Selatan, cabul sesama jenis, pesta seks sesama jenis
Okezone.com	Apartemen Kuningan Suite lantai enam room 608, Jalan Setiabudi raya, Jakarta Selatan, pesta gay
Pikiranrakyat.com	Apartemen mewah, jalan Setia Budi Utara Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, barang bukti obat perangsang, pelicin, kondom bekas pakai, pesta seks kaum gay, pesta seks menyimpang
Suara.com	Apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan, pesta seks, pesta seks sesama jenis, homo, gay, delapan kotak alat kontrasepsi, tiga botol pelumas
Tribunnews.com	Apartemen kawasan Kuningan Jakarta Selatan, pesta seks sesama jenis,

Melalui pemilihan judul, ke sepuluh media membingkai tindakan persekusi yang dilakukan oleh polisi dengan kata-kata “Pesta Gay”, “Pesta Seks Gay” atau “Pesta Seks Sesama Jenis” yang ditabrakkan dengan tindakan polisi melakukan penahanan atau penggerebekan. Judul-judul tersebut dengan demikian menginformasikan bahwa pesta yang dilakukan oleh komunitas gay di ruang privat di sebuah apartemen penahanan atau penggerebekan yang dilakukan oleh polisi adalah hal yang ilegal dan memang sudah seharusnya diberhentikan. Persekusi yang dilakukan oleh polisi di ruang privat yang ditunjukkan melalui penyebutan “apartemen di kawasan Kuningan Jakarta Selatan” oleh seluruh media menunjukkan kuasa kepolisian dalam melakukan hal tersebut.

Melalui pemilihan judul, ke sepuluh media membingkai tindakan persekusi yang dilakukan oleh polisi dengan kata-kata “Pesta Gay”, “Pesta Seks Gay” atau “Pesta Seks Sesama Jenis” yang ditabrakkan dengan tindakan polisi melakukan penahanan atau penggerebekan. Judul-judul tersebut dengan demikian menginformasikan bahwa pesta yang dilakukan oleh komunitas gay di ruang privat di sebuah apartemen penahanan atau penggerebekan yang dilakukan oleh polisi adalah hal yang ilegal dan memang sudah seharusnya diberhentikan. Persekusi yang dilakukan oleh polisi di ruang privat yang ditunjukkan melalui penyebutan “apartemen di kawasan Kuningan Jakarta Selatan” oleh seluruh media menunjukkan kuasa kepolisian dalam melakukan hal tersebut.

Dalam pemberitaan tentang persekusi “pesta” di Apartemen Kuningan, tergambar bahwa media menyudutkan komunitas gay. Hal ini terlihat dari pemilihan kata dalam pemberitaan di antaranya *cabul sesama jenis, mencari kesenangan, pecinta sesama jenis, d*b*r, an*I* (pemilihan kata dubur dan anal, media seolah menunjukkan cara-cara yang digunakan komunitas gay untuk melakukan hubungan seksual), *berperan bottom, berperan top, berperan vers, kaum gay, pesta seks menyimpang*. Dengan menggunakan kata “dubur” dan “anal” yang diberi tanda asterik (*) untuk menyamarkan menunjukkan media merasa bahwa dua kata tersebut seolah tidak pantas untuk diberikan pada khalayak. Media seolah merasa “malu” dan “tabu” pada dua kata tersebut. Konsep “malu” pada konstruksi seksualitas di Indonesia ini merupakan cara yang ampuh untuk menunjukkan seksualitas mana yang dianggap pantas atau tidak. Di Indonesia sendiri, seksualitas merupakan topik yang bertalian erat dengan rasa malu, sebagaimana istilah “kemaluan” berasal dari kata malu (Davies, 2008, p. 38)

Sementara itu penyebutan terakhir “seks menyimpang” adalah penyebutan keliru sebab pandangan ini telah dikoreksi seluruhnya oleh *World Health Organization*. Pada 17 Mei 1990, WHO menghapus homoseksualitas dari Daftar Penyakit Mental yang sempat tercantum dalam *International Classification of Disease*. Keputusan WHO ini kemudian dicantumkan dalam buku Pedoman Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan

Jiwa di Indonesia edisi II tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III (1993) oleh Departemen Kesehatan RI.

Dalam esai berjudul Oknumisasi Aparat dan Politik Bahasa di Media yang dipublikasi di Remotivi, Triyo Handoko menjelaskan tentang pentingnya penggunaan bahasa dalam media untuk membangun pengetahuan publik dan dapat mempengaruhi cara pikir seseorang. Andajani, S., dkk (2015) mengatakan bahwa dalam pemberitaan terkait komunitas “LGBT”, media seringkali menggunakan bahasa yang melecehkan dan merendahkan. Media pun seolah-olah memiliki ‘moral standard’ yang baik sehingga dalam pemberitaan terkait razia ‘LGBT’, media secara sengaja melakukan eksploitasi atas upaya razia dan semakin meminggirkan individu atau kelompok/komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif. Standar “*moral yang benar*” ini diperkuat dengan pilihan kata yang menyertai pada individu/komunitas gay dalam kasus persekusi tersebut misalnya dengan menggunakan “*banyak peserta sudah berkeluarga*” dan “*peserta ada yang terkena HIV*”, termasuk menjadikan kondom sebagai barang bukti. Padahal dengan adanya kondom dalam acara tersebut menunjukkan kesadaran komunitas gay akan pentingnya menjaga diri mereka dari penularan infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV.

Sepuluh media yang diteliti oleh Konde.co menggunakan polisi sebagai narasumber utama dalam pemberitaan persekusi “pesta” di Apartemen Kuningan. Penggunaan polisi sebagai narasumber utama dalam pemberitaan justru memberikan ruang yang begitu luas kepada polisi sehingga ia bebas membangun narasi. Padahal dalam kasus ini, polisi merupakan pelaku kekerasan (persekusi) terhadap komunitas gay. Andajani, S., dkk (2015) menyebut, razia yang dilakukan oleh polisi seringkali dibingkai sebagai hal positif yang digunakan untuk ‘memberikan rasa aman di masyarakat’ dari hal yang ‘meresahkan’. Namun dalam hal ini, polisi menggunakan acuan norma ‘heteronormatif’ sehingga masyarakat yang menempatkan diri pada keragaman gender dan seksualitas ‘non-normatif’ lebih rentan menjadi target razia.

2.4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pemberitaan tiga kejadian yakni pembakaran transpuan Mira di Cilincing, prank sampah yang dilakukan oleh Youtuber Ferdian Paleka, dan persekusi “pesta” di Apartemen Kuningan terlihat bahwa media masih melakukan marginalisasi terhadap komunitas gender dan seksualitas ‘non-normatif’. Media menggunakan pola peminggiran yang sama terhadap komunitas ‘LGBT’ yakni dengan pemilihan diksi yang berkonotasi negatif, hingga pemilihan narasumber yang terbatas pada otoritas resmi (aparatus kepolisian). Michel Foucault (1998) menyebut hal ini sebagai bentuk pendisiplinan seksualitas melalui narasi. Menurut Wijaya, H.Y. (2015), hal yang dianggap normal dan abnormal saat ini merupakan produk dari praktik diskursif yang diciptakan oleh kekuasaan.

Akdom, A.M. & Pasarua, E.H. (2020) mengatakan bahwa saat ini, pemerintah terus merawat dan memproduksi pandangan heteronormativitas. Tak jarang, pejabat negara menjadikan pandangan ini untuk membentuk kebijakan diskriminatif. Salah satu bentuk peminggiran yang dilakukan oleh negara yakni melalui UU Pornografi yang sering digunakan untuk menjerat komunitas dengan keragaman gender dan seksual ‘non-normatif’. Padahal negara tidak boleh berlindung di balik kepentingan “moral” tertentu untuk mengabaikan hak kelompok gender dan seksualitas ‘non-normatif’. Bahkan menurut Komisioner Komisi Tinggi PBB, Navanethem Pillay dalam Muthmainnah, Y. (2015), kriminalisasi terhadap homoseksualitas merupakan ancaman serius terhadap hak dasar setiap individu atau komunitas/kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif.

Sayangnya, media pun turut serta mengkampanyekan pandangan aktor negara yang mendiskriminasi “LGBT” untuk menguasai persepsi publik, sehingga mereka yang memiliki identitas gender dan seksualitas di luar kerangka heteronormativitas dianggap sebagai bentuk hubungan yang “tidak normal”. Greer, C. (2013) mengatakan, dalam sebuah pemberitaan yang dikaitkan dengan ‘kejahatan seks’, media cenderung menggunakan

pandangan dari kelompok atau institusi yang berada di puncak hierarki sosial dan politik. Mereka menganggap bahwa kelompok ini memiliki kredibilitas yang paling baik, sehingga pihak kepolisian atau kehakiman akan mendominasi pemberitaan. Sebaliknya, pers memilih untuk meminggirkan pandangan dari kelompok yang lebih marginal agar menguasai pengaruh yang lebih rendah dari publik.

Padahal seharusnya pers bersikap lebih kritis terhadap penguasa atau negara yang melakukan pengabaian terhadap individu atau kelompok/komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif', apalagi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas bahwa peran pers nasional di antaranya menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, menghormati kebhinekaan serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

BAB 3

Menyingkap Kebijakan dan Kepatuhan Televisi Dalam Isu "LGBT"

Upaya mencari fakta dan data tentang bagaimana media televisi Indonesia menerapkan pemberitaan mengenai individu dengan keragaman gender dan seksual non-normatif yang sering dibahasakan dengan "LGBT", dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara pada pemangku kepentingan televisi berita yang ada di Indonesia. Ada 4 televisi berita di Indonesia yang sesungguhnya memiliki kemampuan coverage pemberitaan yang luas di Indonesia, yakni Metro TV, CNN TV Indonesia, Kompas TV dan TV One. Namun, pada akhirnya hanya ada dua televisi yang berkomitmen untuk memberikan waktunya dalam proses wawancara mendalam yakni Metro TV dan CNN TV Indonesia. Sementara wawancara dengan pihak TV One dan Kompas TV, setelah pihak peneliti berulang kali melakukan upaya pendekatan dan pengajuan resmi melakukan wawancara, peneliti tidak berhasil mendapatkan jadwal wawancara sampai penelitian ini ditulis.

Secara umum, dapat dipetakan bahwa memang tidak mudah bagi media untuk memberikan komitmen melakukan wawancara dan diskusi soal pemberitaan mengenai individu atau kelompok/komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif di media, karena isu ini masih sering dianggap sensitif, tabu, dan juga menjadi normatif apabila dikaitkan dengan UU dan segala tata aturan yang ada di Indonesia.

Isu diskriminasi dan pelanggaran atas hak asasi manusia berkaitan dengan preferensi seksual yang berbeda pada individu atau komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif pun tampak makin menguat di Indonesia. Diskriminasi terhadap mereka telah berlangsung selama bertahun-tahun tetapi kelompok itu baru-baru ini menghadapi permusuhan

yang meningkat dari para pejabat tinggi pemerintah dan anggota parlemen yang menggambarkan kelompok minoritas sebagai ‘tidak bermoral’ atau ‘bahaya bagi remaja’. Alih-alih menyuarakan pentingnya pemenuhan hak asasi atas kelompok ini, berbagai media justru semakin mengafirmasi tindakan diskriminasi dan ikut menyudutkan kelompok minoritas tersebut.

Kondisi ini menjadikan permusuhan terhadap komunitas LGBTQ seolah makin melembaga. Peminggiran terus berlanjut, dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberlakukan aturan diskriminatif terhadap komunitas LGBTQ. Pada 2016, KPI mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 203/K/KPI/02/2016 yang melarang lembaga penyiaran, televisi dan radio menjalankan program yang mempromosikan kegiatan komunitas LGBTQ. Larangan ini juga dipublikasikan KPI di laman resmi lembaganya. (<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33218-kpi-larang-promosi-lgbt-di-tv-dan-radio?start=279&detail3=4935&detail5=320>).

Arief Suditomo, Pimpinan Redaksi Metro TV menyatakan secara gamblang bahwa aturan tersebut bahkan ada di UU Penyiaran, maupun di P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran):

“Itu tidak hanya di KPI tapi di UU Penyiaran, ada di P3SPS juga, fakta bahwa secara normatif LGBT ini bukan sebuah gaya hidup yang bisa dipromosikan itu memang menjadi bagian dari produk hukumnya, jadi sepanjang hal-hal yang terkait dengan regulasi itu masih mengikat ya kami sebagai bagian dari industri harus comply, karena ini terkait perizinan, terkait eksistensi, kalau kita melanggar UU Penyiaran, P3SPS, itu terkait dengan izin. Saya sebagai pemred tidak mau mendapat resiko tidak mendapat izin perpanjangan penyiaran dari KPI karena melanggar UU. Jadi kurang lebih seperti itu, dan di dalam UU ada tercantum bahwa hal-hal yang terkait LGBT dalam perspektif mempromosikan itu kan gak bisa, jadi ya situasinya memang seperti itu”

- (Arief Suditomo, Pimpinan Redaksi Metro TV)

Hal senada juga disampaikan oleh Dewi Safitri, Standard and Practices Specialist CNN Indonesia:

“Kami mengindahkan, mengindahkan sikap KPI tersebut jadi di redaksi itu adalah bagian yang kita informasikan pada teman-teman, kita menyadari bahwa liputan tentang LGBT itu seringkali kontensius gitu, menampilkan dua sudut pandang yang sangat berbeda, berhadap-hadapan kita menghindari ini. Fokusnya ke arah itu, apa yang disampaikan oleh KPI ini, kita perhatikan dan kita indahkan. Jadi di layar CNN berkaitan dengan info yang disampaikan oleh KPI itu, kelihatannya tidak ada.”

- (Dewi Safitri, Standard and Practices Specialist CNN Indonesia)

Dari pernyataan Arief dan Dewi di atas, peneliti melihat beberapa hal. Pertama, para pemangku kebijakan di kedua stasiun televisi ini cenderung mengikuti aturan KPI terkait pelarangan “LGBT” karena adanya kepentingan rekomendasi perpanjangan izin siaran dari KPI. Ini membuat media televisi patuh begitu saja terhadap aturan KPI tersebut.

Padahal, jika mau lebih kritis, media televisi bisa mempertanyakan, jika tidak mau disebut menggugat atas dasar keputusan surat edaran tersebut. Sebab, surat edaran larangan penayangan “LGBT” oleh KPI bertentangan dengan peraturan di atasnya, yakni P3SPS. Dalam Bab XI tentang Perlindungan Kepada Orang dan Kelompok Masyarakat Tertentu di P3SPS, ada pasal 15 ayat 1 yang justru memberi perhatian pada kelompok keragaman gender dan seksual non-normatif, berbunyi:

“Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan: b) orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu.”

Selain itu, kritik terhadap KPI yang dilontarkan oleh para aktivis perempuan yang menyatakan bahwa aturan KPI ini diskriminatif terhadap kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif, juga belum mampu menjadi referensi cara pandang yang digunakan media dalam melihat persoalan ini dari perspektif hak asasi manusia.

Dalam wawancara, Arief Suditomo dari Metro TV memang menyatakan bahwa Metro TV tidak anti terhadap “LGBT”, karena tayangan “LGBT” juga pernah ditayangkan di acara Kick Andy. Namun, Metro TV tetap menjadikan aturan KPI sebagai landasan utama kebijakan redaksi karena KPI yang memegang izin siaran televisi dan tak mau mengambil resiko jika tiba-tiba tidak diberikan izin siaran televisi. Aturan KPI adalah landasan yang penting bagi redaksi karena Metro TV tak mau mengambil resiko ketika KPI tak memperbolehkan penayangan “LGBT” seperti menayangkan soal gaya hidup “LGBT.” Ini menunjukkan kuatnya pengaruh kebijakan KPI dalam penerapan kebijakan redaksi televisi dalam konteks “LGBT”.

Kedua, pemahaman mendasar terkait kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif di tingkat para pemangku kebijakan media yang masih keliru. Arief, khususnya, menyebutkan “LGBT” sebagai sebuah gaya hidup’ sehingga ‘tidak boleh dipromosikan’. Penyebutan ‘LGBT sebagai gaya hidup’ bukanlah penyebutan istilah yang benar dalam mendefinisikan “LGBT”. Pun seperti halnya tidak ada penyebutan untuk istilah gaya hidup heteroseksual. Peneliti melihat ini sebagai sebuah catatan penting, sebab level pengetahuan isu di tingkat struktural teratas di sebuah media akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan redaksi secara keseluruhan.

Upaya untuk tidak memberikan ruang pada kelompok “LGBT” di media penyiaran televisi dan radio akan makin mempersempit pemahaman masyarakat Indonesia untuk mengenal individu dan komunitas dengan keberagaman gender dan seksual non-normatif yang secara riil ada di tengah masyarakat. Terlebih apabila aturan pelarangan tersebut bernuansa diskriminatif dan memandang negatif pada komunitas “LGBT”. Sebuah

penelitian bahkan secara tegas menggambarkan ada hubungan yang sangat signifikan antara berita yang bernada anti “LGBT” dan opini publik tentang masalah tersebut. Salah satu isunya adalah tentang keberadaan gay di militer Amerika Serikat. Saat media penyiaran televisi menampilkan dengan nada negatif yang signifikan terkait dengan isu tersebut, maka dukungan publik menjadi menurun untuk mengizinkan homoseksual bertugas di militer (Hester, J. B., & Gibson, R., 2007)

Bagaimanapun juga media massa, terutama televisi, sangatlah berkontribusi pada perubahan besar pemikiran dan dukungan publik atas keberadaan “LGBT” di sebuah masyarakat. Hal ini diperkuat dari penelitian yang dilakukan oleh Ayoub, P. M., & Garretson, J. (2017), yang menunjukkan bahwa media dapat memainkan peran secara signifikan dalam membentuk sikap politik terhadap seksualitas dan minoritas secara umum, terutama yang mempengaruhi pandangan kelompok-kelompok individu yang lebih muda.

Apabila media televisi membatasi sudut pandang kelompok marjinal, maka kesenjangan dalam toleransi dan kebebasan berekspresi akan makin tetap tinggi. Maka mau tidak mau untuk menutup kesenjangan dalam toleransi dan perubahan budaya, berbagai pihak, termasuk pemimpin masyarakat, harus terus mendorong berbagai media untuk menceritakan kisah yang lebih akurat tentang “LGBT”. Mempromosikan penggambaran kelompok marjinal ini dengan cara yang lebih inklusif dan representatif di media, dapat memperluas toleransi terhadap semua jenis minoritas yang terstigma. Inilah yang kemudian dibutuhkan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan masyarakat yang memiliki keberagaman sejak awal kehadirannya.

3.1. Mengapa Representasi Individu atau Komunitas dengan Keragaman Gender dan Seksual Non-normatif Penting?

Bagi masyarakat Indonesia yang sangat beragam dari sisi etnis, suku, bahasa, agama, dan preferensi seksual, tidak ada lagi keraguan atas pertanyaan mengapa representasi individu atau komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif di media massa, khususnya televisi menjadi penting? Jawabannya antara lain karena kita mencintai dan berupaya mempertahankan keberagaman yang selama ratusan tahun ini damai di bumi Indonesia.

Berbagai kebudayaan di Indonesia pada hakikatnya menunjukkan sikap toleran masyarakat Indonesia atas keberadaan kelompok minoritas ini. Deretan budaya yang diwakilkan oleh komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif di tanah air ini misalnya, pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang mengenal lima gender yaitu bura'ne (laki-laki), makkunrai (perempuan), calabai (laki-laki dengan ekspresi gender perempuan), calalai (perempuan dengan ekspresi gender laki-laki) serta bissu (Graham, 2007).

Pentingnya representasi "LGBT" di televisi kemudian bisa dilihat dari beberapa sisi. Pertama, paparan karakter "LGBT" melalui media dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat umum terhadap komunitas "LGBT" dan isu-isu kebijakan publik terkait. Terutama dari sisi keberadaan kelompok ini yang nyata ada di antara masyarakat Indonesia. Bahwa keberadaan mereka bersifat inklusif dan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, representasi media dapat berdampak positif bagi anggota komunitas "LGBT", khususnya di kalangan remaja, yang seringkali mengalami tekanan sosial saat memiliki preferensi seksual yang berbeda. Ketiga, opini publik dapat terbangun dari media yang menampilkan secara positif dan tidak mendiskriminasi kelompok "LGBT" sebagai bagian dari kelompok minoritas di tanah air. Di mana kelompok ini harus dilindungi dan dijaga hak asasi mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Meski demikian memang dalam prakteknya media televisi di Indonesia belum memberikan ruang yang cukup untuk isu “LGBT”. Kebijakan media menjadi salah satu kendala yang cukup serius. Terutama karena setiap media pasti memiliki kebijakan, tentang sudut pandang pemberitaan (angle), baik secara konvensional atau tertulis soal isu-isu apa yang tidak boleh dan boleh diangkat dalam pemberitaan. Dalam hal ini Metro TV mengakui belum memiliki kebijakan dan formula khusus:

“Terus terang terkait isu LGBT, kita belum memiliki formulasi yang berkaitan dengan advokasi LGBTQ, belum pernah ada yang memantik diskusinya, mungkin juga belum ada sebuah peristiwa yang pada akhirnya mengharuskan kita menengok itu sebagai sebuah kebijakan publik, dan belum melihat itu membuat rundown kami menjadi menarik. Itulah yang kami hadapi. Mungkin belum saja karena sejauh ini saya sebagai pemred terlibat dalam banyak hal, saya lihat; Wapemred saya, para manajer dan eksekutif produser itu belum pernah dari kami ada pemantik untuk mulai membahas hal tersebut.”
- (Arief Suditomo, Pimpinan Redaksi Metro TV)

Setelah memahami pentingnya representasi “LGBT” di media, termasuk di televisi, maka kita pun harus terus mengingatkan peran pihak media untuk memiliki kepedulian secara nyata dalam memberikan ruang pemberitaan pada kelompok “LGBT”. Minimal diawali dari adanya kebijakan baik tertulis maupun tidak atas panduan peliputan pemberitaannya.

Dari sisi kebijakan masing-masing redaksi televisi, memang terlihat belum secara tegas memberikan dukungan dan advokasi pada isu “LGBT”. Termasuk kedua televisi yang menjadi narasumber juga mengakui, mereka tidak memiliki panduan khusus tentang peliputan isu “LGBT”. Termasuk tidak adanya kebijakan dalam penulisan dan pelaporan isu “LGBT”, tidak ada aturan maupun terminologi khusus yang boleh dan tidak digunakan pada

redaksi, seperti yang disampaikan oleh Pimpinan Redaksi Metro TV:

“Tidak ada, saya baru kepikiran ini makanya kita tidak pernah punya guideline, sikap, atau patokan-patokan atau terminologi yang kita rumuskan khusus. Saya harus akui ya, belum sempat kepikiran “

- (Arief Suditomo, Pimpinan Redaksi Metro TV)

Pernyataan hampir sama pun disampaikan oleh pihak CNN TV Indonesia yang mengakui bahwa mereka memiliki panduan peliputan yang sifatnya disebarkan pada seluruh karyawan yang bergabung diperusahaan tersebut.

Ketika ditanyakan apakah dalam panduan tersebut termaktub secara jelas tentang peliputan isu “LGBT”, jawaban yang diberikan adalah “Kira-kira begitu”. Dalam posisi ini peneliti memang sulit untuk mengecek lebih lanjut, karena panduan tersebut bersifat internal, namun ketika ditanyakan lebih lanjut apakah panduan tersebut seperti kode etik, maka pihak CNN memberikan jawaban:

“Enggak, saya tidak terlalu yakin disebut apa, apapun bentuknya ini kalau kode etik kan kita masih harus menerjemahkan dalam bentuk yang jauh lebih praktis ya. Ini panduan ini biasanya sudah langsung aplikasi situasi lapangan ya. Jadi kita kan begini kalau begini, kita kan begitu kalau begitu. Bahkan bukan cuma jurnalis aja yang menerima. Jadi gini kalau masuk CNN Indonesia, kalau sudah masuk dalam kategori pegawai tetap, maka semua pegawai itu akan wajib mengikuti apa yang disebut sebagai basic training training dasar standard and Practices, hari ini kita melakukan ini dan itu dan apa gunanya gitu ya, terus dalam upaya untuk mencapai tujuan itu untuk menciptakan apa yang kita cita-citakan ada serangkaian hal yang perlu diketahui dalam urusan kita,

aturan kita begini. Dalam meliput tema ini kami melakukan pendekatan yang sama, tapi karena waktu training itu sangat terbatas sehingga sangat mungkin bahwa seluruh bagian dari apa yang kami sebut sebagai standard and practices itu tidak terekspos seluruhnya kepada peserta. Jadi kemungkinan ada peserta yang lebih akrab pada panduan itu ada yang lain yang tidak terlalu akrab tidak pernah buka misalnya , karena kan ini urusannya sama ini ya aplikasi gitu ya jadi kalau kalau wartawan yang berurusan dengan isu tertentu akan akan lebih sering lihat itu dibanding yang lain, kira-kira gitu”

- (Dewi Safitri, Standard and Practices Specialist CNN Indonesia)

Persoalan keberadaan kebijakan keredaksian atas peliputan berita “LGBT” memang masih menjadi isu utama pada kebanyakan media televisi, bahkan seringkali tidak menjadi isu yang dipandang perlu menjadi perhatian khusus. “Tidak kepikiran” atas isu tersebut adalah salah satu kata kunci yang disampaikan oleh pimpinan redaksi Metro TV, dalam pernyataan yang disampaikan secara lugas:

“Kita belum pernah punya kesempatan ya untuk merumuskan apa pun yang terkait dengan sikap kami, atau bagaimana kami memformulasi tulisan atau gambar atau editorial kami tentang isu-isu ini, sehingga saya memang dengan pembicaraan ini jadi agak kepikiran, emm gak bisa bohong ya, kita gak pernah punya waktu atau kesempatan utk rembukan di kantor apa ya yang harus kita sikapi. Kita tidak pernah dengan sengaja melakukan persekusi, tapi kita tidak pernah melakukan advokasi. Tapi kalau ada berita kasus apa yg dilakukan LGBT, ya kita beritakan. Mostly it concern some cases that involved those individuals among them ya”

- (Arief Suditomo, Pimpinan Redaksi Metro TV)

3.2. Karakter Jurnalis Menjadi Utama

Ketika kebijakan dan panduan peliputan “LGBT” menjadi tidak terlalu kuat dihadirkan oleh perusahaan media, maka dalam konteks menghadirkan pemberitaan isu “LGBT” ini pun mau tidak mau bertumpu pada keberadaan para jurnalisnya di lapangan. Bekal pengetahuan atas isu “LGBT”, keterampilan menyajikan berita, serta pengalaman yang cukup di lapangan menjadi modal yang sangat penting agar berita tentang “LGBT” bisa hadir di masyarakat melalui tayangan televisi kita.

Namun lagi-lagi sayangnya ruang untuk memperkuat karakter dan pemahaman atas isu “LGBT” ini tidak maksimal bisa didapatkan oleh awak jurnalis lapangan dari ruang redaksi, maupun pelatihan dan training isu seksualitas. Di CNN TV Indonesia belum ada kebijakan untuk upaya memberikan pemahaman lebih mendalam pada para jurnalisnya tentang isu “LGBT” di ruang redaksi. Kemudian ketika ditanyakan apakah kebijakan itu akan mungkin dihadirkan di ruang redaksi? Maka pihak CNN TV memberikan jawabannya secara gamblang:

“Kalau dari kami melihat apakah sesuai kebutuhan . Apakah isu ini dipandang mendesak dan sangat diperlukan ada penambahan kapasitas, perlu gak proses capacity buildingnya. Isu mendesak misalnya, kita masuk dalam situasi pandemi kita nggak tahu sebenarnya ini apa sih pandemi itu, apa covid itu, pasti tu apa bisa kenapa bisa terjadi bagaimana dampaknya, bagaimana menghindarinya dan seterusnya untuk itu kayak seperti ini kami menyelenggarakan training internal. Ya itu namanya training sains gitu ya.....redaksi undang, siapa saja diundang, diperbolehkan bertanya dan mencari informasi, luaran dari situ adalah insight tentang apa pandemi itu. Ada lagi training kesehatan ya karena kami memandang bahwa penting banyak teman-teman yang survivor covid, terus anggota keluarga juga survivor covid, terus masih banyak

yang menderita long covid, apa yang harus kami lakukan dan seterusnya. Kami ada proses capacity building untuk isu itu terus itu lain misalnya tentang yang akan datang misalnya tentang perubahan iklim. Jadi apa yang kami pandang mendesak untuk pemahaman pribadi sebagai karyawan maupun pemahaman profesional sebagai orang yang bekerja dan nanti kontribusinya itu akan nampak dalam kinerja nya redaksi, itu kami akan lihat kalau sangat memang sangat diperlukan gitu ya diselenggarakan, nah untuk isu LGBT, sejauh ini kebutuhan itu belum nampak”

-(Dewi Safitri, Standard and Practices Specialist CNN Indonesia)

Dengan kata lain, menurut Dewi Safitri, kebijakan CNN Indonesia mengenai pemberitaan isu individu atau kelompok/komunitas dengan keragaman gender dan seksual masih dirasa belum diperlukan. Hal yang kurang lebih sama juga terdapat di redaksi Metro TV. Pengembangan karakter, pemahaman dan keterampilan menuliskan berita dengan isu “LGBT”, juga belum dilakukan oleh pihak internal redaksi Metro TV, dan ketika ditanyakan apakah awak redaksi Metro TV akan diizinkan mengikuti berbagai training dengan isu seksualitas yang dilakukan pihak eksternal, pimpinan redaksi Metro memberikan jawaban:

“Pelatihan itu adalah kewenangan kantor, bukan karena orang dapat dari networkingnya sendiri untuk bisa ikut kesempatan. Kalau ada tawaran untuk bisa ikut pelatihan harus disubmit ke kantor, agar kantor lah yg menugaskan siapa, belum tentu orang yg dapat tawaran dari organisasi A atau B, maka dia lah yang akan berangkat. Jadi kewenangannya ada di saya untuk menentukan siapa yang akan berangkat atau apakah kita akan ikut training itu atau tidak. Personally, saya merasa bahwa Metro itu belum pernah punya kesempatan untuk merumuskan, bukan karena apa-apa, tapi gak kepikiran

aja. Nah hal yang mungkin harus diperhatikan lebih kepada kami juga gak mau dicap sebagai pihak yang dianggap mempromosikan nilai-nilai ini karena dari sisi normatif, kebijakan, undang-undang, apalagi dari sisi norma sosial dan agama kan masih jauh ya utk bisa ke tahap acceptance. Tahapan ini sangat penting untuk pada akhirnya tidak terburu-buru membuat sebuah keputusan yang sifatnya afiliasi atau aliansi yang terkait advokasi kepentingan LGBT. Harus sangat hati-hati karena organisasi kami kan terafiliasi dengan partai politik, dan amat sangat sensitif utk hal tersebut, sehingga sikap dari teman-teman di kantor di mana kami tidak pernah punya niat utk persekusi, tapi juga belum melakukan keputusan untuk advokasi, itu mohon diperhatikan”
- (Arief Suditomo, Pimpinan Redaksi Metro TV)

3.3. Pengaruh Iklan pada Isu Individu atau Komunitas/ Kelompok dengan Keragaman Gender dan Seksual Non-normatif

Kehidupan media, termasuk televisi tidak terlepas dari keberadaan iklan berbayar yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar mereka. Ketika menggali hubungan antara pemasang iklan dan konten berita, menarik menemukan bahwa ada pandangan yang berbeda antara kedua televisi yang menjadi narasumber penelitian ini.

Misalnya saja CNN TV mengatakan meskipun pemasang iklan tidak bisa mempengaruhi secara langsung hasil peliputan, namun pihaknya masih menerima bentuk pemberitaan dalam bentuk paid content:

“Kalo pertanyaannya: Apakah bisa seorang pemasang iklan itu mempengaruhi kebijakan redaksi ada program yang paid

content dan fully editorial itu yaYa sudah memang kita tentuin sendiri saja gitu kalau yang paid content Ya sebaliknya gitu.....ya tetapi sangat mungkin bahwa yang spontan itu menginspirasi mungkin itu kata yang agak ...I used rather loosely ya, untuk bikin liputan yang bersifat editorial. Misalnya gini: kontennya adalah seorang Gubernur tampil meresmikan acara apa gitu ya, Kenapa dia itu hadir, karena dia pengen tampil gitu , yang muncul jelang Pilkada atau Pilpres, atau lainnya, Pokoknya dia pengen tampil di layar TV untuk mungkin untuk apa jangkauan program daerahnya sudah mencapai program nasional gitu ya, buktinya tampil di TV nasional dan sejenisnya mungkin ketika dia tampil itu teman-teman bikin program editorial dia bisa menggunakan materi-materi yang ternyata kita bisa lihat dari sudut pandang lain materinya mungkin sama tapi sudut pandang yang lain framenya agak lain ditambahin atau dikurangi narasumber dan seterusnya. Jadi apakah dia bisa menentukan saya kira jawabannya mungkin tidak terlalu hitam putih gitu ya , apakah dia bisa mempengaruhi atau tidak pada penontonnya”

- (Dewi Safitri, Standard and Practices Specialist CNN Indonesia)

Sementara itu Metro TV secara tegas mengatakan tidak ada kaitan antara kepentingan iklan dan peliputan berita:

“Nggak ada. Kalau pihak lain kan memang key performance indicatornya kan seberapa jauh revenue yang mau mereka ambil, kalau saya rating..... DNA utama dari editorial saya adalah pembahasan kebijakan baik politik ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, berita politik, politic of power, kriminal, itu cukup menyita perhatian publik dari sisi rating”

- (Arief Suditomo, Pimpinan Redaksi Metro TV)

3.4. Celah Harapan Dalam Situasi Khusus

Pernyataan dari kedua televisi yakni CNN TV dan Metro TV bahwa kebijakan atas peliputan “LGBT” tidak menjadi sebuah panduan khusus, dan kedua televisi secara tegas menyatakan mendukung kebijakan KPI terkait pelarangan tampilan kelompok “LGBT” di layar kaca televisi, namun kedua televisi masih menampilkan satu atau dua kali program acara atau berita mengenai individu atau komunitas/kelompok dengan keragaman gender dan seksual non-normatif”. Hal ini dapat dilihat melalui program Kick Andy yang ditayangkan pada Oktober 2021 lalu, menampilkan antara lain Shinta Ratri, transpuan pemimpin Pondok Pesantren Al Fatah.



Sumber: Tayangan Kick Andy tanggal 4 Oktober 2021

Walaupun Arief Suditomo sebagai Pimpinan Redaksi Metro TV dalam wawancara dengan peneliti Konde.co menekankan bahwa posisi Metro TV tidak pernah memiliki agenda khusus tentang “LGBT”, namun tayangan Kick Andy secara jelas menunjukkan adanya kepedulian kepada kelompok/komunitas transpuan. Program talkshow Kick Andy meski di bawah keredaksian Metro TV, tapi memiliki kebijakan yang berbeda dengan keredaksian.

Demikian juga dalam pemberitaan isu “LGBT” di tayangan CNN Indonesia, yang oleh narasumber CNN disampaikan bahwa tidak ada kebijakan khusus berkaitan dengan liputan “LGBT”. Namun demikian, peneliti mencermati ada beberapa liputan soal “LGBT” dalam pemberitaan di CNN TV. Mengenai tayangan pemberitaan lainnya dengan isu transpuan, secara gamblang dikemukakan oleh Yunizar Djoenaid, Editorial Row Manager CNN Indonesia, saat diwawancara oleh peneliti.

“Kita pernah punya liputan tentang pengajian transgender misalnya tapi memang yang diangkat adalah sosok guru agamanya, artinya dia mau mengajar agama kepada siapa saja begitu kanenggak ada masalah yaitu Bahwa kemudian di layar tampak Apa anggota komunitas transgender, ada yang sudah transgender , ada yang belum begitu , ya tidak jadi soal dan sepanjang yang saya tahu tidak ada tidak ada , apa ya Iya tidak ada masukan yang negatif tentang itu dari penonton”

- (Yunizar Djoenaid, Editorial Row Manager CNN Indonesia)

Pemaparan Yunizar tentang guru agama, Arif Nuh Safri Sitompul yang mengajar di sebuah pesantren waria di Yogyakarta bisa diakses di YouTube CNN (2019) dengan judul “Pahlawan Waria dari Yogyakarta”. Pendekatannya pada sosok Arif dan bagaimana dia beraktivitas, mengajar ngaji di tengah-tengah transpuan.

Fakta lain menunjukkan pada 2020 lalu CNN Indonesia TV menampilkan pemberitaan dengan isu yang memberikan perhatian pada isu transpuan selama masa pandemi dengan judul Strategi Transgender Perempuan Hadapi Pandemi (tayang 5 November 2020) dan Polemik Waria Dalam Sel Pria (tayang 25 November 2020). Tayangan Strategi Transgender Perempuan Hadapi Pandemi mengisahkan tentang transpuan yang membuka bisnis kuliner selama masa pandemi untuk bertahan hidup. Mereka juga saling



Sumber: Youtube CNN Indonesia tanggal 17 Februari 2019

bantu kepada transpuan lainnya yang mengalami masalah keuangan. Sementara tayangan Polemik Waria dalam Sel Pria mengisahkan tentang kasus Millen Cyrus yang dipenjara dalam sel pria. Penempatan Millen di sel pria berpotensi memunculkan diskriminasi dan pelecehan terhadap transpuan dalam sel tahanan. Dalam kedua tayangan tersebut narasumber yang diketengahkan cukup beragam, jadi tidak hanya satu sisi saja.



Sumber: Youtube CNN Indonesia tanggal 5 November 2020



Sumber: Youtube CNN Indonesia tanggal 25 November 2020



Sumber: Youtube CNN Indonesia tanggal 17 Februari 2019

3.5. Kesimpulan

Aturan soal larangan tayangan “LGBT” di media penyiaran di tahun 2016 yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbukti telah menjadi landasan kebijakan yang diterapkan redaksi televisi dalam menayangkan soal “LGBT.” Jika menyiarkannya, ada rasa takut bagi pengelola televisi jika izin siaran mereka dicabut. Walaupun 2 televisi, yaitu Metro dan CNN Indonesia pernah menayangkan liputan soal “LGBT” dari sisi kemanusiaan, namun kehati-hatian dalam model “kepatuhan” inilah yang kemudian dipilih untuk menjadi kebijakan televisi terhadap aturan KPI.

Model “kepatuhan” inilah yang kemudian membunuh peran penting media dalam memberitakan isu mengenai individu atau kelompok/komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif . Media memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan manusia, baik berupa pengetahuan yang baru atau menguatkan hal-hal atau nilai-nilai yang sudah diyakininya. Ruang redaksi, seharusnya mampu memproduksi “sebuah pengetahuan,” yang berkeadilan, mengedukasi dan relevan serta komprehensif dengan perkembangan zaman.

Namun pengetahuan yang komprehensif dan berkeadilan tersebut mau tidak mau menjadi runtuh melalui kontrol negara di tangan lembaga KPI yang secara langsung atau tidak langsung membentuk ideologi kuasa di televisi. Disini terlihat ada dominasi KPI dalam redaksi media televisi di media. Peneliti melihat, KPI telah menetapkan aspek-aspek kekuasaan, dominasi-subordinasi yang terjadi baik di tingkat teks maupun di tingkat redaksi media. Hal ini ditunjukkan oleh jurnalis media massa di Indonesia baik di tingkat lapangan maupun manajemen yang cenderung menyertakan pengalaman serta pengetahuannya yang sudah mengkristal menjadi skema interpretation dalam mengonstruksi suatu realitas.

Tampak jelas bahwa kepatuhan pihak manajemen di televisi memang lebih karena secara normatif mengikuti regulasi yang dikeluarkan KPI. Kritik terhadap KPI yang dilontarkan oleh para aktivis maupun organisasi yang mendukung keberagaman yang menyatakan bahwa aturan KPI ini diskriminatif terhadap kelompok tertentu seperti “LGBT”, juga belum mampu menjadi cara pandang yang digunakan media dalam melihat persoalan ini dari perspektif hak asasi manusia. Ini juga menunjukkan kuatnya pengaruh kebijakan KPI pada redaksi televisi dalam konteks “LGBT”.

Akibatnya, upaya untuk tidak memberikan ruang pada kelompok “LGBT” di media penyiaran televisi dan radio akan makin mempersempit pemahaman masyarakat Indonesia untuk mengenal keberagaman seksual yang secara riil ada di tengah masyarakat.

BAB 4

Menyingkap Kebijakan dan Kepatuhan Televisi Dalam Isu "LGBT"

Media Online dan isu LGBTQ:

Kecepatan, Kemanusiaan dan Kebutuhan Klik

Makin menjamurnya jumlah media online di Indonesia seolah menjadi gambaran kondisi media saat ini betapa persaingan bisnis di bidang media online seolah tak terelakan. Diperkirakan saat ini media online di Indonesia jumlahnya lebih dari 43 ribu. (Dewan Pers, 2020). Sebuah angka yang sangat fantastis, mengingat pola konsumsi media online di Indonesia, khususnya pada portal berita secara langsung, makin terasa menurun. Audience di Indonesia cenderung mengakses pemberitaan melalui media sosial (Kominfo, 2015). Media daring di Indonesia mulai muncul pasca reformasi 1998, ditandai dengan kemunculan Detik.com. Tapsell, R. (2017) mengatakan bahwa media daring mengubah bentuk baru dalam penyampaian berita. Jika jurnalisme seharusnya memuat unsur 5W + 1H, kehadiran media daring memangkas "mengapa dan bagaimana", sehingga konten yang dihasilkan hanya memuat "siapa, kapan, dan di mana?".

Menjamurnya jumlah media online ini kemudian juga mengubah struktur kebijakan redaksi mereka. Untuk itu menjadi sangat signifikan bagi kita untuk memahami bagaimana seharusnya media online melakukan tugasnya dan bersikap pada isu "LGBT". Beberapa media online sangat terbuka untuk menerima pengajuan wawancara mendalam dari tim peneliti. Media-media tersebut adalah Suara.com, Kompas.com, Liputan6.com, juga Tempo.co. Adapun ada beberapa media yang tampak kesulitan menerima permohonan

wawancara, seperti Kumparan.com, atau bahkan ada yang menolak secara lugas seperti yang dilakukan oleh Detik.com tanpa menyebutkan alasan penolakan wawancara.

4.1. Perubahan Kebijakan Tentang Jurnalis dan Content Creator

Secara umum, berita dengan nada negatif yang muncul di berita online, seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman di kalangan jurnalis atau awak media tentang keragaman gender. Misalnya, berita tentang seorang selebriti biseksual yang dianggap aneh dari sudut pandang kehidupan banyak orang. Identitas sebagai seorang biseksual cenderung dicap serakah dan melanggar hukum, bahkan bisa dianggap sebagai penyimpangan sosial. Pernyataan ini memperkuat stigma negatif masyarakat terhadap kelompok “LGBT” (Nurhajati, 2019). Kondisi ini juga terjadi dalam situasi saat ini dimana makin menjamurnya jumlah media online di Indonesia.

Secara umum, dengan adanya perkembangan kondisi media online saat ini, keberadaan media tidak hanya dipengaruhi oleh kerja-kerja jurnalisnya, namun juga kebijakan redaksi yang berubah. Kebijakan redaksi tersebut salah satunya bisa dilihat dari munculnya penulis berita yang masuk dalam kategori content creator di redaksi. Jadi, di redaksi media, tak hanya ada jurnalis, namun juga ada content creator.

Peneliti menemukan hal yang menarik, bahwa rata-rata media online yang peneliti wawancara, ternyata memiliki batas yang samar antara penulis berita dari kelompok jurnalis, dengan penulis berita yang masuk kategori content creator tersebut. Tugas content creator ini salah satunya yaitu mendulang viewer:

“Rata-rata dari bagian khusus yang menemukan rumusan untuk mendulang viewer, seperti yang saya sampaikan, ada tim khusus yang di Yogya untuk itu....untuk orientasi orientasi lain gitu satu payung, tapi sekarang lagi kita lokalisir, kita bikin subdomain namanya berita hits di situ itu ada timnya sendiri koordinatornya sendiri. Akhirnya saya sampai di bawah redaksi repot, jadi nggak bisa dibedain, paling kita memesannya tuh mereka itu kita kasih rambu-rambu soal pemberitaan yang bisa mendiskreditkan perempuan. Sama yang soal LGBT dikarenakan banyak yang di sosmed kan nggak ada yang seperti itu tuh. Bagaimana posisi editor kan itu pasti ada, dari situ kita juga jaga agar ada sensitivitasnya terhadap kelompok Marginal ini. Jangan sampai karena mereka juga malah menyebutkan untuk kita, lalu ada yang melanggar aturan. Berarti walaupun namanya content creator dan juga ada unsur keredaksian “

- (Reza Gunadha, Asisten Redaktur Pelaksana Suara.com)

Posisi content creator ini memiliki berbagai kebijakan sendiri yang tidak bisa dicampuri oleh pihak redaksi, meskipun mereka juga menulis berita.

Kompas.com mengatakan bahwa kondisi media online memang memiliki ciri khas tersendiri yang membutuhkan banyak sekali klik dari pembacanya, walau Kompas.com menolak penggunaan istilah clickbait, karena menurutnya clickbait itu berbeda dengan clickable sebagai bagian dari kebijakan Kompas.com

“Clickbait haram, clickable harus. Kami membedakan antara clickable dan clickbait. Clickbait itu adalah berita-berita Yang yang membohongi publik. Sementara clickable itu harus, karena naturenya platform Online berita harus diklik maka kita harus clickable, dan itu ada cara-caranya yang kami

merumuskan sendiri. Apabila berita yang gak diklik itu berarti penyampaian pesan atau penulis gagal karena pesannya nggak sampai. Para penulis harus tahu, kalau kita menulis dengan gaya koran itu nggak ke clickable. Padahal itu mungkin pesan bagus, jadi pesan yang bagus harus sampai.”
- (Johanes Heru Margianto, Redaktur Pelaksana Kompas.com)

Penulisan pemberitaan di Kompas.com memang relatif sangat bervariasi, di sisi penggunaan advertorial, apabila kita cermati lebih lanjut di websitenya, maka tampak jelas Kompas.com juga menggunakan penulisan gaya jurnalistik untuk berbagai kepentingan pemasaran. Misalnya saja seperti : Brandview (produk advertisement bersifat soft selling dan edukatif yang digarap menggunakan standard jurnalistik dan gaya bahasa Kompas.com., Kilas (produk turunan brandzview untuk memperkenalkan potensi pemerintah daerah, kementerian, dan instansi BUMN), Jixie (menawarkan pilihan berita yang disesuaikan dengan minat dan ketertarikan pembaca), dan lain-lainnya.

Penggunaan metode penulisan jurnalistik namun dengan pendekatan menarik klik dari pembaca melalui content creator ini, juga dijalankan oleh Liputan6.com

“Iya kami punya 2 content creator, satu untuk iklan, satu di Jogja. Content creator ini agak baru karena kan tuntutan SEO, algoritma Google, dll itu membuat kita harus punya content creator.”
- (Elin Yunita Kristanti, Wakil Pemimpin Redaksi Liputan6.com)

Secara nyata kemudian harus diakui bahwa media online menjadi relatif “rapuh” kemandiriannya ketika dihadapkan pada persoalan mengejar jumlah klik dari pembacanya. Menyajikan berita yang independen, memberikan pemahaman pada masyarakat atas keberagaman, serta upaya menyajikan

berita yang memberi ruang cukup pada kelompok minoritas, khususnya “LGBT”, menjadi tertatih-tatih ketika semuanya harus diukur pada “selera masyarakat”.

Konsep menghadirkan content creator ini juga ada di suara.com, karena ada beban untuk mendulang klik seperti dihadapi media-media online yang lain, walaupun ada ketentuan yang tidak tertulis seperti tidak boleh menuliskan soal sadisme, dll

Kompleksitas media online mengejar jumlah klik pembaca secara detail digambarkan oleh Redaktur Pelaksana Kompas.com

“Ketika ada ledakan di Thamrin, maka pergi ke Google ketik deh; bom Thamrin, Nah apa konteksnya dengan dengan berita yang banyak? Nah pertarungan untuk memenangkan Google itu memerlukan kuantitas berita, karena cara algoritma bekerja itu saling meniban, maka ketika ada 10 berita yang sama belum tentu semuanya dinikmati oleh kita seorang, bisa jadi ada satu menemukan di Facebook, ada satu menemukan di Google, ada yang menemukan di WhatsApp, ada satupun menemukan di mana, sehingga itu adalah cara kami menjangkau audiensi dengan berita yang sama. Kalau saya melihat itu tidak bisa dikatakan sebagai ‘ini kok beritanya dieksploitasi banget sih’ misal ada seribu berita, siapa yang sanggup menelan semua berita di Kompas.com, itu baru satu media online. Belum lagi kalau kita ngomong Pikiran Rakyat maka sehari 20.000 berita, maka orang akan menyeleksi dengan cara sendiri untuk mendapatkan berita. Pertarungan di Google itu menyebabkan kuantitas berita itu perlu ditambah. Dan juga begini polanya ada orang yang lihat berita pagi, ada orang yang, ada yang siang, ada yang lihat berita sore, ada yang malem, ada besoknya yang sering terjadi berita yang populer hari ini itu adalah berita-berita

yang kita juga nggak tahu gimana itu terjadinya. Kalau di online kan ada Google analytics ya Yang bisa lihat berita yang lagi dibaca hari ini , dan justru biasanya berita yang lagi di baca di Google analytics kebanyakan berita kemarin bukan berita hari ini. Saya sendiri nggak tahu bagaimana perjalanan diseminasi informasinya sehingga berita-berita kemarin yang kemudian populer dan bisa di duplikasi tadi, kira-kira suasananya di dunia persilatan online”

- (Johanes Heru Margianto, Redaktur Pelaksana Kompas.com)

Ketergantungan media pada klik atau hal viral justru menjadikan media semakin pasif. Media pun tak memiliki kekuatan lagi untuk mempengaruhi agenda publik karena mengejar selera pasar dan bahkan memunculkan perpecahan. Dalam beban berita yang banyak setiap hari ini menjadikan jurnalis tidak punya waktu untuk melakukan analisis kritis dan cenderung memilih narasumber dari figur publik, otoritas pemerintah, humas, dan bahan percakapan di media sosial (Imaduddin., F, 2018). Media massa pun semakin gagal untuk memenuhi fungsi pendidikan dan kontrol sosial dengan minimnya ruang diskusi atau training kepada jurnalisnya.

Dari hasil riset di lapangan kemudian didapatkan bahwa meskipun Tempo.co berusaha tetap tegas memberlakukan pagar api antara pemberitaan jurnalistik dengan penggunaan pendekatan jurnalistik untuk menarik iklan, maupun klik, namun saat ini Tempo.co juga sudah menggunakan penulis informasi yang bersifat sebagai content creator.

“Untuk personil redaksi ya di kami memang ada semacam pembedaan dalam tanda petik ya antara redaksi gitu yang sehari-hari menulis news atau berita, dengan konten kreator yang dalam hal ini mereka mengejar isu-isu yang sedang trending ya, karena kita menyadari betul bahwa orang itu mengakses situs tempo.co tidak hanya untuk mencari

berita, tetapi juga mencari informasi begitu ya. Inikan resep yang juga dianut oleh banyak media. Untuk yang news otomatis temen-temen redaksi yang mengejar ya, temen-temen reporter di lapangan yang di Tempo.co jumlahnya tidak banyak, sekitar 16 sampai 20 orang begitu ya itu jumlah personilnya. Sementara teman-teman yang sifatnya content creator itu untuk mengemas ulang Berita sehingga kemudian yang menonjol adalah informasinya, mereka spesialis membuat apa namanya konten yang terkait dengan isu yang atau yang terkait dengan historical date, seperti hari pahlawan, peristiwa G 30 S. Sesuatu yang banyak dibicarakan tapi sebenarnya kalau dari sisi berita kan tidak ada lagi, tidak memiliki nilai berita, peristiwa ini sudah lampau dulunya“

- (Anton Septian, Redaktur Eksekutif Tempo.co)

Hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian lebih adalah jumlah jurnalis di lapangan yang relatif sedikit, namun mendapatkan beban untuk melakukan liputan lapangan dalam jumlah banyak, yaitu rata-rata 10-12 berita perhari. Secara umum hal ini menjadikan para jurnalis cenderung dikejar jumlah kuantitas berita, dan kemudian sangat bisa terjadi melupakan kualitas pemberitaan yang dihasilkan.

Kompas.com menyatakan rata-rata jurnalisnya mengirimkan liputan sebanyak 4-10 berita/hari, tergantung dari masing-masing desk pemberitaannya, serta perlu tidaknya riset di lapangan. Sementara Tempo.co juga rata-rata mewajibkan reporternya menyetorkan 10 berita sehari minimal:

“Reporter rata-rata 10, mengirimkan 10 berita setiap hari. Semakin banyak makin bagus gitu ya, makin banyak makin bagus isinya kemudian apa kelanjutan ceritanya lebih banyak dan kesempatan untuk mendapatkan traffic gitu aja ya, matematikanya seperti itu rata-rata kalau tempo.co “

Abdul Manan dalam wawancaranya dengan Ross Tapsell sebagaimana dikutip dalam buku ‘Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital’ mengatakan bahwa perubahan budaya reportase harian untuk jurnalis dan editor disebabkan karena media hanya menginginkan klik untuk mendapatkan iklan daring. Dalam pemberitaan yang berkaitan dengan komunitas ‘LGBT’ sistem seperti ini berpotensi meminggirkan komunitas gender dan seksual ‘non-normatif karena ruang redaksi akan menyingkirkan berita penting dan edukatif, dan hanya memproduksi berita yang menarik bagi pembaca.

Tapsell, R. (2017) mengatakan bahwa media daring memiliki kecenderungan untuk mendaur ulang berita yang menarik bagi pembaca untuk mendulang klik sebanyak-banyaknya. Di media daring, cara untuk melihatnya mudah, biasanya di halaman utama situs mereka akan muncul rubrik semacam “Berita Populer”, “Tag Populer”, “Komentor Terbanyak”, “Populer”, dll. Sehingga dalam pemberitaan terkait ‘LGBT’, jika pembaca lebih banyak mengklik berita yang mengandung ujaran kebencian terhadap LGBT, maka media akan memperluas ujaran kebencian tersebut.

Imaduddin, F. (2018) dalam artikel berjudul “Kegagapan Digital dan Bunuh Diri Perlahan Jurnalisme “ mengatakan bahwa tanggung jawab kuota berita yang banyak pada jurnalis menjadi salah satu hal yang mendorong mereka memaksakan berita untuk berebut remah iklan yang semakin sedikit.

Di sinilah kemudian terasa bahwa kehadiran sejumlah media online dalam pemberitaan lebih sering kemudian berpatokan pada upaya mengejar jumlah klik. Sebuah kondisi yang kontra produktif apabila dikaitkan dengan tugas dan fungsi pokok media massa dan pers sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia selain pilar eksekutif/pemerintah, legislatif/DPR, dan pilar yudikatif/kehakiman.

4.2. Kebijakan Redaksi Untuk Pemberitaan ‘LGBT’

Model pemberitaan di media daring yang berorientasi pada klik ini diperburuk dengan tidak adanya kebijakan redaksi dalam pemberitaan terkait gender dan seksual ‘non-normatif’. Dalam wawancara dengan Kompas.com, mereka menyatakan tidak mempunyai kebijakan khusus soal LGBT, karena pada dasarnya peliputan LGBT sama dengan peliputan yang lain, yaitu muaranya pada kemanusiaan dan yang penting tidak mendiskriminasi pihak tertentu.

“Kami tidak melihat LGBT sebagai apa ya sebagai sesuatu yang berbeda sehingga harus dipandang sebagai sesuatu yang lain. Dalam pertimbangan yang umum, sama dengan yang lainnya bahwa pemberitaan itu sebaiknya tidak mendiskriminasi siapapun yang menjadi objek pemberitaan.”
- (Johanes Heru Margianto, Redaktur Pelaksana Kompas.com)

Walaupun diakui, kebijakan atau panduan khusus untuk pedoman pemberitaan kemanusiaan dan tidak mendiskriminasi ini sampai sekarang belum dimiliki oleh Kompas.com. Heru Margiyanto menyebut aturan ini seperti disepakati secara tidak tertulis karena sering didiskusikan di rapat redaksi dan briefing redaksi.

Media daring lainnya, yakni Tempo.co mengaku punya kebijakan untuk pemberitaan terkait “LGBT”. Anton Septian, Redaktur Eksekutif Tempo.co mengatakan bahwa pemberitaan terkait “LGBT” memiliki porsi yang sama dengan isu kelompok marginal lainnya, seperti disabilitas. Walau kebijakan itu tidak tertulis, Tempo menyebut bahwa mereka memberikan ruang bagi pemberitaan untuk isu “LGBT.” Tempo.co dan koran Tempo memiliki durasi pemberitaan yang lebih pendek terkait isu “LGBT”, berbeda dengan Majalah Tempo yang memiliki durasi lebih panjang. Anton Septian, Redaktur Eksekutif Tempo.co menyatakan, ini dibuktikan dengan ada beberapa kasus persekusi terhadap LGBT yang terjadi di Indonesia, Tempo kemudian ikut memberitakannya.

“Seperti di majalah Tempo dan Koran Tempo ya tempo Itu memberikan ruang kepada kelompok-kelompok termasuk kelompok LGBT. Ini bisa terlihat sekali sikap redaksi mengenai isu-isu persekusi terhadap kaum LGBT seperti yang terjadi pada 2017, biasanya di waktu itu salah satu itu di Aceh ya, dan di beberapa tempat gitu. Bagaimana masyarakat dan juga kepolisian dia ternyata malah menjadi menjadi apa sarana atau alat oleh masyarakat yang tidak sesuai untuk kelompok kita, kemudian kita tidak cuma memberitakan, tapi juga mengkritisi kebijakan polisi tersebut, kita mengutip undang-undang dasar pada dasarnya apa setiap setiap orang itu berhak untuk tidak didiskriminasi setiap orang siapapun yang baik untuk kelompok minoritas dia berhak hidup dan apa namanya menjalankan apa yang tidak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif.”

- (Anton Septian, Redaktur Eksekutif Tempo.co)

Karena belum punya kebijakan tertulis soal ini, awak Tempo selalu membaca pedoman pemberitaan media siber. Meski demikian, isi pedoman pemberitaan media siber ini belum ada aturan khusus soal isu minoritas seperti “LGBT”. Hal lain yang dilakukan Tempo seperti diungkap Anton Septian, jika ada pemberitaan mengenai kasus, maka Tempo mencari cara agar narasumbernya adalah orang yang berada di lapis pertama peristiwa, dan mencari keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

Liputan6.com, dalam konteks pemberitaan terkait “LGBT” mengaku tidak punya kebijakan khusus. Secara umum, mereka menyebut membuat peliputan soal “LGBT” dari sisi kemanusiaan dan bukan untuk memperoleh posisi “LGBT”.

“Kalau utk LGBT sendiri, dukungan atau tidak mendukung itu pilihan pribadi, tapi untuk kebijakan kantor adalah kita

memperlakukan LGBT itu sama dengan manusia lainnya, artinya ada hak-hak mereka yang tidak bisa kita diskon hanya karena mereka memilih gender ketiga itu. Atau kita juga menghargai mereka hak mereka sebagai manusia. Kami pernah membuat kayaknya feature-nya mereka, dan kita memperlakukan mereka dengan hormat, kita tidak memperlakukan mereka dengan olok-olok. “

- (Elin Yunita Kristanti, Wakil Pemimpin Redaksi Liputan6.com)

Demikian juga dengan Suara.com, Reza Gunadha menyatakan, Suara.com tidak punya kebijakan khusus dalam peliputan untuk isu “LGBT”.

Dalam wawancara kami, meski beberapa pemangku kebijakan media mengaku memiliki panduan peliputan umum, tapi media tidak berkenan memberikan aturan tersebut kepada tim peneliti karena aturan penulisan ini dianggap sebagai rahasia perusahaan.

4.3. Pos Khusus Kepolisian dan Kebutuhan Kecepatan

Dalam pemberitaan “kriminal” soal “LGBT” di media daring, peneliti menemukan bahwa media online masih menjadikan polisi sebagai narasumber utama pemberitaan. Dalam kasus persekusi pesta Gay di Kuningan, Jakarta misalnya, media menjadikan polisi sebagai narasumber utama dalam peristiwa tersebut.

Shinta Maharani, jurnalis Tempo menyatakan, alasan menjadikan polisi sebagai narasumber utama ini seringkali karena selama ini karena banyak media meyakini, polisi adalah otoritas pengambil kebijakan atas peristiwa-peristiwa kriminal. Shinta Maharani juga mengakui bahwa mestinya media juga menjadikan kelompok “LGBT” sebagai narasumber penting atau

narasumber utama, seperti pendamping atau tim advokasi komunitas “LGBT”, karena mereka adalah subjek yang mengalami kekerasan, namun ternyata ini tak banyak dilakukan media. Penyebabnya antara lain, karena jejaring dengan polisi yang sudah lama terbangun dengan media. Hal ini terlihat dari jurnalis yang ditempatkan pada pos-pos khusus kepolisian, sehingga kepercayaan pada polisi jadi demikian tinggi dalam peristiwa-peristiwa kriminal.

“Pos kriminal khusus sudah lama dibangun media dengan kepolisian, jadi ini yang menjadikan polisi sebagai narasumber utama, karena networkingsnya sudah terbangun lama.”

- (Shinta Maharani, jurnalis Tempo)

Maka tak heran jika dalam kasus persekusi pesta di Kuningan misalnya, banyak media yang menjadikan polisi sebagai narasumber utama, dan menjadikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi sebagai satu-satunya fakta dan data penting untuk ditulis media ketika berita ini pertama kali dilansir. Ini juga yang menyebabkan polisi menjadi pihak yang punya otoritas penting untuk memenuhi kebutuhan kecepatan dalam penayangan pemberitaan. Shinta Maharani mengungkap penyebab lainnya, yakni karena selama ini masih ada anggapan bahwa “LGBT” adalah kelompok yang dinilai menuai kontroversi oleh pengambil kebijakan seperti pemerintah. Selain itu, media masih menganggap bahwa keberadaan “LGBT” menyalahi agama dan norma sehingga banyak media yang tidak menjadikan “LGBT” sebagai narasumber atas peristiwa yang menimpa mereka.

Shinta Maharani punya pengalaman, dalam banyak peliputan yang ia lakukan, ada seperti rasa trauma yang dimiliki oleh kelompok “LGBT” karena sensasionalisme yang sering dituliskan media tentang “LGBT”. Kondisi ini menjadikan banyak kelompok LGBT yang kemudian memilih untuk tidak terlalu terbuka dengan jurnalis, karena mereka khawatir, jika terbuka pada jurnalis, maka informasi yang dituliskan akan sensasional dan bisa berakibat pada perundungan terhadap “LGBT”.

Reza Gunadha dari Suara.com juga menyatakan hal yang sama, bahwa peliputan kriminal yang terjadi pada “LGBT”, misalnya dalam persekusi pesta di Kuningan, masih menunjukkan bahwa media masih menjadikan polisi sebagai narasumber penting atau otoritas utama. Ini disebabkan karena media menganggap polisi adalah pihak penting yang mempunyai data yang dibutuhkan media. Kebutuhan lain, Suara.com tidak mau ketinggalan dalam menuliskan berita, karena jika mereka tidak menuliskan data yang dikeluarkan polisi, sedangkan media lain menuliskannya, jurnalis menyebutnya dengan istilah kebobolan berita.

Walaupun begitu, Reza mengatakan, mereka tetap mewawancarai pihak-pihak lain yang mengeluarkan data pada keesokan harinya setelah polisi melansir BAP nya. Dalam kasus persekusi pesta di Kuningan, Suara.com menulis organisasi masyarakat sipil yang mengeluarkan pers release beberapa hari kemudian. Reza mengatakan bahwa saat ini media membutuhkan kecepatan dalam menuliskan berita, jika organisasi masyarakat sipil terlambat merespon, maka media akan terlambat menuliskan. Media daring memiliki kebutuhan kecepatan dalam menyajikan berita untuk masyarakat. Tempo, meski memberitakan polisi sebagai pihak yang punya otoritas dalam peristiwa kriminal terhadap “LGBT”, mereka mengaku juga akan melakukan wawancara pada kelompok seperti “LGBT” untuk mendengarkan suara-suara mereka. Tidak hanya dalam pemberitaan, Tempo juga memberikan suara pada kelompok marginal seperti “LGBT” dalam acara yang digelar Tempo secara luring seperti dalam ulangtahun Tempo

“Kita mengkritisi apa namanya menyempitnya ruang kebebasan sipil di zaman pemerintahan Jokowi oleh karena itu apa kita kemudian mengangkat mereka yang berasal dari kelompok rentan dan minoritas yang biasanya merupakan korban utama dari menyempitnya ruang kebebasan sipil tersebut bagi dia untuk bersuara karena mungkin bagi kelompok mayoritas ketika ruang kebebasan yang terlalu terasa bagi kelompok-kelompok itu akan sangat terasa dan

membuat guncangan yang membuat mereka makin rentan terhadap persekusi gitu dan lain-lain kita coba angkat tema yaitu menyempitnya ruang kebebasan sipil tema-tema hari yang mana kemudian kita minta temen-temennya yang dirugikan oleh oleh situasi tersebut.”

- (Anton Septian, Redaktur Eksekutif Tempo.co)

Elin Yunita Kristanti dari Liputan6.com mengakui, menjadikan polisi sebagai narasumber utama dalam peliputan kriminal yang terkait dengan komunitas “LGBT” pernah menjadi perdebatan mereka di ruang redaksi. Maka kemudian, redaksi memutuskan untuk juga melakukan wawancara pengamat. Elin mengaku bahwa mereka kesulitan untuk melakukan wawancara terhadap LGBT.

“Iya itu jadi bahan perdebatan luar biasa di internal kami ya, dan waktu itu memang narsumnya dari polisi. Kami juga mewawancarai beberapa pengamat. Kalau wawancara korban itu agak sulit karena mereka belum tentu mau bicara, kalau mau pun, sulit, gak dapat akses untuk wawancarai mereka. Jadi kami wawancarai pengamat, atau anggota DPR yg menyuarakan hal berbeda dari narasi kepolisian.”

- (Elin Yunita Kristanti, Wakil Pemimpin Redaksi Liputan6.com)

Jadi polisi masih merupakan otoritas penting dalam pemberitaan kriminal yang menimpa LGBT. Padahal dalam Laporan Bahaya Akut Persekusi LGBT yang dipublikasi oleh LBH Masyarakat (2018), aparat penegak hukum merupakan pelaku persekusi terbanyak kedua setelah Ormas. Listiorini, D. (2020) menemukan bahwa pada kasus pemberitaan “LGBT” pada empat media daring arus utama menunjukkan bahwa mayoritas narasumber berita yang dipilih merupakan pihak yang tidak mendukung “LGBT.”

Hal lain, walau beberapa media mengatakan bahwa semua peristiwa dan narasumber diposisikan secara sama, namun tak semua media ternyata menempatkan pihak-pihak sebagai jejaring dalam pemberitaan. Menempatkan polisi dalam pos khusus di media mengartikan bahwa media menempatkan polisi sebagai jejaring yang penting dan mempunyai otoritas. Hal ini akan terjadi masalah ketika ada peristiwa kriminal yang terkait dengan komunitas “LGBT”. Media menempatkan polisi sebagai narasumber utama dan menjadikan peristiwa kriminal yang ditempatkan sebagai peristiwa ‘biasa’ tanpa melakukan konfirmasi pada narasumber yang memiliki identitas gender dan seksual “non-normatif”. Hal ini menjadikan peristiwa tersebut seolah memiliki bobot yang sama. Ini menjadi bukti bahwa dalam pekerjaannya, jurnalis belum menempatkan bobot yang setara dalam melakukan penelusuran kasus hingga penulisannya.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya media mempunyai kebijakan redaksi dengan memberikan keberimbangan pada narasumber, dalam hal ini misalnya pada komunitas “LGBT”.

4.4. Pelatihan Khusus untuk Isu “LGBT”

Sejauh ini hampir semua media yang diwawancara oleh tim Konde.co tidak mempunyai kebijakan khusus untuk menyelenggarakan pelatihan soal “LGBT”. Wakil Pemimpin Redaksi liputan6.com Elin Yunita Kristanti menyatakan biasanya redaksi menyerahkan pelatihan-pelatihan ini ke organisasi jurnalis yang kerap memberikan pelatihan-pelatihan.

“Kalau pelatihan khusus yang kita lakukan, tidak. Tapi ada beberapa temen-teman ikut Aliansi Jurnalis Independen/ AJI, ikut organisasi profesi lain, mereka ikut pelatihan dari situ. Kalau pelatihan internal itu memang gak ada, apalagi sekarang lagi zaman pandemi ya. Kalau dulu itu kita sering

mengundang orang lain, liputan 6 salah satu yang membuka kaum minoritas, seperti Ahmadiyah, kami ajak diskusi, kami tanyakan pertanyaan, kalau untuk LGBT terus terang belum pernah. Selama 2 tahun ini memang belum pernah ya, jadi kami memang menggantungkan kepada teman-teman AJI, dan organisasi profesi lainnya untuk pelatihan isu-isu terkait.”
- (Elin Yunita Kristanti, Wakil Pemimpin Redaksi Liputan6.com)

Suara.com menyatakan pernah menyelenggarakan pelatihan pasca mendapatkan kritik atas pemberitaan “LGBT” dalam sebuah diskusi mengenai media dan “LGBT” yang diselenggarakan AJI Jakarta. Sejak peristiwa itu mereka mengaku sangat berhati-hati dalam memberitakan. Mereka juga mengundang aktivis “LGBT” dan gender untuk memberikan pemahaman soal ini di ruang redaksi pasca kritikan tersebut diberikan. Hanya saja, hasil penelitian analisis bingkai media menunjukkan Suara.com masih melakukan peminggiran dan stigma terhadap komunitas “LGBT” dalam pemberitaannya. Saat wawancara dengan peneliti, Suara.com mengaku masih memiliki pekerjaan rumah, salah satunya yakni , menyamakan persepsi soal isu-isu tersebut dengan jurnalis Suara.com di daerah-daerah dan para *content creator*. Salah satu cara yang mereka lakukan yakni mengundang jurnalis di daerah untuk hadir ke Jakarta untuk mengetahui pemahaman yang sama soal isu tertentu, antara lain mengenai “LGBT”.

4.5. Kesimpulan

Menempatkan posisi berita tentang “LGBT” sama dengan berita lainnya, merupakan salah satu kebijakan media yang luput atau tak bisa dilakukan oleh media dalam pemberitaan “LGBT.” Demikian juga menyerahkan berita kriminal atas kasus “LGBT” pada otoritas polisi juga menandakan bahwa ada porsi khusus yang diberikan media pada polisi dan tidak pada porsi suara “LGBT”. Padahal dalam Laporan Bahaya Akut Persekusi LGBT yang dipublikasi oleh LBH Masyarakat (2018), aparat penegak hukum merupakan pelaku persekusi terbanyak kedua setelah Ormas. Listiorni, D. (2020) menemukan bahwa pada kasus pemberitaan “LGBT” pada empat media daring arus utama menunjukkan bahwa mayoritas narasumber berita yang dipilih merupakan pihak yang tidak mendukung “LGBT.”

Hal lain, kebijakan tak mau kebobolan berita seringkali menempatkan posisi polisi sebagai narasumber penting atau otoritas utama dalam kasus yang melibatkan “LGBT” karena menganggap polisi sebagai otoritas yang mempunyai data atas kasus “kriminal LGBT”. Hal ini terjadi karena kebutuhan klik dan kebutuhan kecepatan dalam pemberitaan. Soal kebutuhan kecepatan dan klik ini selanjutnya menjadikan media sebagai pihak yang tidak kritis terhadap pemberitaan, melihat peristiwa dari satu sisi, dan tidak mencoba melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda, yaitu dari “LGBT,” misalnya dengan mengetengahkan “LGBT” sebagai narasumber pertama dalam peristiwa tersebut.

Peneliti juga melihat ada ketidakadilan yang terkait dalam melihat sebuah peristiwa atau kasus, karena seharusnya media membongkar makna-makna yang tersembunyi, melakukan pendekatan kritis yang mengkaji kondisi material dan sistem ideologi yang mereproduksi struktur dalam hal ini polisi, dan menekankan bahwa tidak ada hal yang netral atau bebas nilai dalam kondisi ini.

Peneliti juga melihat bahwa sejumlah media kemudian menempatkan redaksi sebagai pihak yang menentukan, termasuk polisi sebagai pihak yang berkuasa atas penyajian data-data. Kekuatan dari kekuasaan yang mengalir dari 'atas ke bawah' senantiasa memproduksi seperangkat makna dan identitas sosial yang berfungsi melayani status quo.

Hal lain, menyerahkan bentuk-bentuk pendidikan seperti pelatihan pada organisasi jurnalis dan tidak menempatkan media sebagai sumber penting dalam memberikan pendidikan pada jurnalisnya, juga menjadi pekerjaan rumah dimana media seharusnya mengambil peran penting dalam memberikan pengetahuan pada jurnalisnya. Produksi pengetahuan merupakan hal yang harus dilakukan media, karena media, dengan kekuatan produksi yang dimilikinya (jurnalis, reporter, editor, dan sebagainya) menjadi semacam agensi yang mampu memproduksi "sebuah pengetahuan". Representasi tentang berita homoseksual di media massa akan mengacu pada realitas masyarakat, kebijakan dan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat tersebut. Bila nilai-nilai masyarakat sebagian besar menganggap bahwa homoseksualitas itu adalah hal yang salah, maka media massa pun tidak akan jauh mengonstruksinya seperti demikian. Kriminalisasi kelompok homoseksualitas tidak hanya terjadi di media massa di Indonesia. Media seharusnya mengambil peran penting dalam pendidikan dengan memberikan pengetahuan pada jurnalis.

BAB 5

Menyisik Masa Depan Jurnalis LGBTQ

Disclaimer: BAB ini berisi tentang pengalaman 6 jurnalis yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari komunitas 'LGBT'. Demi keamanan narasumber dalam penelitian ini, tim peneliti Konde.co merahasiakan identitas berupa nama dan media tempat bekerja dari 6 orang jurnalis ini. Adapun kode yang akan digunakan oleh peneliti yakni: JR 1, JR 2, JR 3, JR 4, JR 5, dan JR 6.

Kode Jurnalis	Bentuk Media Tempat Jurnalis Bekerja
JR 1	Media arus utama
JR 2	Media alternatif
JR 3	Media arus utama
JR 4	Media alternatif
JR 5	Media arus utama
JR 6	Media arus utama

Kartika Sihombing (2020) dalam tesisnya menuliskan bahwa kondisi komunitas 'LGBT' di Indonesia belakangan ini, khususnya pada komunitas transpuan semakin memburuk. Kondisi ini terjadi karena masyarakat Indonesia masih mengalami ketakutan dan menolak keberadaan identitas gender dan seksual di luar sistem heteronormatif. Penolakan ini pada akhirnya membuat komunitas "LGBT" menjadi kelompok rentan. Dalam buku Kelompok Keragaman Seksual dan Gender di Tengah Pusaran Pandemi:

Antara Kerentanan dan Resiliensi (2021) yang ditulis oleh Arief Rahadian, dkk, diskriminasi yang dialami oleh kelompok “LGBT” ini pada akhirnya membawa dampak yang sangat signifikan bagi mereka. Bahkan, pandemi Covid-19 membuat kelompok “LGBT” di Indonesia menjadi target kekerasan, seperti yang dipaparkan dalam hasil studi yang dilakukan oleh Crisis Response Mechanism (CRM).

Dalam wawancara dengan para pemangku kebijakan, mereka mengaku bahwa redaksinya sudah inklusi, seperti yang dikatakan oleh pemangku kebijakan di CNN Indonesia TV dan Liputan6.com.

“Kami tidak ada diskusi secara terbuka dengan teman-teman redaksi yang mengidentifikasi diri sebagai “LGBT”. Kami sudah punya acuan, jadi soal pemberitaan ya diskusinya pasti akan berputar di situ. Karena saya sendiri tidak tahu siapa teman-teman yang orientasi seksualnya “LGBT”. Tetapi sepanjang kinerja dan kemampuannya beradaptasi baik, posisinya sama saja dengan karyawan yang lain.”

- (Dewi Safitri, CNN Indonesia TV)

“Kita cukup berhati-hati agar tidak memaksa jurnalis untuk coming out. Jadi memang ada yang terbuka mengidentifikasi diri sebagai “LGBT”, tapi bukan berarti terbuka dia coming out begitu ya. Jadi kalau memang yang bersangkutan ingin membicarakan, kita terbuka, kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak perlu menjadi bahan pembicaraan. Jadi kalau ada liputan terkait isu “LGBT”, biasanya kami mengikuti pedoman yang kami punya. Tidak ada treatment khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan ini. Sejauh ini berita yang kami angkat tidak ada yang sangat spesifik sehingga membutuhkan istilah, tetapi sebisa mungkin memang kita di sini menghargai kehidupan pribadi masing-masing yang bersangkutan.”

- (Yunizar, CNN Indonesia TV).

“Bagi kami mereka sama seperti lainnya, kalau mereka enggak memiliki pengetahuan terkait itu, ya enggak akan kami ajak berdiskusi. Menurut kami, dia sama seperti yang lain. Tidak menganggap mereka istimewa, jadi sama seperti dengan yang lainnya. Sejauh ini tidak ada juga bullying di internal redaksi bagi kawan-kawan yang mengidentifikasi dirinya sebagai “LGBT”.”

- (Elin Yunita Kristanti, Liputan6.com)

Meskipun para pemangku kebijakan media mengatakan bahwa mereka telah inklusif gender, nyatanya para jurnalis masih merasakan bahwa redaksi belum sepenuhnya inklusi seperti yang dialami oleh JR 3 dan JR 5.

“Sejauh ini sih mereka tidak pernah bertanya tentang identitasku, bertanya tentang materi yang sedang aku bicarakan dan aku kerjakan itu iya, tetapi mereka tidak bertanya secara pribadi. Hanya saja, mereka sering bertanya kalau aku pakai kuteks hitam, mereka selalu bertanya kenapa aku suka pakai kuteks. Jawabanku, ‘memangnya kenapa? Kan kuteks enggak punya gender juga kan.’” (JR 3).

“Kalau secara kelembagaan, mediaku menampilkan dirinya sebagai media progresif, tapi ada kultur homofobia di newsroom yang kemudian termanifestasi dalam jokes seperti, ‘ah banci lo, buruan!’, ‘buruan kejar [beritanya], jangan kayak banci!’. Jokes transfobia ini ada yang kemudian masuk ke dalam kebijakan. Salah satu hal yang aku ingat, salah satu atasanku ada yang membawa keberimbangan jurnalisme untuk melanggengkan berita yang menyudutkan “LGBT”.” (JR 5).

Keberimbangan ini dijelaskan lebih lanjut oleh informan dengan memberikan kisah sebagai berikut.

“Dulu aku ingat ada satu kejadian memilih berita dari kontributor, aku menaikkan berita utama, kemudian ada salah satu kontributor dari Bandung, saat itu tahun 2016 sedang hangat peristiwa SGRC UI yang kemudian merembet kemana-mana, lalu kontributor itu mengirim berita tentang kelompok ormas meminta Gubernur Jawa Barat untuk ngebanned kegiatan “LGBT”. Itu berita ludah banget, konteks peristiwa juga tidak jelas. Ini kayak wartawan, datang ke gedung ormas, lalu minta komentar dan komentarnya generik, jadi enggak aku naikin. Lalu atasanku bilang, satu jam sebelumnya kan aku menaikkan berita dari Arus Pelangi, memberikan ruang bersuara untuk mereka, dia bilang, ‘kamu jangan mentang-mentang pro “LGBT” lalu berita kayak gini [berita dengan narasumber ormas fundamentalis] enggak dinaikkan’. Menurut dia suara yang berseberangan [menolak “LGBT”] harus dinaikkan. Nah waktu itu aku agak conflicted dan dia terus membentak dan nunjuk-nunjuk muka.” (JR 5)

Bentuk keberimbangan yang memberi ruang bagi kelompok yang menentang “LGBT” ini menurut Listiorini, D. (2020) merupakan bentuk kepanikan moral yang homofobia di ruang redaksi. Media turut andil dalam menyebarkan rasa takut dan ancaman pada masyarakat terkait keberadaan komunitas “LGBT”. Media menempatkan “LGBT” sebagai komunitas yang tidak sesuai dengan norma agama dan nilai sosial di Indonesia.

Kondisi ruang redaksi media arus utama yang homofobia ini pada akhirnya memicu trauma pada jurnalis. JR 4 menceritakan kepada peneliti bahwa Ia memilih untuk bekerja di media yang fokus pada isu gender dan seksualitas karena teringat pengalaman kawan kuliahnya semasa magang.

“Aku sudah fokus ke isu gender dan seksualitas sejak masa kuliah. Kebetulan waktu itu aku memang magang di media yang fokusnya sudah di isu gender. Nah, pas aku tanya dengan

kawanku yang magang di media arus utama, kebetulan ada kawanku yang lesbian memilih untuk magang di situ, dia dipaksa untuk menulis berita “LGBT” yang tidak inklusi. Pada akhirnya dia terpaksa menulis karena disuruh. Banyak sekali kawanku yang menceritakan pengalamannya ini. Jadi mereka melawan identitas mereka sendiri di medianya. Jadi kemudian aku memilih bekerja juga di media yang fokus di isu inklusi.” (JR 4)

Meskipun JR 4 merasa bahwa media tempat ia bekerja sudah inklusi, tapi melihat kondisi jurnalis di media arus utama yang terpaksa berhadapan dengan sikap diskriminatif, ia menyadari bahwa inklusi tidak otomatis hadir di ruang redaksi dan justru menjadi hal yang harus diperjuangkan. Kesadaran ini juga tergambar dalam wawancara dengan JR 1, ia memang tidak mengalami kendala atau mendapatkan batasan tertentu ketika hendak membuat karya jurnalistik terkait isu “LGBT”, tapi ketika di lingkup personal, ia memilih untuk membangun batasan dengan rekan sekantornya.

“Pada dasarnya kita enggak bisa percaya dengan semua orang, pandangan mereka berbeda-beda. Pada dasarnya ya aku berteman saja dengan semua orang di sini, dan aku akan lihat-lihat dulu mana orang yang bisa diajak berdiskusi terbuka dan mana yang enggak bisa.” (JR 1)

Hal yang membuat pemahaman antar jurnalis berbeda dalam memandang keberagaman gender dan seksualitas adalah tidak adanya kelas gender di media. Hal ini tidak hanya dikatakan oleh para pemangku kebijakan media yang menjadi responden penelitian Konde.co, tetapi juga disampaikan oleh 6 jurnalis. Para jurnalis yang menjadi responden ini mendapatkan pengetahuan tentang keberagaman gender dan seksualitas sebelum bekerja di media.

“Aku sudah terbuka kalau aku bagian dari komunitas “LGBT” sejak tahun 2008/2009. Sebelum bekerja menjadi jurnalis aku aktif di LSM. Kalau dulu mereka tahu kalau aku lesbian. Lalu tahun 2012-2014 aku mengidentifikasi diri sebagai transmen. Aku menjadi jurnalis mulai tahun lalu, bulan Februari.” (JR2)

“Seingat saya, aku tidak pernah mendapat pelatihan terkait isu gender dan seksualitas selama bekerja. Jadi aku hanya membaca dan berdiskusi dengan banyak orang. Dulu sebelum di media yang sekarang, aku pernah bekerja di sebuah radio, waktu itu aku membawakan program tentang seksualitas dan partner on air-ku perempuan, suaminya HIV positif. Dari dia dan program itulah aku banyak bertemu dengan orang, berdiskusi dengan aktivis, selain tentu saja aku juga membaca ya.” (JR 3)

“Sebenarnya sebelum menjadi jurnalis di media ini aku sudah menjadi volunteer untuk lembaga yang fokus pada isu keberagaman gender. Mereka ini yang mendidik dan membuat aku belajar mengenai keberadaan komunitas transgender, kehidupan mereka di masyarakat. Dari situ aku terbuka dan paham dengan apa yang terjadi di sekitarku dan perjuangan mereka. Aku sadar bahwa komunitas transpuan adalah komunitas yang paling teropresi di masyarakat. Dari situ aku paham bahwa ada lingkaran kemiskinan karena identitas.” (JR 4)

Tidak adanya pengetahuan yang didapatkan para jurnalis ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan informasi antara satu jurnalis dengan jurnalis lainnya di ruang redaksi. Gauntlett, D. (2018) menyebut bahwa media massa masih menjadi salah satu tempat yang efektif untuk mempengaruhi masyarakat dalam melawan stereotip berbasis gender. Apabila menilik Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, salah satu fungsi pers adalah fungsi pendidikan dan kontrol sosial. Artinya, pers memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga bisa menekan angka diskriminasi di masyarakat terhadap kelompok tertentu, tak terkecuali terhadap komunitas “LGBT”.

Sayangnya, pemberitaan “LGBT” dalam pers di Indonesia masih banyak menggunakan bingkai agama dan normatif (Luviana, 2013). Media banyak menuliskan kebencian pemuka agama terhadap “LGBT” karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan dalam perspektif normatif, media menulis bahwa “LGBT” tidak bisa hidup di Indonesia karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Riset yang dilakukan Alinea (2018) menemukan bahwa media di Indonesia, baik itu media massa maupun media sosial, masih melakukan marginalisasi terhadap komunitas transgender, bahkan dianggap sebagai penyakit atau menyimpang. Hal itu terlihat dari sentimen negatif terkait komunitas transgender yang lebih tinggi (35,7%) dibandingkan dengan sentimen positif (17,32%), dan sisanya sebanyak 46,98% sentimen netral.

Benmetan, T. (2021) menganggap bahwa Indikator Sensitif Gender diperlukan agar jurnalis lebih peka gender dan isu terkait. Indikator ini juga diperlukan agar jurnalis tidak lagi menuliskan pemberitaan yang memberikan stereotip terhadap gender marginal. Hal inilah yang menjadi kekosongan di ruang redaksi di banyak media, tidak adanya buku putih atau panduan penulisan terkait isu gender, khususnya komunitas “LGBT”, sehingga tulisan yang muncul pun pada akhirnya berdasarkan pengetahuan masing-masing jurnalis saja.

5.1. Ruang Diskusi yang “Dibatasi” di Ruang Redaksi

Jurnalis menceritakan bahwa diskusi terkait isu “LGBT” di media masih “dibatasi”. JR 5 menceritakan pengalamannya yang sering dianggap tidak mau menulis isu lain karena kerap menulis isu keberagaman, termasuk keberagaman gender dan seksualitas.

“Aku kan sering menulis isu keberagaman, tapi editorku sering menganggap aku enggak mau menulis isu lain. Aku bukan enggak mau mengerjakan isu lain, tapi ya memang ini spesialisasiku. Kalau aku dibebaskan mengangkat isu, ya aku

akan mengangkat isu keberagaman. Aku kan enggak perlu menjelaskan ke orang soal identitasku dan kalau ada orang bertanya, aku akan menjawab, tapi enggak ada yang pernah bertanya. Ketika mengangkat isu keberagaman gender dan seksualitas, kita sebagai individu non cis selalu dituduh punya agenda, sementara ketika cis heteroseksual tidak mengangkat isu “LGBT” itu kan merupakan agenda juga untuk membungkam keberadaan komunitas “LGBT”. Aku sering ditegur ketika menulis isu keberagaman.” (JR 5).

JR 6 juga pernah menyampaikan keinginannya kepada media tempat Ia bekerja agar bisa memberitakan isu “LGBT” dengan lebih progresif. Hanya saja, media tempat JR 6 bekerja berdalih tidak ingin memancing keributan di publik dan menganggap bahwa pendekatan seperti ini adalah pendekatan yang pas meskipun tidak sempurna. Jurnalis menyebut, untuk membuat tulisan yang lebih progresif, medianya khawatir digeruduk oleh kelompok agama fundamentalis.

“Untuk melangkah menjadi lebih progresif, mediaku selalu mempertimbangkan bahwa kami ini bukan media yang dianggap kecil, berbeda dengan media progresif yang tidak terlalu mendapat perhatian publik dengan pemberitaan mereka. Redaksi menganggap bahwa media progresif itu tidak memengaruhi kebijakan, berbeda dengan media tempatku bekerja. Alasan redaksi untuk menjadi progresif itu harus ada beberapa pertimbangan, termasuk sampai mana dan sampai kapan kami bisa menyuarakan hal ini. Argumenku saat berdiskusi dengan mereka, ‘kita enggak akan maju kalau kita terus menghindari keributan’, karena kadang redaksiku menganggap bahwa perdebatan sedikit itu adalah sebuah keributan. Padahal untuk menjadi progresif itu kan melalui proses panjang, harus ada perbincangan terus menerus bahwa pemberian hak itu merupakan sebuah perlindungan. Kalau di Indonesia itu selalu dianggapnya kalau memberi hak berarti melecehkan agama. Padahal sebenarnya bisa saja

media tidak perlu sampai level yang sangat mengkonfrontasi, jika ada kasus dibuat sangat berapi-api. Bisa saja edukasi singkat.” (JR 6)

Namun, tak seperti JR 5 dan JR 6 yang menjabat sebagai reporter, hambatan berarti terkait ruang diskusi terbatas di media justru tidak dialami oleh JR 3 yang merupakan produser.

“Kalau program yang aku ampu itu ideku. Sebenarnya waktu itu kan nerjemahin aja media aku tuh pengen buat podcast kayak gimana. Podcast-nya ingin ngomongin HAM, bagian mana dari HAM yang kira-kira appealing gitu, yaudah jadi dibahas dari cinta, tapi cinta yang kayak gimana, yang belum banyak dinarasikan orang, yang belum dikasih kesempatan untuk diceritakan atau bercerita, jadi ya muncullah program itu. Dan kemudian program itu mendatangkan duit kan kantor juga senang, selama itu (duit:red) ada kayaknya mereka fine fine aja.

Dari hasil wawancara dengan JR3 dan kemudian membandingkannya dengan wawancara JR5 dan JR6, peneliti melihat ada faktor posisi struktural yang akan memengaruhi sejauh apa seorang jurnalis dapat dengan leluasa menyampaikan gagasannya terkait peliputan isu “LGBT” di redaksi media.

Memang tak semua redaksi menutup diri dari diskusi terkait isu “LGBT” itu. Dari 6 orang jurnalis yang diwawancara oleh peneliti Konde.co, ada jurnalis yang menyampaikan redaksinya cukup terbuka dengan diskusi. Namun mereka tak menampik bahwa ruang diskusi yang mereka dapatkan adalah hal yang tak bisa dimiliki oleh semua jurnalis, khususnya jurnalis dengan keberagaman gender.

“Gue merasa ada ketimpangan relasi di dalam redaksi media lain, kayak misalnya kita tidak bisa menawar ketika mereka beralih soal keyword [kata kunci dalam mesin pencari], tapi kalau di kantorku, hal tersebut bisa didiskusikan. Misalnya

kita punya angle dan aku sampaikan ke editor, jadi dia akan bilang sebaiknya seperti ini, lebih inklusi dan konstruktif, komprehensif dan narasumber juga lengkap. Sayangnya hal yang aku alami ini jadi seperti privilege, padahal seharusnya itu jadi kewajiban redaksi. Iklim redaksi yang baik ya harusnya seperti itu. Kalau redaksi top-down, jurnalis ya tidak akan menjadi berkembang.” (JR 4)

“Menurutku, secara umum media belum menjadi ruang yang aman bagi komunitas “LGBT”, tapi kalau spesifik pada beberapa media di luar media arus utama sih mungkin sudah oke ya, sudah bisa menjadi ruang aman untuk komunitas “LGBT” berekspresi atau mempresentasikan dirinya. Tapi untuk menyediakan ruang aman itu perspektif orang-orang medianya dulu harus dibenahi, instrumennya juga. Masalahnya adalah belum tentu media cukup terbuka dengan hal yang seperti ini, belum tentu jurnalisnya punya perspektif yang sama. Aku menemui beberapa orang yang seperti itu. Seharusnya editor itu harus punya perspektif yang baik terkait isu “LGBT” karena kalau jurnalis perspektifnya oke tapi editornya enggak, ya sama aja bohong. Kamu enggak akan bisa menulis yang tepat isu ini.” (JR 3)

Kepada peneliti Konde.co, JR 3 dan JR 6 menceritakan bahwa diskusi yang terbatas mengenai “LGBT” merupakan sebuah kemunduran. JR 3 mengatakan bahwa pengetahuan tentang keberagaman gender dan seksualitas sudah Ia dapatkan sejak sekolah. JR 3 yang sudah menjadi jurnalis lebih dari sepuluh tahun ini mengatakan bahwa di SMA-nya, diskusi tentang keberagaman bukan menjadi hal tabu.

“Aku cukup beruntung sih sebenarnya karena dari SMA, obrolan seperti ini (terkait komunitas “LGBT”) sudah muncul di sekolahku. Meskipun tidak secara langsung diberikan di mata pelajaran, katakanlah BP, tapi anak-anaknya sudah terbuka untuk membicarakan hal ini. Bahkan aku dan teman-

temanku dulu sekitar seminggu sekali bikin layar tancap gitu di sekolah, film-film indie itu kita putar di sekolah. Ada salah satu adegan di film itu di mana perempuan pleasuring herself dan kameranya mengarah ke bawah dan menunjukkan dia berpenis, saat itu ada guru yang ikut menyaksikan, tapi ya biasa aja.” (JR 3)

JR 6 dalam wawancara kepada Konde.co menceritakan bahwa pembicaraan terkait isu “LGBT” di kantornya mengalami kemunduran pasca tahun 2015.

“Pasca tahun 2015, mediaku menjadi sangat normatif. Mereka mengakui itu dan mereka mengetahui bahwa masalah mereka di situ. Aku juga sempat berbincang dengan kawan di SEJUK dan bercerita mengapa isu “LGBT” tidak diangkat. Aku menyarankan untuk datang ke redaksi dan ngobrol, dan mereka tahu bahwa posisi mediaku memang tidak mau sangat ketara. Pendekatan seperti ini terjadi di semua isu, enggak hanya isu kontroversial.” (JR 6)

Listiorini, D. (2020) dalam Disertasinya yang berjudul “Rezim Kebenaran Media dalam Kepanikan Moral” mengatakan bahwa pada tahun 1960-1990 an, media masih memberikan ruang diskusi mengenai keberadaan individu atau kelompok dengan keberagaman gender dan seksual non-normatif. Listiorini menyebutkan, pada tahun 1970 hingga awal 1980, pemberitaan tentang keragaman gender dan seksual non-normatif banyak menarasikan transgender perempuan tanpa banyak menyinggung isu moral, terutama agama. Laporan Human Rights Watch (2016) berjudul “Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami: Kelompok “LGBT” Indonesia dalam Ancaman” memaparkan bahwa sejak awal tahun 2016, serangkaian pernyataan anti-“LGBT” dilontarkan oleh para pejabat pemerintah yang berkembang menjadi ancaman dan kebencian terhadap “LGBT” di Indonesia. Ujaran kebencian yang disampaikan pemerintah ini kemudian diamplifikasi oleh jurnalis lewat pemberitaan. Sepanjang tahun 2016, pemberitaan media massa, khususnya daring dipenuhi oleh ujaran kebencian terhadap “LGBT” yang dibahas dengan beragam topik, sudut pandang, dan kepentingan (Listiorini, dkk., 2019).

5.2. Tantangan dari eksternal media

Jurnalis yang melakukan peliputan keberagaman gender dan seksualitas serta jurnalis yang mengidentifikasi diri sebagai gender non-normatif tak hanya mengalami hambatan dalam internal media, tapi juga dari eksternal media. JR 2 misalnya, sebagai seorang transpria, ia seringkali mengalami *misgendering* atau pemanggilan seseorang yang tidak sesuai dengan gender yang mereka miliki. JR 2 mengatakan bahwa ia sudah berulang kali meralat pronouns yang keliru, tapi beberapa di antara si pemanggil tak mau meralatnya.

“Aku terbuka dengan identitasku, tapi aku sering mendapatkan *misgendering* dan itu mengganggu. Mereka memanggilku dengan ‘mbak’. Kalau satu dua kali keliru itu masih bisa memahami, tapi kalau berkali-kali, itu mengganggu. Mayoritas yang melakukan *misgendering* itu laki-laki, kalau teman-teman perempuan biasanya masih mau memanggil mas sampai kak. Kalau mengalami *misgendering* pasti aku memberi tahu dari bercanda sampai sengak. Dulu pernah, ada seorang teman dari LSM memanggilku dengan kata ‘mbak’, padahal aku sudah bilang kalau aku laki-laki dan aku meminta dia memanggilku dengan male pronouns, tapi dia enggak mau mengubah. Akhirnya aku tanya sama dia, ‘kamu mau enggak kalau aku panggil monyet?’ Sekarang dia sudah berubah, enggak memanggilku dengan ‘mbak’.” (JR 2)

JR 1 pun pernah mendapat hambatan dari luar lingkaran kantornya, yakni pembaca. Ini terjadi ketika ia menghasilkan sebuah riset terkait dengan isu “LGBT”. Saat hasil riset tersebut tayang di akun resmi media sosial media tempatnya bekerja, JR 1 langsung mendapat respons negatif dari netizen. Identitas personalnya diserang. Ia mendapat cercaan yang berkaitan dengan identitas personalnya.

“Waktu tulisan itu naik sebenarnya gak terlalu banyak apa-apa, menyerangku juga enggak. Cuma habis itu kan gak lama artikel itu dijadikan video, dimasukin media sosial, wow itu langsung banyak banget yang komentar ‘wah dilarang agama’, “LGBT” meresahkan’, bahkan sampai menyerang personalku. Dibilang kamu bukannya orang (menyebut satu identitas SARA tertentu-red), tapi bawain isu kayak gitu. Padahal waktu itu kita risetnya cukup dangkal, cuma menunjukkan pandangan masyarakat masih kayak gini loh, ga directly ini bilang kelompok “LGBT” ini bukan salah terhadap agama, melanggar agama.

Rio Tuasikal dalam artikel berjudul “Pengalaman Jurnalis Meliput “LGBT”: Dianggap Gay dan Membuat Berita Sampah” yang dipublikasi di *Konde.co* pun menceritakan bahwa tantangan datang dari pembaca laporan jurnalistiknya. Rio mengatakan bahwa berita yang ia hasilkan dianggap sebagai berita sampah oleh audiens meskipun memiliki kualitas jurnalistik yang baik.

Tantangan dari eksternal media dalam menulis tentang keragaman gender dan seksualitas memang masih sangat terasa di Indonesia. Belum hilang di ingatan kita pembredelan *Pers Mahasiswa SUARA USU* yang dilakukan oleh pihak rektorat Universitas Sumatera Utara. Pembredelan itu terjadi setelah *Pers Mahasiswa* menerbitkan cerita pendek berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya”. Bahkan gugatan mahasiswa Universitas Sumatera Utara atas SK Rektor USU tentang pemecatan seluruh pengurus *Persma Suara USU* ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Hakim beralasan, tulisan atau cerita pendek yang diterbitkan oleh mahasiswa menimbulkan polemik di masyarakat.

5.3. Kesimpulan

Pers yang seharusnya sarana untuk mencapai kesetaraan, ternyata masih belum bisa menjadi ruang aman bagi komunitas “LGBT”. Hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada jurnalis yang memilih identitas gender dan seksual ‘non-normatif’ menemukan bahwa ruang redaksi masih kental dengan kultur homophobia dan transphobia. Kultur ini menjadikan jurnalis tidak nyaman. Hal tersebut tidak hanya terjadi dalam aktivitas sosial di ruang redaksi, tetapi sikap perkawanan jurnalis yang menormalisasi kultur homophobia ini berimbas pada pemberitaan. Media berlindung di balik keberimbangan jurnalistik untuk melanggengkan narasi yang menyudutkan komunitas “LGBT”. Hal ini menandakan bahwa persoalan di ruang redaksi terkait “LGBT” tak hanya soal konten, namun juga persoalan di lingkungan redaksi

Inklusivitas yang seharusnya ada di ruang redaksi, justru menjadi hal yang harus diperjuangkan. Sayangnya, media masih “membatasi” diskusi terkait isu “LGBT”. Jurnalis yang memiliki *concern* terhadap isu keberagaman dianggap tidak mau mengerjakan isu lain. Namun ketika jurnalis membuka ruang diskusi di ruang redaksi seperti yang dilakukan oleh JR 6, pemangku kebijakan di media tempat Ia bekerja justru takut untuk menyuarakan keberagaman gender dan seksualitas dengan perspektif yang lebih progresif. Redaksi di media arus utama yang memiliki *power* besar di publik memiliki kekhawatiran digeruduk oleh kelompok agama fundamentalis.

Dari hasil wawancara ini, tim peneliti menemukan bahwa baik jurnalis yang menyuarakan isu keberagaman gender dan seksualitas maupun jurnalis yang memilih identitas gender dan seksual ‘non-normatif’ juga mengalami kekerasan dari eksternal. JR 2 misalnya, sebagai seorang jurnalis yang mengidentifikasi diri sebagai seorang trans laki-laki, seringkali mengalami *misgendering*. Sedangkan JR 1, Ia pernah mendapatkan cercaan dari warganet ketika artikel yang Ia tulis dijadikan konten video oleh redaksi. Bahkan JR 1 mengalami hinaan berbasis SARA ketika video tersebut dipublikasi. Hal ini juga menunjukkan, bahwa persoalan jurnalis tak hanya terjadi di lingkungan internal redaksi, namun juga dari lingkungan eksternal redaksi.

BAB 6

Penutup

Penelitian ini menemukan kondisi memprihatinkan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di media, seperti kebijakan media televisi yang seturut dengan aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang tak memperbolehkan LGBT untuk masuk di media penyiaran. Televisi selalu dibayang-bayangi akan dicabut izin siarannya jika tak melakukan kebijakan seturut aturan KPI. Padahal media seharusnya mampu memecah kebijakan yang diskriminatif terhadap LGBT, dan tidak berpihak pada lembaga atau pemerintah yang melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Riset juga menyimpulkan, dalam persoalan pemberitaan yang terkait dengan kriminalitas, media masih menempatkan polisi sebagai pihak-pihak yang punya otoritas terhadap kehidupan LGBT, seperti polisi yang menjadi subjek penting ketika terjadi kriminalisasi terhadap LGBT, bahkan ketika komunitas LGBT menjadi korban. Polisi menguasai narasi terhadap komunitas LGBT, hanya ada beberapa media yang memberikan ruang kepada komunitas. Meski demikian, ruang terhadap komunitas LGBT pun lebih sedikit dibandingkan ruang yang diberikan kepada polisi.

Tekanan terhadap pemberitaan terkait komunitas LGBT dipengaruhi oleh beberapa elemen:

- 1) *Click* di media daring
- 2) Adu cepat dalam memproduksi berita
- 3) Aturan lembaga yang berwenang atas media, di antaranya KPI

Hasil riset secara umum juga membuktikan: media dalam penelitian ini sangat hati-hati dalam mengambil kebijakan terhadap isu LGBT, belum memperhitungkan isu LGBT sebagai isu penting, dan tidak mempunyai

langkah-langkah kebijakan isu ini di redaksi. Selain masih melihat isu LGBT sebagai isu kriminal dan isu perbedaan perlakuan/diskriminasi sebagai isu biasa, ini merupakan hal serius tentang bagaimana media melanggar diskriminasi.

Berdasarkan hasil analisis dari pemberitaan tiga kejadian yakni pembakaran transpuan Mira di Cilincing, prank sampah yang dilakukan oleh Youtuber Ferdian Paleka, dan persekusi “pesta” di Apartemen Kuningan terlihat bahwa media masih melakukan marginalisasi terhadap komunitas gender dan seksualitas ‘non-normatif’. Media menggunakan pola peminggiran yang sama terhadap komunitas “LGBT” yakni dengan pemilihan diksi yang berkonotasi negatif, hingga pemilihan narasumber yang terbatas pada otoritas resmi.

Diskriminasi juga terjadi di ruang redaksi terhadap jurnalis “LGBT” juga kekerasan dalam kata-kata seperti ungkapan kata “banci” ini menunjukkan bahwa perjuangan jurnalis tidak hanya dari sisi konten dan kebijakan redaksi, tapi juga lingkungan kerja di redaksi.

Berdasarkan hasil temuan-temuan penelitian, studi mengajukan beberapa rekomendasi, antarlain:

Pertama, mendorong media mempunyai kebijakan seturut hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia seperti non diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti “LGBT” karena media mempunyai fungsi kampanye non diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Konvensi Anti Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW).

Kedua, pentingnya pengambil kebijakan di redaksi dan jurnalis mendapatkan pendidikan pengetahuan tentang SOEGIE-SC dan masalah tentang patriarki untuk memberikan kekuatan perspektif di ruang redaksi media.

Ketiga, pentingnya advokasi pada pemerintah dan lembaga negara seperti Komisi Penyiaran (KPI) yang harus mereformasi diri dan tidak

menerapkan tindakan-tindakan yang melakukan ketakutan terhadap media dalam isu “LGBT”.

Keempat, Dewan Pers bisa menelaah dari panduan jurnalis meliput LGBT yang sudah ada, yang diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dan Ardhanari.

Selain rekomendasi ini, rekomendasi penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian lanjutan untuk memfasilitasi bentuk kebijakan dan strategi redaksi media untuk non diskriminatif terhadap “LGBT”.

Biodata Peneliti dan Penulis

Widia Primastika, jurnalis yang kini bekerja di Konde.co. Pernah bekerja di media arus utama seperti di Tirto.id dan Kantor Berita Radio (KBR). Memiliki ketertarikan untuk belajar dan meliput isu gender dan seksualitas, serta kesehatan mental.

Marina Nasution, Jurnalis televisi yang murtad dan kini muallaf di Konde.co Pengagum paradoks semesta, gemar membeli buku tapi lupa membaca. Kini, Managing Editor Konde.co.

Dina Listiorini, Dosen dan peneliti Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ia mengajar tentang komunikasi, seksualitas dan keberagaman gender. Menyelesaikan Program Doktoratnya di Universitas Indonesia dengan Disertasinya tentang LGBT dan Media.

Lestari Nurhajati, menyelesaikan pendidikan S3 di Ilmu Komunikasi FISIP UI. peneliti independen yang menekuni kajian media dan literasi digital. Saat ini juga menjadi dosen di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.

Luviana, Setelah lebih dari 20 tahun menjadi jurnalis di sejumlah media mainstream, kini menjadi Pemimpin Redaksi Konde.co dan menjadi dosen pengajar paruh waktu di Jakarta. Pedagogi nya dalam penulisan isu media, perempuan dan minoritas. Mendapatkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan penghargaan LBH Jakarta Award dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta untuk isu kebebasan.

Reka Kajaksana, Penulis dan Jurnalis. Menulis Adalah Jalan Ninjaku.

Referensi

Andajani, S., Lubis, D., & Graham-Davies, S. (2015). Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia. *Jurnal Perempuan* Edisi 87, Vol 20, No. 4, November 2015

Ayoub, P. M., & Garretson, J. (2017). Getting the message out: Media context and global changes in attitudes toward homosexuality. *Comparative political studies*, 50(8), 1055-1085.

Cohen (2011). Whose side were we on? The undeclared politics of moral panic theory. *Crime Media Culture* 2011 (7: 237)

Crotty, M. (2003). *The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in The Research Process*. London: SAGE Publications.

Denzin, N. dan Lincoln, Y.S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Edisi ke 5. Sage Publication

Graham, S. (2007). Sulawesi Fifth Gender. *Inside Indonesia*, 30 Juli 2007. <http://www.insideindonesia.org/sulawesis-fifth-gender-2> diakses 6 Agustus 2016

Greer, C. (2003). *Sex Crime and the Media: sex offending and the press in a divided society*. Willan Publishing: Portland, USA.

Handoko, T. (2021). Oknumisasi Aparat dan Politik Bahasa di Media. <https://www.remotivi.or.id/mediapedia/700/oknumisasi-aparat-dan-politik-bahasa-di-media>

Hennink, M., Hutter, I. dan Ajay Bailey (2011). *Qualitative Research Methods*. London: Sage

Hester, J. B., & Gibson, R. (2007). The relationship between tone of TV news coverage and public opinion for a controversial issue. *Electronic News*, 1(2), 89-102.

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33218-kpi-larang-promosi-lgbt-di-tv-dan-radio?start=279&detail3=4935&detail5=320>

<https://lokadata.id/artikel/bissu-gender-kelima-dari-tanah-bugis>

<https://remotivi.or.id/ReportIMI-DigitalVersion.pdf>

<https://tirto.id/buntut-gugatan-suara-usu-ditolak-ptun-kampus-krisis-demokrasi-elRy>

<https://tirto.id/kpi-larang-tv-siarkan-adegan-berpelukan-lgbt-selama-ramadan-2021-gbkM>

<https://www.alinea.id/media/transgender-identitas-yang-tercerabut-dari-masyarakat-b1Uwe9Qk>

<https://www.jawapos.com/jpg-today/19/09/2017/misteri-kehidupan-malam-warok-gemblak/>

<https://www.konde.co/2020/05/pengalaman-jurnalis-meliput-lgbt.html/>

<https://www.remotivi.or.id/amatan/657/transgender-dalam-pusaran-pemberitaan-media-ada-yang-mesti-diubah>

<https://www.voaindonesia.com/a/komunitas-lgbt-berjuang-lawan-stigma-di-media-massa/5417738.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=fcmB9jvRAYM>

Human Rights Watch. 2016. Permainan Politik ini Menghancurkan Hidup Kami: Komunitas LGBT Indonesia dalam Ancaman.
Imaduddin, F. (2018).

<https://www.remotivi.or.id/amatan/475/kegagapan-digital-dan-bunuh-diri-perlahan-jurnalisme>

Jaworski, B. K. (2009). Reproductive justice and media framing: a case study analysis of problematic frames in the popular media. *Sex Education*, 9(1), 105–121.

JURNAL STUDI KOMUNIKASI, Volume 3 Ed 3, November 2019 Page 355 - 371

Listiorini, D. 2020. Rezim Kebenaran Media dalam Kepanikan Moral (Diskursus Foucauldian “LGBT” dalam Gelar Wicara Televisi dan Berita Daring 2016-2018.

Listiorini, D. dan Davies, S. G. (2017). Online dating apps blocked. *Inside Indonesia* 18 April 2017. <https://www.insideindonesia.org/online-dating-apps-blocked> diakses 5 Juni 2021.

Listiorini, D., Asteria, D., & Hidayana, I. 2019. Diskursus Ujaran Kebencian Pemerintah pada Kasus LGBT di Media Daring. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 16 No. 2, Desember 2019; 243-258.

Listiorini, D., D. Asteria dan I. M. Hidayana (2019b). Diskursus Ujaran Kebencian Pemerintah pada Kasus LGBT di Media Daring. *Jurnal Ilmu Komunikasi UAJY* Vol. 16, No 2, Desember 2019: 243-258

Moral panics on lgbt issues: evidence from indonesian tv programme Dina Listiorini, Donna Asteria, Billy Sarwono

Nurhajati, L. (2019). Indonesia: Diversities and media discrimination. Chapter book of Transnational Othering—Global Diversities: Media, extremism and free expression. Nordicom, University of Gothenburg.

Tapsell, R. (2017). Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital. Penerbit Marjin Kiri: Jakarta, Indonesia.

The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back In Baldwin Van Gorp
Journal of Communication 57 (2007) 60–78

Zakiah, N.R. (2018). Bahaya Akut Persekusi LGBT. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.



THEIR STORY

RISET MEDIA MEMANDANG KERAGAMAN
GENDER DAN SEKSUAL NON-NORMATIF
("LGBT")